

ANALISA

1984—9

**PEMBAURAN
DAN
TANTANGANNYA**



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Dewan Redaksi

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAHI

Daoed JOESOEOF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAHI
Jusuf WANANDI
Kirdi DIPOYUDO
A. Sudiharto DJIWANDONO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO
Ronald NANGOI

Pande Radja SILALAHI
Ronald NANGOI

STT SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN 0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang 111/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532 - 35

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta 10160, Telepon 349489

ANALISA

TAHUN XIII, NO. 9, SEPTEMBER 1984

PENGANTAR REDAKSI	649
SUATU KERANGKA TEORETIS TENTANG MASALAH PEMBAURAN BANGSA KHUSUSNYA KELOMPOK KETURUNAN CINA	
<i>Onny S. PRIJONO</i>	651
MEMAHAMI MASALAH PEMBAURAN SECARA KONSEPTUAL	
<i>Iwan P. HUTAJULU</i>	671
HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PROSES PEMBAURAN BANGSA	
<i>BABARI</i>	688
PERUNDANG-UNDANGAN KEWARGANEGARAAN RI: SARANA EFEKTIF ATAU KENDALA PEMBAURAN BANGSA?	
<i>H. Anton DJAWAMAKU</i>	701
LATAR BELAKANG SOSIO-HISTORIS KELOMPOK KETURUNAN CINA DI INDONESIA	
<i>Onny S. PRIJONO</i>	715
PEMBAURAN MASYARAKAT MEMPERKUKUH KESATUAN BANGSA	
<i>SUKANTO</i>	727

Pengantar Redaksi

Adalah suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Kenyataan ini merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia dan sekaligus menciptakan tantangan-tantangan. Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa perjalanan masyarakat Nusantara menuju terwujudnya kesatuan bangsa tidak selalu berjalan mulus, melainkan kadang-kadang berhadapan dengan berbagai masalah.

Di satu pihak, pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan tidak dinaksudkan dan tidak mungkin menghilangkan kebhinnekaan tertentu seperti keragaman suku, agama dan ras. Tetapi di lain pihak agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan mulus, segala masalah yang timbul dan mungkin timbul dari kebhinnekaan tersebut perlu dihilangkan. Pada masa penjajahan, kebhinnekaan sering dipakai sebagai alat untuk memecah-belah masyarakat demi melanggengkan kekuatan penjajah. Dalam masa pembangunan sekarang pun sulit untuk menyangkal bahwa kebhinnekaan tersebut sering dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Penggunaan atau pemanfaatan kebhinnekaan masyarakat yang menyimpang dari tujuan luhur bangsa Indonesia mau tidak mau harus dicegah dan dihilangkan. Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ia membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Atas dasar ini maka ANALISA kali ini menurunkan tema "Pembauran dan Tantangannya" dengan mengetengahkan tulisan-tulisan yang dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang masalah pembauran.

Dalam tulisan pertama yang berjudul "Suatu Kerangka Teoretis tentang Masalah Pembauran Bangsa Khususnya Kelompok Keturunan Cina," Onny S. Prijono membahas secara khusus hubungan antara prasangka dan diskriminasi dalam usaha-usaha pembauran bangsa dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian dalam tulisan kedua, yang berjudul "Memahami Masalah Pembauran Secara Konseptual," Iwan P. HUTAJULU berusaha meletakkan pengertian dan tujuan pembauran itu dalam tempat yang seharusnya melalui kenyataan yang ada di masyarakat.

Kenyataan membuktikan bahwa beberapa hambatan masih sering dialami dalam usaha pembauran. Sehubungan dengan ini dua buah tulisan berikutnya masing-masing "Hambatan-hambatan dalam Proses Pembauran Bangsa" oleh BABARI, "Perundang-undangan Kewarganegaraan RI: Sarana Efektif atau Kendala Pembauran Bangsa?" oleh H. Anton DJAWAMAKU, mencoba mengupas hambatan-hambatan yang pernah, sedang dan akan dialami dalam masalah pembauran. Kedua tulisan ini dengan sengaja mengungkapkan masalah tersebut dengan maksud agar pembauran yang diinginkan dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam usaha pembauran yang sering menonjol dan/atau ditonjolkan adalah pembauran kelompok keturunan Cina. Hal ini tentu merupakan konsekuensi logis dari bobot permasalahan yang timbul atau sedang dihadapi. Berkaitan dengan ini Onny S. PRIJONO dalam tulisan yang berjudul "Latar Belakang Sosio-Historis Kelompok Keturunan Cina di Indonesia" secara khusus memberi uraian yang dapat memberi gambaran adanya faktor-faktor yang tidak memungkinkan kita menggeneralisasikan permasalahan yang ada apalagi tindakan penanggulangannya. Tetapi sebaliknya dengan uraian yang diberikan kita dapat memilah-milah persoalan yang sedang dan akan kita hadapi dan sekaligus bagaimana cara untuk menghadapinya.

Salah satu tujuan pembauran masyarakat adalah untuk memperkuat dan memperkuat kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa dalam dunia yang saling bergantung sekarang sangat penting karena tanpa itu dapat dipastikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa tidak akan kuat menghadapi segala cobaan maupun hambatan yang ada dalam mencapai cita-citanya. Sejalan dengan ini dalam tulisan keenam dan terakhir, SUKANTO menguraikan betapa pentingnya usaha ini dilakukan secara baik, dalam tulisannya yang berjudul "Pembauran Masyarakat Memperkuat Kesatuan Bangsa."

Tulisan-tulisan dalam penerbitan kali ini banyak menguak permasalahan yang pernah, sedang dan akan dihadapi. Semuanya itu sengaja dikemukakan dengan maksud untuk mendalami permasalahan dan sekaligus untuk merangsang tindakan pencegahan dan penanggulangan dengan memakai peralatan yang lebih tajam dan ampuh.

Suatu Kerangka Teoretis tentang Masalah Pembauran Bangsa Khususnya Kelompok Keturunan Cina

Onny S. PRIJONO*

Dalam sejarah pergerakan Indonesia peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan kebulatan tekad pemuda-pemudi Indonesia adalah momentum yang penting dan merupakan titik tolak yang mempersatukan seluruh tanah air, bangsa dan bahasa. Pernyataan bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu jelas mencerminkan bahwa walaupun negara ini terdiri atas beribu-ribu kepulauan masing-masing dengan suku bangsa dan bahasanya semuanya dilebur menjadi satu Indonesia. Sudah merupakan konsensus bahwa Pancasila merupakan pencerminan kebudayaan Indonesia yang mempersatukan semua suku bangsa dengan bahasanya yang beraneka ragam.

Lain halnya dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, kelompok keturunan Cina tidak terikat pada suatu lokasi atau teritorial tertentu tetapi tersebar dimana-mana. Mereka juga berasal dari ras dengan kebudayaan yang berlainan. Kelompok keturunan Cina sebagai kelompok minoritas sejak dahulu dipermasalahkan walaupun secara yuridis telah menjadi warga negara Indonesia dan dalam UUD 1945 Bab X Pasal 27 dinyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Untuk memecahkan permasalahan sosial tersebut diusahakan peningkatan pembauran bangsa di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya, dalam rangka usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional (GBHN 1983 Bab IV butir e).

Karena kompleksnya permasalahan tersebut maka dapat ditinjau dari dimensi kelompok dan dimensi individu. Pembahasan mengenai dimensi kelompok meliputi definisi kelompok keturunan Cina sebagai kelompok

*Staf CSIS.

minoritas, tujuannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kelompok keturunan Cina. Sedangkan dimensi individu berkenaan dengan etnosentrisme, stereotip, prasangka dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi erat kaitannya; ada prasangka tanpa diskriminasi, ada diskriminasi tanpa prasangka; diskriminasi dapat menjadi penyebab prasangka, dan prasangka dapat menjadi penyebab diskriminasi. Pada umumnya prasangka dan diskriminasi mempunyai hubungan yang bersifat saling menunjang.

Prasangka dan diskriminasi tidak merupakan gejala yang berdiri sendiri. Tetapi prasangka dan diskriminasi hanya dapat dimengerti sebagai manifestasi situasi yang lebih luas atau menempatkannya dalam konstelasi dengan berbagai sumber dan faktor pengaruh. Prasangka dan diskriminasi tidak selalu mengakibatkan konflik sosial tetapi tergantung pada kuat atau lemahnya pengendalian sosial. Mengenai sumber terbentuknya prasangka terdapat berbagai teori. Misalnya Bonner mengemukakan pengetahuan historis, data etnologi dan sosialisasi sebagai sumber terbentuknya prasangka. Aronson menyebutkan konflik atau persaingan ekonomi dan politik, rasionalisasi agresi, kepribadian yang berprasangka, dan penyesuaian diri terhadap norma-norma yang berlaku. Dan McLemore menggunakan teori transmisi kebudayaan, teori kepribadian, teori keuntungan kelompok dan teori identifikasi kelompok untuk menerangkan proses terbentuknya prasangka. Sedangkan diskriminasi tidak selalu sebagai akibat prasangka tetapi dapat langsung dipelajari melalui transmisi kebudayaan, teori keuntungan kelompok, teori tekanan sosial/keadaan dan struktur pelembagaan.

Sebagai masalah yang kompleks terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan psikologis-sosiologis, pendekatan fungsional dan pendekatan konflik. Pendekatan psikologis-sosiologis terutama mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan prasangka dan diskriminasi serta efeknya terhadap individu. Pendekatan fungsional melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas serangkaian bagian yang berhubungan satu sama lain. Jika bagian-bagian tersebut terintegrasi maka masyarakat berada dalam keadaan seimbang. Dasar teori fungsional adalah bahwa perubahan sikap seseorang tergantung dari kebutuhan. Sedangkan pendekatan konflik melihat sejarah hubungan kelompok etnik sebagai konflik di satu pihak dan penindasan di lain pihak.

Dari analisa deskriptif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai proses hubungan antara prasangka dan diskriminasi, untuk meningkatkan usaha-usaha pembauran bangsa dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

DIMENSI KELOMPOK

Dimensi kelompok meliputi pembahasan mengenai definisi orang Cina dan keturunannya sebagai kelompok minoritas, tujuan kelompok minoritas dan peraturan perundang-undangan terhadap kelompok minoritas. Definisi maupun ciri-ciri kelompok minoritas tidak akan dikemukakan dalam tulisan ini. Mengenai tujuan kelompok minoritas sejak tahun 1960 terdapat dua pemikiran yang masing-masing berbeda, yaitu, pertama, konsep integrasi dan kedua, konsep asimilasi. Konsep integrasi menganut konsep pendekatan kelompok, sedangkan konsep asimilasi bertitik tolak dari pendekatan individual, yang secara resmi dinyatakan dalam Piagam Asimilasi yang ditandatangani di Bandungan, Ambarawa tanggal 15 Januari 1961 sebagai hasil seminar Kesadaran Nasional di Bandungan. Konsep integrasi pada dasarnya memperjuangkan agar kelompok keturunan Cina di Indonesia diterima dalam kehidupan masyarakat dan mendapatkan kedudukan sama dengan suku-suku bangsa yang mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan konsep asimilasi yang bertitik tolak dari pendekatan individual, dimaksudkan sebagai "proses penyatugabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yaitu yang dalam hal ini dinamakan bangsa Indonesia."¹ Di sini tampak jelas perbedaan di antara kedua konsep pembauran tersebut; meskipun kedua-duanya ingin memecahkan persoalan yang sama yaitu masuk dan diterimanya WNI keturunan Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia.

Pembauran bangsa yang dikemukakan dalam GBHN 1983 dapat diasosiasikan dengan "melting-pot ideology" yang merupakan peleburan dan persatuan dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dan membentuk satu bangsa dan kebudayaan baru yang dalam hal ini dapat disebut sebagai bangsa dan kebudayaan Indonesia.² Dalam hal ini asimilasi merupakan manifestasi dari konsep pembauran bangsa tersebut. Proses asimilasi terjadi jika ada kelompok-kelompok manusia yang berasal dari lingkungan kebudayaan yang berbeda; individu-individu dari kelompok tersebut saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok tersebut masing-masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu.³

¹Dikutip dari Piagam Asimilasi, *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*, Yayasan Tunas Bangsa, Jakarta, hal. 143.

²Mengenai "Melting-pot Ideology" lihat S. Dale McLemore; *Racial and Ethnic Relations in America* (Boston, London, Toronto : Allyn and Bacon, Inc. 1980), hal.89-91.

³Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta : Aksara Baru, 1974), hal. 149; Abdul Rahman Patji, "Asimilasi Golongan Etnis Arab, Suatu Studi Lapangan di Kelurahan Ampel Surabaya," *Masyarakat Indonesia*, Tahun X, No. 1, 1983, hal. 49.

Milton Gordon memerinci konsep asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun minoritas dalam tujuh macam asimilasi yang berkaitan satu sama lain, yaitu :¹

1. Asimilasi kebudayaan/peri laku (atau akulturasi) berkaitan dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan yang disesuaikan dengan kelompok mayoritas;
2. Asimilasi struktural berkaitan dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran ke dalam klik-klik, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas;
3. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) berkaitan dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran;
4. Asimilasi identifikasi berkaitan dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas;
5. Asimilasi sikap berkaitan dengan tak adanya prasangka;
6. Asimilasi peri laku berkaitan dengan tak adanya diskriminasi;
7. Asimilasi civic berkaitan dengan tak adanya konflik nilai dan kekuasaan.

Ketiga butir yang terakhir sebenarnya kurang berkaitan dengan asimilasi tetapi lebih merupakan kondisi yang menyebabkan asimilasi. Amalgamasi atau perkawinan campuran yang meluas antar kelompok etnik dapat digunakan sebagai indeks terjadinya proses asimilasi. Menurut Gordon, asimilasi struktural merupakan indikator yang paling menentukan bagi suatu proses sosial. Akulturasi yang meluas bahkan asimilasi identifikasi dapat terjadi tanpa adanya penyerapan atau peleburan ke dalam masyarakat dominan. Sedangkan bagi terwujudnya asimilasi struktural tidak dapat tanpa adanya pengaruh dari kondisi lainnya.

Akulturasi dapat terjadi karena kondisi kebudayaan itu sendiri, perubahan dalam minat dan kesadaran berbangsa yang makin mantap. Struktur sosial suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok etnik, misalnya di perkotaan berkembang sistem persaingan dan masyarakatnya heterogen serta terbagi atas berbagai lapisan masyarakat. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang lebih homogen dan sistem persaingan biasanya

¹George Eaton Simpson & J. Milton Yinger, *Racial and Cultural Minorities : An Analysis of Prejudice and Discrimination*, 4th ed., (New York, Evanston, San Franeiseo, London : Harper & Row Publishers, 1972), hal. 18; Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian" dalam Koen-tjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : PT Gramedia, 1977), hal. 34; Milton Gordon, *Assimilation in American Life* (Oxford University Press, 1964), hal. 71; Abdul Rahman Patji, *Ibid.*, hal. 50; Milton L. Barron, *Minorities in a Changing World* (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1969), hal. 391.

kurang terasa. Perubahan dalam struktur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, demografi maupun pendidikan cenderung pada pola hubungan baru karena menyangkut sikap individu. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah kontinuitas dan perubahan pada individu anggota kelompok minoritas. Disamping itu kondisi atau keadaan harus sedemikian rupa sehingga sikap dari mayoritas tidak merupakan hal yang rawan.

Dalam rangka meningkatkan usaha-usaha pembauran bangsa telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan yang menyangkut kelompok keturunan Cina, misalnya yang berkenaan dengan hal perkawinan, bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan (agama, kepercayaan, adat istiadat Cina dan ganti nama) dan bidang media massa.

DIMENSI INDIVIDU

Dimensi individu meliputi pembahasan mengenai etnosentrisme, stereotip, prasangka dan diskriminasi. Fokus terutama adalah pada prasangka dan diskriminasi serta hubungannya satu sama lain.

Etnosentrisme

Kecenderungan setiap individu dari suku bangsa apa pun juga biasanya melihat kebudayaannya sebagai yang terbaik. Hal ini dikenal sebagai etnosentrisme, yaitu suatu kecenderungan yang melihat nilai dan norma kebudayaannya sendiri sebagai sesuatu yang mutlak serta menggunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan mengukur kebudayaan-kebudayaan lain.¹ Karena setiap kebudayaan mempunyai nilai dan pola tingkah laku yang berbeda, kebudayaan seseorang menjadi superior jika dibandingkan kebudayaan orang lain. Etnosentrisme merupakan gejala sosial yang universal dan penilaian yang demikian biasanya dilakukan secara tidak sadar.

Dalam berkomunikasi etnosentrisme dapat menghasilkan akibat yang kurang baik. Misalnya seseorang secara tak sadar menggunakan simbol yang mungkin mempunyai arti yang berbeda atau bernada negatif bagi orang lain. Si penerima mengasumsikan atau menginterpretasikan hal tersebut sesuai dengan pengertian yang dianutnya sehingga si pengirim mungkin dipandang sebagai orang yang tidak berperasaan, kurang ajar atau tidak berpendidikan. Dengan demikian etnosentrisme merupakan kecenderungan tak sadar untuk menginterpretasi atau menilai kelompok lain ataupun suatu situasi menurut nilai kebudayaannya sendiri. Apabila hal itu diterapkan pada komunikasi, seseorang bertindak etnosentrik kalau diasumsikan bahwa orang dari

¹Encyclopedia of Sociology (Guilford, Conn. : Dushkin Publishing Group, 1974), hal. 101.

kebudayaan yang lain seharusnya memperhatikan, menginterpretasi, mengevaluasi dan bertingkah laku seperti yang ia lakukan dalam kebudayaannya sendiri. Akibatnya, etnosentrisme dapat menjadi sebab utama kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

Stereotip

Stereotip adalah pendapat yang dianut mengenai suatu kelompok individu atau obyek.¹ Stereotip ini dapat terjadi sebagai akibat generalisasi yang gegabah atau merupakan aplikasi generalisasi dari kasus-kasus tertentu. Misalnya, setelah mengamati satu atau dua anggota kelompok, seseorang menyimpulkan bahwa semua anggota kelompok tersebut adalah sama dengan jumlah kecil ini. Dalam hal ini pengalaman pribadi seseorang seringkali mendukung terwujudnya stereotip. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa suatu stereotip merupakan suatu klasifikasi yang didasarkan atas pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Stereotip seringkali dikatakan sebagai gambaran-gambaran yang sudah ada di dalam kepala atau pikiran seseorang. Sebagai contoh misalnya sering terdengar ucapan sebagai berikut : "Ternyata anda ini lain, berbeda dengan yang lainnya yang pernah saya jumpai . . ." Ucapan seperti ini seringkali terdengar dalam percakapan orang yang berasal dari kebudayaan berbeda yang ternyata didasarkan atas suatu stereotip.

Stereotip dapat menimbulkan masalah dalam berkomunikasi apabila orang bersikap menutup diri terhadap berbagai kualitas atau variasi individu yang ada. Berdasarkan perkiraan stereotip seseorang dapat memberikan kesan yang tidak tepat.

Prasangka

Prasangka atau "prejudice" berasal dari kata Latin "prejudicium" yang berarti pra-pendapat atau pra-duga.² Prasangka berbeda dari stereotip, walaupun prasangka dapat berasal dari stereotip. Stereotip merupakan suatu *pendapat* yang dianut (*belief*), sedangkan prasangka merupakan suatu *sikap* (*attitude*).³ Suatu pendapat yang dianut merupakan keyakinan bahwa sesuatu

¹Sharon Ruhly, *Orientations to Intercultural Communication*, MODCOM Series, Science Research Associates, Inc., Palo Alto, Reorder No. 13-5518, 1977, hal. 22.

²G.E. Simpson & J. Milton Yinger, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, 4th edition (New York, Evanston, San Francisco, London : Harper & Row Publishers, 1972), hal. 24.

³Sharon Ruhly, *Orientations to Intercultural Communication*, MODCOM Series, Science Research Associates, Inc., Palo Alto, Reorder No. 13-5518, 1977), hal. 22.

itu mungkin benar atau memang ada, apakah itu menyangkut obyek atau hubungan. Tetapi sikap merupakan suatu evaluasi, kecenderungan untuk menanggapi suatu obyek atau hubungan. Stereotip dan prasangka berkaitan satu sama lain. Sama halnya dengan stereotip, prasangka mempunyai sifat pertimbangan yang sudah ada sehingga suatu pendapat sudah terbentuk sebelumnya. Dengan demikian dalam berkomunikasi dengan orang lain seringkali sikap terhadap orang lain sudah terbentuk atau ditentukan sebelumnya.

Pada umumnya prasangka selalu berkenaan dengan penilaian atau sikap dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dianggap masuk dalam kategori tertentu, yaitu suatu penilaian yang menganggap rendah atau sikap yang tidak bersahabat atas dasar perbedaan suku, ras, agama, tingkat sosial, ideologi atau jenis kelamin.¹

Prasangka dapat berupa sikap yang positif ataupun negatif terhadap suatu kelompok atau individu anggota kelompok. Walaupun kata prasangka seringkali mempunyai konotasi yang negatif, tetapi stereotip positif dapat mengarahkan prasangka pada hal yang positif. Sebagai contoh misalnya, orang Cina dikenal sebagai bangsa yang ulet, rajin dan jujur. Biarpun prasangka positif dapat mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi lebih banyak perhatian ditujukan pada pengaruh prasangka negatif.

Rich mengemukakan dua persepsi yang mempengaruhi prasangka, yaitu (a) persepsi selektif, dan (b) persepsi yang peka.² Dalam hal persepsi selektif, prasangka melibatkan sejumlah dugaan. Sebagai contoh misalnya, dalam suatu komunikasi antar kebudayaan orang yang berprasangka mungkin sudah dapat menduga sebelumnya apa yang akan dikatakan atau diperbuat oleh orang lain. Dengan demikian terdapat kecenderungan untuk memperhatikan apakah sesuai dengan dugaannya semula sehingga mengabaikan hal-hal lainnya. Persepsi yang peka berkaitan dengan persepsi yang selektif. Persepsi yang peka biasanya berkembang dalam suatu situasi permusuhan di mana kerawanan dapat terjadi karena penggunaan istilah yang dievaluasi sebagai negatif dapat mempunyai konotasi yang lebih negatif pada saat-saat tertentu. Apa yang mula-mula hanya bersifat mengesalkan lama-kelamaan menyakitkan hati. Di samping itu kepekaan atau kerawanan dapat terjadi sebagai akibat persuasi pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh kelompok masyarakat. Sebagai contoh misalnya, terjadinya demonstrasi anti-Cina sebagai akibat hasutan oknum-oknum tertentu sehingga terjadi pengrusakan dan pembakaran harta benda.

¹Earnst M. Wallner, "Prejudice and Society," dalam *Education*, Vol. II, Institute for Scientific Cooperation, Tübingen, 1975.

²Sharon Ruhly, *Orientations to Intercultural Communication*, MODCOM Series, Science Research Associates, Inc., Palo Alto, Reorder No. 13-5518, 1977, hal. 24.

Diskriminasi

Terdapat hubungan yang sangat erat antara prasangka dan diskriminasi. Prasangka berkenaan dengan *sikap*, sedangkan diskriminasi dengan *tindakan*. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar pembedaan yang kurang adil, bahkan kadang-kadang memperlakukan suatu kelompok sebagai warga kelas dua. Pada umumnya kebutuhan atau tuntutan pribadi dan perasaan tidak aman dinyatakan dalam prasangka yang merupakan sebab utama diskriminasi. Prasangka dapat menyebabkan diskriminasi, sebaliknya diskriminasi dapat menyebabkan prasangka. Prasangka dapat merupakan akibat diskriminasi karena merupakan suatu upaya rasionalisasi dan menghilangkan rasa bersalah yang timbul jika memperlakukan seseorang tidak adil. Prasangka tidak selalu mengakibatkan diskriminasi ataupun sebaliknya. Karena ada prasangka tanpa diskriminasi, dan ada diskriminasi tanpa prasangka. Walaupun demikian pada dasarnya prasangka dan diskriminasi saling menunjang, baik merupakan faktor sebab maupun akibat. Hal tersebut tampak dalam kaitan hubungan mayoritas dan minoritas yang banyak ditentukan oleh masalah prasangka sebagai berikut:¹

1. Kekuasaan faktual yang terlihat dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas;
2. Fakta akan perlakuan terhadap kelompok mayoritas dan minoritas;
3. Fakta mengenai kesempatan untuk usaha pada mayoritas dan minoritas
4. Fakta mengenai unsur geografik, di mana keluarga minoritas menduduki daerah-daerah tertentu;
5. Posisi dan peranan dari sosial ekonomi yang pada umumnya dikuasai oleh kelompok minoritas;
6. Potensi energi eksistensi dari kelompok minoritas dalam mempertahankan kehidupannya.

Prasangka dapat merupakan hasil atau akibat konflik kelompok yang aktual. Di balik konflik kelompok ini dapat terlihat motivasi tertentu yang mengakibatkan proses pembentukan sistem sosial antara kelompok minoritas dan mayoritas.

KETEGANGAN DAN KONFLIK

Dalam sistem sosial kelompok mayoritas-minoritas, prasangka dan diskriminasi biasanya disertai ketegangan dan sering kali juga konflik. Kete-

¹Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 114-115.

gangan tidak selalu mengakibatkan konflik tergantung bagaimana pengendalian sosial, apakah kuat atau lemah. Jika pengendalian sosial lemah maka terjadi konflik, tetapi jika pengendalian sosial kuat tidak terjadi konflik. Menurut Simpson dan Yinger, konflik kelompok merupakan perkembangan dan perluasan dari prasangka dan diskriminasi. Konflik ini umumnya terjadi dalam masyarakat kelas terbuka karena adanya kesempatan bagi kelompok minoritas untuk meningkatkan kedudukannya, sedangkan di lain pihak kelompok dominan merasa terancam akan kedudukan kelompok minoritas yang makin kuat, meningkat dan berkembang. Di samping itu terdapat perasaan ambivalen pada kelompok dominan karena sepatutnya kalau kelompok minoritas berkeribiang.¹

Pada umumnya ketegangan terjadi pada tahap permulaan suatu kontak pribadi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya apa yang diharapkan orang lain sehingga sering kali timbul salah tingkah. Ini biasanya terjadi jika orang-orang tersebut mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda. Menurut Ruhly, ketegangan mendasari ketiga respons umum yaitu etnosentrisme, stereotip dan prasangka karena ketegangan dapat memperbesar kecenderungan seseorang untuk bersikap etnosentrik dan stereotip.²

Salah satu manifestasi konflik sosial adalah *kekerasan* (violence). Grimshaw mengemukakan bahwa kekerasan sosial berkaitan dengan penyerangan terhadap individu atau harta bendanya semata-mata, atau terutama karena mereka merupakan anggota suatu kelompok sosial. Hubungan antara prasangka, diskriminasi, ketegangan dan kekerasan digambarkan oleh Grimshaw seperti tampak pada hal. 660.

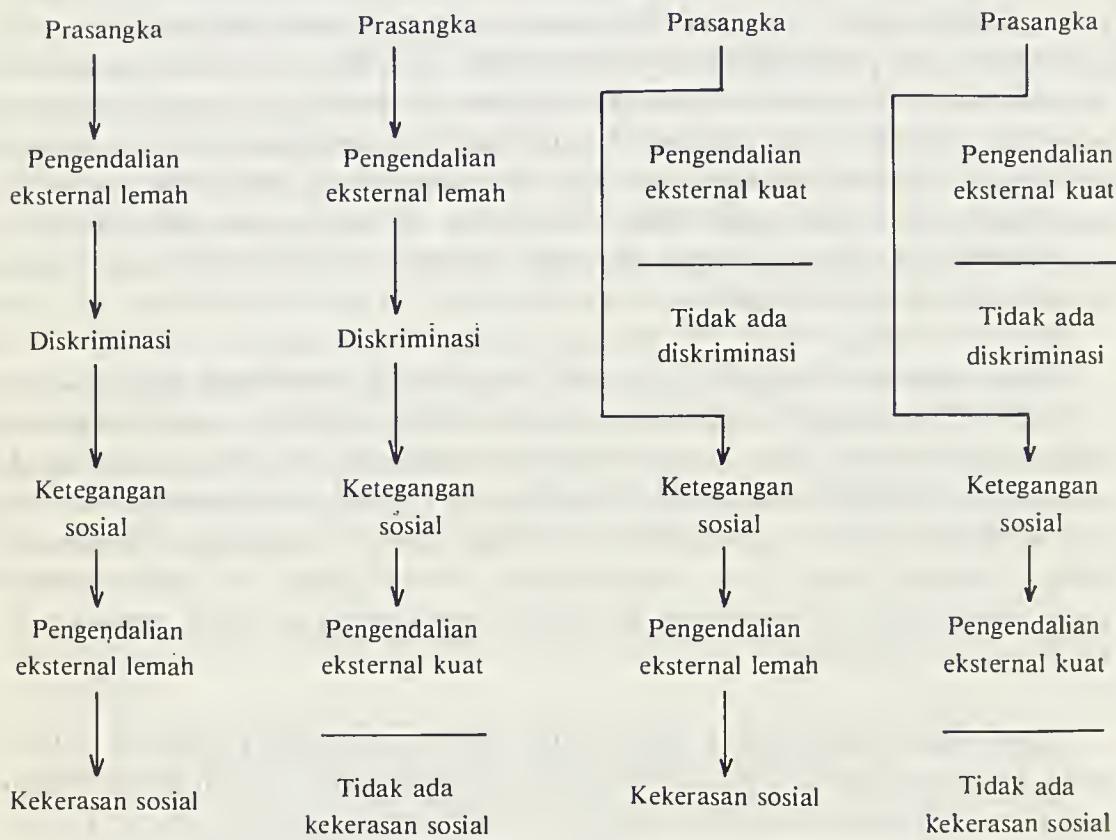
Selain gambaran tersebut di atas masih terdapat kemungkinan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa prasangka tidak selamanya menjadi awal suatu proses interaksi. Suatu proses interaksi dapat berawal dari diskriminasi kemudian mengarah pada prasangka maupun ketegangan sosial. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kekerasan atau tidak adanya kekerasan sosial yang digambarkan sebagai akhir suatu proses, dapat menjadi awal lingkaran proses-proses interaksi baru.

¹G.E. Simpson & J. Milton Yinger, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination* (New York, Evanston, San Francisco, London: Harper & Row, Publishers, 1972), hal. 30.

²Sharon Ruhly, *Orientations to Intercultural Communication*, MODCOM Series, Science Research Associations, Inc., Palo Alto, Reorder No. 13-5518, 1977, hal. 27.

³G.E. Simpson & J. Milton Yinger, *op. cit.*, hal. 30-31.

HUBUNGAN ANTARA PRASANGKA, DISKRIMINASI, KETEGANGAN DAN KEKERASAN



Sumber: Allen Grinshaw, "Relationships Among Prejudice, Social Discrimination, Social Tension, Social Violence," *Journal of Intergroup Relations*, Autumn, 1961, hal. 303.

SUMBER PRASANGKA DAN DISKRIMINASI

Prasangka

Terdapat beberapa pendapat mengenai sumber prasangka. Hubert Bonner mengemukakan tiga sumber terbentuknya prasangka:¹

1. Pengetahuan yang berlatar belakang sejarah (historical knowledge). Sebagai contoh dikemukakan perasaan antipati orang kulit putih di Amerika Serikat terhadap orang Negro, yang bersumber dari sejarah tiga abad yang lalu, di mana orang-orang Negro dipandang sebagai budak belian;

¹Lihat Mar'at, *op. cit.*, hal. 117-119.

2. Data etnologi, di mana prasangka bersumber pada perasaan etnosentrisme dan isolasi kebudayaan. Perasaan "in group" dan tertutupnya kontak dengan dunia luar menyebabkan kekompakan sosial yang disertai sikap setia terhadap kelompoknya. Orang luar dianggap sebagai "out group" yang dapat membahayakan solidaritas sentrisme kelompoknya. Sehingga timbul sikap curiga terhadap setiap orang yang bukan anggota kelompoknya;
3. Proses belajar (social learning), di mana prasangka diajar kepada anak sejak masih kecil. Hal ini umumnya dikenal sebagai proses sosialisasi;

Aronson menyebut empat dasar penyebab prasangka: (1) persaingan ekonomi dan politik atau konflik; (2) rasionalisasi agresi; (3) kepribadian yang berprasangka; dan (4) penyesuaian diri terhadap norma-norma yang berlaku.¹

Mengingat sifat keterbatasan dari sumber-sumber, kelompok dominan akan berusaha untuk menekan kelompok minoritas untuk mendapatkan suatu keuntungan material. Dalam hal ini sikap yang berprasangka cenderung makin meningkat jika suasannya tegang, dan terjadi konflik mengenai tujuan khusus yang menyangkut kepentingan kedua pihak, apakah itu merupakan tujuan ekonomi, politik ataupun ideologi. Di samping itu diskriminasi, prasangka dan stereotip negatif makin meningkat juga jika persaingan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang langka makin membesar. Hasil penelitian Dollard di suatu kota industri kecil menunjukkan bahwa prasangka dapat timbul jika lowongan-lowongan kerja mulai langka. Pada dasarnya persaingan dan konflik mengakibatkan prasangka.²

Rasionalisasi agresi mungkin lebih dikenal dengan teori "kambing-hitam" (scapegoat theory). Agresi disebabkan karena rasa frustrasi dan keadaan lainnya yang kurang menyenangkan seperti sakit hati atau rasa bosan. Seorang individu yang frustrasi mempunyai kecenderungan untuk menghantam penyebab rasa frustrasinya. Tetapi sering kali penyebab frustrasi tersebut tidak jelas atau terlalu sulit untuk dihadapinya. Misalnya kalau angka pengangguran tinggi, seorang penganggur yang frustrasi tidak mungkin minta pertanggungan jawab sistem perekonomian atas penganggurnya. Dalam hal ini sistem terlalu besar dan abstrak. Akan lebih mudah baginya untuk mencari "kambing hitam." Maksud dari rasionalisasi agresi atau "kambing hitam" adalah kecenderungan seorang individu untuk memindahkan agresinya pada suatu kelompok yang ada, relatif tidak mempunyai kekuasaan dan kurang disenangi.³

¹Elliot Aronson, *The Social Animal*, 2nd ed., (San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1972), hal. 185.

²Ibid., hal. 186-189.

³Ibid., hal. 189-191.

Theodor Adorno dkk. menyebut individu yang berkepribadian prasangka sebagai "authoritarian personality." Pada dasarnya kepribadian yang otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kaku, keras hati, memiliki nilai yang konvensional, tidak memperkenankan kelemahan baik pada dirinya maupun orang lain, cenderung untuk menghukum, curiga, dan sangat menghormati figur otoritas serta cepat tunduk pada kemauannya. Orang yang berkepribadian otoriter sangat menghargai tingkah laku yang konvensional dan merasa terancam jika orang lain tidak mengikuti ukuran mereka.¹

Pettigrew mengemukakan gejala penyesuaian diri, yaitu orang-orang menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Prasangka seseorang akan bertambah jika pindah ke suatu daerah atau lingkungan di mana norma yang berlaku adalah lebih berprasangka, sebaliknya akan berkurang jika dipengaruhi oleh norma yang kurang berprasangka. Hasil penelitian Pettigrew menunjukkan bahwa setelah orang-orang Selatan Amerika Serikat memasuki angkatan bersenjata dan berhubungan dengan perangkat norma-norma sosial yang kurang diskriminatif, mereka menjadi kurang berprasangka terhadap orang-orang kulit hitam. Di samping itu, suatu masyarakat dapat menciptakan prasangka melalui hukum atau kebiasaan. Misalnya, dalam surat kabar jika seorang keturunan Cina melakukan suatu tindak pidana, korupsi atau manipulasi maka identitasnya sebagai seorang keturunan Cina diberitakan. Lain halnya dengan kelompok etnik lainnya, identitas kesukuannya jarang diberitakan. Contoh lainnya adalah jarang tampil wajah seorang keturunan Cina dalam reklame.²

Selain Bonner dan Aronson, McLemore menerangkan sumber terjadinya prasangka dengan teori transmisi kebudayaan, teori kepribadian, teori keuntungan kelompok dan teori identifikasi kelompok.³

Menurut teori transmisi kebudayaan, tradisi atau kebudayaan yang mengandung unsur prasangka ditransmisikan ke anak-anak melalui proses sosialisasi di rumah dan masyarakat. Terdapat dua aspek kebudayaan yang berkaitan erat dengan prasangka. Pertama, kepercayaan atau pendapat yang di-anut bersama anggota kelompok mengenai anggota kelompok lainnya dalam masyarakat tersebut ditransmisikan dari generasi satu ke generasi lainnya. Hal ini dikenal sebagai *stereotip*, yaitu pendapat yang salah mengenai ciri-ciri anggota kelompok etnik atau ras. Pada umumnya stereotip menimbulkan atau bahkan melestarikan prasangka. Unsur-unsur stereotip terpengaruh oleh

¹ *Ibid.*, hal. 191-193.

² *Ibid.*, hal. 193-196.

³ S. Dale McLemore, *Racial and Ethnic Relations in America* (Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc., 1980), hal. 104.

kejadian-kejadian kontemporer dan jenis metoda penelitian yang diterapkan. Misalnya stereotip dapat berubah, sebelum dan sesudah pecahnya suatu perang. Hasil penelitian yang menggunakan metoda daftar pilihan berbeda dari metoda yang menggunakan pertanyaan terbuka. Dengan menggunakan metoda pertanyaan terbuka akan memperoleh masukan sifat-sifat yang lebih sedikit dan ketidaksamaan sifat-sifat yang lebih besar. Biarpun anak-anak belajar stereotip etnik dan rasial terutama di rumah dan daerah lingkungan tempat tinggalnya, komunikasi media massa juga cenderung untuk mencerminkan dan menyebarkan suatu stereotip. Misalnya peran tokoh-tokoh dalam suatu cerita (film, televisi, majalah, buku pelajaran sekolah) sering kali dikaitkan dengan stereotip. Aspek *kedua*, berkaitan dengan *jarak sosial* (social distance), yaitu orang belajar untuk ingin mendekat dengan kelompok-kelompok tertentu dan mengambil jarak dengan kelompok lainnya. Konsep jarak sosial dibahas pada tahun 1908 oleh Simmel (1950) dan kemudian dilanjutkan oleh Park (1924). Tetapi teknik penelitian untuk mengukur jarak sosial terutama diperkenalkan oleh Bogardus (1933) dengan menanyakan sejauh mana kesediaan seseorang mengadakan berbagai macam kontak sosial dengan anggota kelompok etnik atau ras lainnya. Kesediaan seseorang biasanya digambarkan antara titik-titik satu sampai dengan tujuh, di mana terdapat ekstrem sangat menyetujui (misalnya melalui perkawinan) dan ekstrem tidak mau mengadakan hubungan sama sekali (misalnya, lebih baik kelompok etnik atau ras tersebut meninggalkan negara ini).¹

Di samping proses belajar kebudayaan (di rumah, sekolah dan lingkungan pergaulan), sumber atau penyebab prasangka berasal dari proses perkembangan psikologis misalnya frustrasi, gelisah, takut, bimbang atau rasa bersalah. Seperti yang dikemukakan teori kepribadian, prasangka mewujudkan beberapa fungsi penting bagi kepribadian orang yang berprasangka, misalnya dapat membantu orang tersebut mengatasi konflik dan ketegangan pribadi-nya. Berdasarkan pengamatan orang yang frustrasi sering kali melampiaskan kemarahanannya dalam bentuk tindakan yang agresif walaupun kadang-kadang hanya berupa kata-kata saja, misalnya berteriak, menyumpah atau memaki. Pada umumnya frustrasi merupakan penyebab utama dari agresi manusia. Dalam hubungan ini dikenal hipotesa frustrasi-agresi dari Dollard et al. yang mengemukakan tiga prinsip dasar, yaitu: (1) frustrasi selalu menyebabkan agresi, dan agresi selalu diakibatkan oleh frustrasi; (2) agresi tersebut tidak dapat ditujukan secara langsung kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan; (3) oleh karena itu agresi tersebut dialihkan kepada individu lemah yang tidak dapat menimbulkan ancaman, misalnya anggota kelompok minoritas yang kurang disenangi. Dalam hal ini terdapat beberapa kelemahan, misalnya frustrasi tidak selalu menyebabkan agresi dan seandainya terjadi agresi, tidak

¹Ibid., hal. 105-109.

perlu ditujukan kepada suatu kelompok. Frustrasi dan agresi tidak selalu berhubungan satu sama lainnya. Oleh karena itu Miller, salah seorang penulis hipotesa tersebut memperbaikinya dengan mengemukakan bahwa agresi dapat disebabkan karena hal lainnya di samping frustrasi. Hipotesa ini kemudian diuji beberapa kali. Misalnya, Buss berpendapat bahwa serangan (attack) lebih merupakan penyebab utama agresi daripada frustrasi. Allport menge-mukakan teori "kambing-hitam" (scapegoating) yang berfungsi sementara untuk menghilangkan rasa frustrasi seseorang. Karena mengkambing-hitamkan orang lain maka timbul rasa bersalah yang diikuti oleh rasa takut akan balas dendam orang tersebut. Rasa bersalah campur takut sekarang menjadi sumber baru bagi frustrasi yang dapat menimbulkan agresi. Dalam hal ini tercipta suatu lingkaran setan.¹

Teori keuntungan kelompok terutama dipengaruhi oleh pendapat Karl Marx yang mengemukakan bahwa ekonomi merupakan sumber konflik. Terlepas dari apakah pendapat tersebut dapat diterima atau tidak, tetapi adalah kenyataan bahwa persaingan ekonomi dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi. Anggota kelompok dominan menggunakan prasangka untuk menekan anggota kelompok minoritas supaya selalu berada di bawah demi keuntungan kelompok dominan. Tetapi yang sebenarnya mengambil keuntungan dari situasi ini adalah anggota kelas atas (ruling class) atau kaum kapitalis. Status ekonomi sosial seseorang apakah diukur dari pendidikan, pendapatan atau pekerjaannya berkaitan dengan tingkatan prasangka. Makin tinggi kedudukan seseorang dalam tingkat kelas sosial, makin berkurang ia menerima stereotip etnik atau menjauahkan diri dari kelompok etnik lainnya. Dalam kelompok dominan kelas bawah ternyata mempunyai dorongan kebutuhan yang kuat atau usaha untuk tetap berada di atas kelompok etnik atau ras lainnya, dan kebutuhan atau tuntutan kelas bawah ini menjadikan orang-orang tersebut sangat berprasangka.²

Menurut teori identitas kelompok, rasa kebanggaan terhadap kelompok sendiri dapat menimbulkan prasangka terhadap kelompok lain sebagai akibat rasa kebersamaan identitas kelompok, rasa keanggotaan dan kesetiaan yang dikembangkan di antara anggota suatu kelompok. Dalam hal ini sering terjadi perbedaan antara "kelompok dalam" dan "kelompok luar" atau "orang dalam" dan "orang luar." Kelompok dalam dianggap lebih superior dan kecenderungan ini disebut etnosentrisme.³

Prasangka merupakan penyebab diskriminasi. Diskriminasi dapat dihilangkan atau dikurangi kalau faktor-faktor penyebab prasangka dihilangkan

¹Ibid., hal. 109-114.

²Ibid., hal. 114-120.

³Ibid., hal. 120-124.

atau dikurangi terlebih dahulu. Tetapi diskriminasi tidak selalu disebabkan prasangka, terdapat faktor-faktor penyebab lainnya yang secara langsung menyebabkan diskriminasi dan tidak perlu menimbulkan prasangka terlebih dahulu. Faktor-faktor yang secara langsung dapat menyebabkan diskriminasi dikemukakan sebagai berikut ini.

Diskriminasi

Faktor-faktor yang langsung menyebabkan diskriminasi dapat diterangkan dengan teori transmisi kebudayaan, teori keuntungan kelompok, teori tekanan sosial/keadaan dan teori struktur pelembagaan.¹ Faktor transmisi kebudayaan dan keuntungan kelompok menyebabkan prasangka, tetapi juga dapat langsung menyebabkan diskriminasi.

Sama halnya dengan prasangka, diskriminasi dipelajari melalui proses transmisi kebudayaan terutama dengan cara imitasi. Diskriminasi yang dipelajari melalui proses alamiah ini kemudian dapat menyebabkan prasangka sehingga terjadi suatu proses timbal-balik antara prasangka dan diskriminasi.²

Menurut teori keuntungan kelompok, walaupun prasangka telah berkurang, diskriminasi tetap ada karena kelompok dominan memperoleh atau menikmati suatu keuntungan dari diskriminasi tersebut. Diskriminasi tersebut akan berlangsung terus selama masih dapat diperoleh keuntungan, baik material maupun kepuasan pribadi.³

Teori tekanan sosial atau keadaan mengemukakan ada kalanya orang mengatakan ia tidak berprasangka sama sekali, tetapi dalam praktek ia melakukan diskriminasi karena keadaan tertentu. Seorang hipokrit yang kata dan perbuatannya berbeda, merasa lebih baik jangan bergaul dengan anggota kelompok minoritas secara terbuka karena alasan-alasan sosial tertentu. Sebaliknya ada orang yang mengaku lebih berprasangka dalam situasi tertentu tetapi dalam kenyataan perbuatannya tidaklah demikian. Dalam hal ini seseorang melakukan atau tidak melakukan diskriminasi lebih tergantung pada sifat dan tuntutan situasi sosial daripada tingkatan prasangka. Situasi sosial yang mempengaruhi seseorang dapat berupa norma sosial atau keanggotaannya dari suatu kelompok tertentu.⁴ Dalam kenyataan sering terlihat bahwa akibat tekanan sosial, seseorang sering kali bertindak tidak sesuai dengan keinginannya sendiri untuk menghindari celaan sosial atau jangan sampai terkucilkan oleh kelompoknya.

¹Ibid., hal. 126-134.

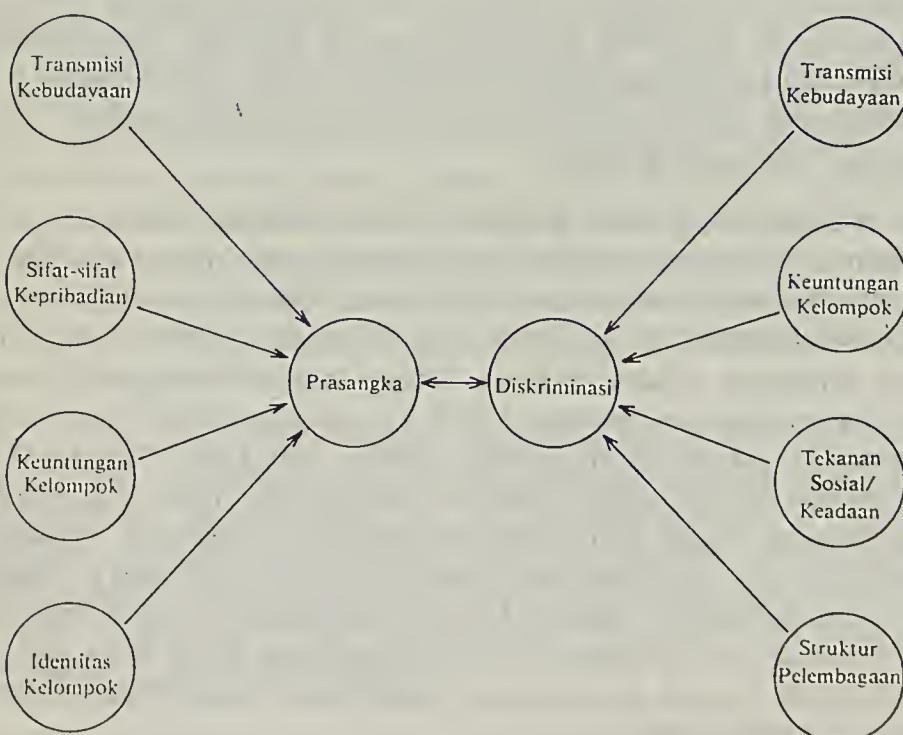
²Ibid., hal. 126-128.

³Ibid., hal. 130-131.

⁴Ibid., hal. 131-132.

Diskriminasi di satu pelembagaan mempunyai dampak pada pelembagaan lain yang berhubungan dengannya. Misalnya, kesulitan seorang ayah untuk mencari pekerjaan mengakibatkan anaknya tidak dapat melanjutkan sekolah atau terpaksa harus memasuki lapangan kerja. Hal yang sama dapat terulang kembali pada anaknya. Di sini tampak diskriminasi yang tak disengaja menciptakan lingkaran setan baik dalam maupun antar generasi.¹ Bentuk diskriminasi pelembagaan lain yang berkaitan dengan lapangan kerja adalah jika anggota kelompok minoritas kurang mendapat kesempatan untuk memasuki pendidikan tinggi maka berarti pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi juga terbatas bagi mereka. Akibatnya mereka umumnya memasuki sektor ekonomi. Latar belakang historis tidak dapat diabaikan di mana kelompok keturunan Cina sejak pemerintahan kolonial Belanda berperan sebagai perantara atau pedagang menengah dan keliling.

Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan timbal-balik antara prasangka dan diskriminasi, sebab utama yang langsung maupun tak langsung terjadinya prasangka dan diskriminasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: S. Dale McLemore, *Racial and Ethnic Relations in America* (Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc., 1980), hal. 127.

¹Ibid., hal. 132-134.

Diskriminasi berkurang jika tidak terdapat prasangka, dan prasangka berkurang jika tidak terdapat diskriminasi. Akan tetapi berkurangnya prasangka tidak selalu mengakibatkan berkurangnya diskriminasi dan begitupun sebaliknya. Terdapat perbedaan pendekatan dalam usaha mengurangi prasangka maupun diskriminasi. Anggota kelompok dominan cenderung mengurangi prasangka dengan metoda yang berasal dari teori transmisi kebudayaan dan teori kepribadian. Sebaliknya, anggota kelompok minoritas cenderung untuk mengurangi diskriminasi dengan menggunakan metoda yang berasal dari teori keuntungan kelompok dan teori diskriminasi pelembagaan.¹ Karena prasangka dan diskriminasi saling kait-mengait, sebaiknya mereka diatasi secara bersamaan.

BEBERAPA PENDEKATAN PERMASALAHAN

Prasangka dan diskriminasi hanya dapat dimengerti sebagai manifestasi situasi yang lebih luas, dan bukan sebagai gejala yang berdiri sendiri. Dalam hal ini perlu dimengerti mengenai tingkah-laku individu maupun kelompok dengan menggunakan suatu pendekatan psikologis-sosiologis, fungsional dan konflik.

Pendekatan Psikologis-Sosiologis

Pendekatan psikologis-sosiologis terutama mempelajari faktor-faktor penyebab prasangka dan diskriminasi serta efeknya terhadap individu yang bersangkutan. Dalam hal ini digunakan teori-teori interaksi sosial, di mana individu mengembangkan konsep identitas pribadinya berdasarkan proses interaksi dengan orang-orang sekitarnya. Prasangka dan diskriminasi dapat dikurangi melalui dua jalan. *Pertama*, karena prasangka dan diskriminasi dipelajari, mereka dapat juga dilupakan. Jalan yang ditempuh adalah dengan sering mengadakan kontak dan komunikasi serta langsung mencegah terjadinya suatu stereotip etnik di media massa dan sekolah. Jika diberikan penjelasan mengenai suku bangsa atau kelompok etnik beserta kebudayaannya dan bukan sebagai stereotip, maka dengan jalan ini dapat mengurangi hambatan dalam berkomunikasi. *Kedua*, menyangkut dasar atau akar permasalahannya dengan menganjurkan suatu perubahan jangka panjang yang mengurangi persaingan antar suku bangsa atau etnik. Komunikasi dan hubungan yang lebih sering dan intim antar kelompok etnik memungkinkan orang untuk mengatasi prasangkanya. Hubungan harus dibina dengan menghindarkan per-

¹Ibid., hal. 134-135.

saingan antara sesamanya. Pada dasarnya prasangka dan diskriminasi akan berkurang jika rasa takut persaingan ekonomi berkurang.¹

Pendekatan Fungsional

Sikap dan nilai yang dimiliki bersama suatu masyarakat mengikat masyarakat tersebut sehingga merasa bersatu. Jika tercapai kesepakatan mengenai nilai-nilai dasar, maka masyarakat tersebut juga akan makin mantap, selaras dan seimbang. Dalam hal ini Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama merupakan alat pemersatu, yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis. Dari sudut fungsional, diskriminasi etnik merupakan sebab maupun akibat dari disorganisasi sosial masa kini. Kegagalan dalam memberikan persamaan hak sepenuhnya bagi kelompok minoritas sebenarnya mengakibatkan terbuangnya sumber daya manusia (human resources) yang berharga, dan justru menimbulkan permusuhan etnik yang dapat mengganggu produksi ekonomi dan melemahkan kekuasaan politik. Permusuhan yang demikian hanya menimbulkan prasangka dan diskriminasi, karena kelompok etnik saling bermusuhan dan merasa tidak diperlakukan sama sebagai warga negara. Dalam hal ini pemecahan yang terbaik adalah menata kembali pelembagaan sosial untuk mengurangi diskriminasi etnik. Persatuan bangsa ini merupakan tujuan utama yang harus dicapai walaupun berasal dari suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Diskriminasi tidak boleh diterapkan dalam sektor perumahan, pendidikan, peradilan, atau mana saja, dengan dalil bahwa suatu gerakan pembaharuan yang tepat harus dapat meningkatkan bantuan bagi sistem antara kelompok minoritas dan mayoritas.²

Pendekatan Konflik

Pendekatan konflik melihat sejarah hubungan kelompok etnik sebagai konflik di satu pihak dan penindasan di lain pihak. Mereka yang tidak mau berasimilasi atau menolak untuk melepaskan identitas etniknya akhirnya akan terpojok pada suatu kedudukan inferior dalam masyarakat. Dari segi konflik, hubungan kelompok etnik merupakan sejarah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Seandainya satu kelompok lebih berkuasa daripada yang lain, maka akan berkembang suatu sistem dominasi di mana kelompok yang lebih lemah dieksplorasi bagi kepentingan politik, sosial dan keuntungan ekonomi

¹James William Coleman & Donald R. Cressey, *Social Problems* (New York: Harper & Row, Publishers, 1980), hal. 207-208.

²Ibid., hal. 205-206.

kelompok dominan. Namun kalau pemerataan kekuasaan terjadi, maka timbul pluralisme. Akan tetapi jika kelompok etnik berada pada tingkat dominasi dan memiliki persamaan hak, maka tidak ada jaminan apakah sistem sosial akan tetap seimbang.

Perubahan sosial terutama merupakan suatu proses di mana ada kelompok yang berkembang menjadi lebih kuat berkat jasa kelompok lain. Mereka yang memiliki kekuasaan menginginkan ketentraman dan keseimbangan hidup, sedangkan mereka yang tidak memiliki kekuasaan menginginkan konflik dan perubahan sosial. Dalam hal ini diskriminasi yang dilembagakan merupakan salah satu teknik untuk melestarikan kekuasaan kelompok dominan dan melindunginya dari persaingan.

Menurut teori konflik, persamaan hak hanya dapat diperoleh melalui perjuangan. Suatu kelompok yang mengalami perbaikan status pada dasarnya merupakan kelompok yang telah mendapatkan kekuasaan politik dan ekonomi. Para pengikut teori konflik berpendapat bahwa perubahan politik diperlukan supaya terjadi perubahan ekonomi, misalnya dalam hal pekerjaan, pendidikan, perumahan dan kesehatan. Kunci untuk menambahkan kekuasaan terletak pada penyelenggaraan suatu tindakan politis. Dalam masyarakat demokratis perubahan politik terjadi jika lawan politik atau oposisi lebih unggul dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan permainan yang berlaku. Perubahan politik juga dapat terjadi dengan cara menentang peraturan yang berlaku dalam bentuk demonstrasi dan protes yang dapat menimbulkan atau memancing kekerasan (violence).¹

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi sumber atau penyebab prasangka dan diskriminasi. Di dalam kebudayaan suatu masyarakat terkandung banyak paham dan pendapat mengenai berbagai kelompok etnik dan ras yang ditransmisikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Anak-anak belajar tradisi-tradisi kebudayaan dalam proses belajar yang merupakan bagian dari proses pertumbuhan yang alamiah dan wajar. Proses belajar ini tak dapat dipisahkan dari perkembangan dalam diri individu, terutama dengan berakarnya suatu rasa keanggotaan kelompok atau identitas. Tradisi kelompok menjadi tradisi individu. Sebagai anggota kelompok dominan seorang individu bukan saja memperoleh keuntungan material langsung maupun tak langsung, tetapi juga

¹Ibid., hal. 206-207.

keuntungan lainnya seperti prestise. Maka timbul kecenderungan untuk mempertahankan sistem sosial yang memberikan keuntungan bagi kelas sosial tertentu.

Untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional, prasangka dan diskriminasi harus diatasi secara bersamaan karena prasangka dan diskriminasi saling kait-mengait. Di antara faktor-faktor penyebab ada yang harus diatasi secara serentak. Prasangka mengakibatkan diskriminasi, sebaliknya diskriminasi dapat mengakibatkan prasangka. Jika penyebab prasangka diketahui, prasangka dan diskriminasi dapat diatasi atau dikurangi. Akan tetapi diskriminasi tidak selalu berasal dari prasangka, dan dalam hal ini sumber-sumber yang langsung mempengaruhi diskriminasi harus diketahui. Berbagai teori mengenai prasangka dan diskriminasi merupakan sumber masukan yang penting untuk mengatasi permasalahan sosial antar kelompok etnik, khususnya kelompok keturunan Cina.

Salah satu pendekatan untuk mengatasi prasangka dan diskriminasi adalah bentuk pendidikan, karena orang yang berpendidikan tinggi pada umumnya lebih toleran daripada orang yang berpendidikan rendah. Dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, melainkan juga bentuk penerangan untuk menghilangkan stereotip yang kadang-kadang terdapat dalam buku-buku pelajaran dan cerita anak, anjuran pembauran pergaulan baik di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal, pertunjukan acara antar kebudayaan dalam film, sandiwara, televisi, tulisan riwayat hidup yang menggambarkan anggota kelompok minoritas. Pengenalan dan penghargaan terhadap kebudayaan lain diharapkan dapat mengurangi jurang perbedaan antar kebudayaan. Anjuran yang paling efektif adalah pengadaan kontak atau hubungan interaksi antar kelompok kebudayaan, sehingga terjadi komunikasi, saling mengenal satu sama lain, bersama-sama turut serta dalam berbagai kegiatan dan membahas permasalahannya masing-masing.

Salah satu pendekatan untuk mengatasi diskriminasi adalah peraturan perundang-undangan karena mengatur tingkah-laku manusia dan peraturan tersebut diharapkan dapat mengubah sikap manusia. Jadi untuk terlaksananya kerukunan hubungan antar kelompok etnik, khususnya kelompok keturunan Cina, diperlukan perubahan pelembagaan dan struktur sosial yang dapat menjamin kesatuan dan persatuan bangsa.

Memahami Masalah Pembauran Secara Konseptual

Iwan P. HUTAJULU*

PENGANTAR

Masalah pembauran golongan masyarakat bangsa Indonesia keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia asli senantiasa menjadi perhatian dari banyak penulis di media massa.¹ Di antara penulis-penulis itu sering menggunakan tekanan yang berbeda-beda mengenai pengertian pembauran. Kesimpangsiuran pengertian pembauran itu sendiri tentu membungkungkan masyarakat yang diharapkan membaur. Sementara itu pembauran antara masyarakat "non-asli" dan "asli" dirasakan belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan itu masih dapat dipertanyakan. Di samping itu "belum berhasilnya" pembauran itu dapat juga disebabkan oleh kesimpangsiuran pengertian pembauran itu sendiri. Oleh karena itu penulis menganggap perlu adanya kejelasan pengertian pembauran itu secara konseptual, bila kita ingin melihat masalah pembauran itu dengan rasional dan obyektif.

PENGERTIAN PEMBAURAN

Di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat dinyatakan, bahwa usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meman-

*Staf CSIS.

¹Istilah Indonesia asli adalah yang resmi digunakan dalam UUD 1945. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan "non-asli" adalah WNI keturunan Tionghoa.

tapkan ketahanan nasional.¹ Penjabaran pengertian "Pembauran" kita dapat di dalam Piagam Asimilasi, yang menyatakan bahwa:

"Dengan asimilasi dimaksudkan proses penyatu-gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yaitu yang dalam hal ini dinamakan bangsa (nation) Indonesia itu."²

Lebih lanjut Piagam Asimilasi itu menyatakan bahwa:

"Dalam hubungan masalah Warga Negara Indonesia "Keturunan Tionghoa" asimilasi berarti masuk dan diterimanya orang seorang yang berasal keturunan Tionghoa ke dalam tubuh bangsa (nation) Indonesia tunggal sedemikian rupa sehingga akhirnya golongan semula yang khas tak ada lagi."³

Menurut Harry H. Bash, ada suatu masalah yang serius dalam pembatasan pengertian asimilasi. Ketidakjelasan perinciannya memberikan pengertian yang mudah berubah (elastis), seperti penekanan untuk menyamakan asimilasi sebagai penyesuaian psikologis, penyesuaian kebudayaan dan sebagai integrasi struktur sosial.⁴

Milton Gordon, seorang ahli sosiologi Amerika telah memperinci konsep ini menjadi tujuh macam asimilasi sebagai berikut:

1. asimilasi kebudayaan/perilaku (atau akultiasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas;
2. asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas;
3. asimilasi perkawinan (atau amalgasi) yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran;
4. asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perasaan nation berdasarkan mayoritas;
5. asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka;
6. asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi;

¹Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, 1984/85-1988/89, Buku Ketiga, Bab 21, hal. 18.

²Piagam Asimilasi, dikutip dari H. Junus Jahja, *Garis Rasial Garis Usang*, (Jakarta, Bakom PKB), hal. 13.

³Ibid.

⁴Harry H. Bash, *Sociology, Race and Ethnicity*, (New York, London, Paris: Gordon and Breach, 1979), hal. 74.

7. asimilasi "civic" yang bertalian dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.¹

Konsep Asimilasi yang dikemukakan Milton Gordon itu tampaknya yang paling terperinci hingga saat ini. Sehingga untuk melihat proses pembauran antara "non-asli" dengan Indonesia asli yang sedang berlangsung di Indonesia, maka konsep ketujuh variabel asimilasi dari Milton Gordon akan lebih baik bila digunakan.

ASIMILASI KEBUDAYAAN

Tampaknya asimilasi kebudayaan akan jauh lebih menentukan sebagai salah satu kemungkinan pemecahan masalah "asli" dan "non-asli". Dalam Piagam Asimilasi dikatakan agar golongan semula yang khas tak ada lagi. Tentunya pernyataan yang terkandung dalam Piagam Asimilasi itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sikap ulet, rajin dan suka bekerja keras dari golongan keturunan Tionghoa. Bahkan sebaiknya ciri-ciri yang khas ini dapat berguna bagi pengembangan kepribadian nasional bangsa Indonesia.

Meskipun demikian Piagam Asimilasi itu menghendaki agar orientasi budaya keturunan Tionghoa itu tidak lagi ke negeri leluhur, akan tetapi ke dalam bangsa dan tanah air Indonesia. Ciri-ciri "ketionghoaan" mereka diwujudkan di dalam ciri-ciri kebudayaan mereka, seperti pemujaan terhadap nenek moyang, nilai dan norma-norma tertentu, dan kadang-kadang di dalam nama mereka. Nama Tionghoa itu membawa serta nama keluarga, yang biasanya sambung-menyambung ke negeri leluhur Cina. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk afiliasi kultural. Sehingga suasana pada tahun 1958 menghendaki bahwa orang Tionghoa WNI sebaiknya mengganti namanya dengan nama Indonesia jika mereka mau meyakinkan orang Indonesia bahwa mereka berikatan janji kepada Indonesia.² Kemudian sejak adanya Keputusan Presidium Kabinet No. KEP. 127/U/Kep/12/1966 tentang Penggantian Nama, semakin banyak orang Tionghoa WNI memberikan nama Jawa atau nama Indonesia lainnya kepada anak-anak mereka yang baru dilahirkan. Namun dalam perubahan nama Tionghoa itu masih tampak adanya kecenderungan mempertahankan nama keluarga itu. Pergantian nama itu menjadi nama Indonesia mendekati nama keluarga seperti Lim menjadi Salim, Goh menjadi Gozali, Tan menjadi Tanzil, San menjadi Santoso, Oei menjadi Wi-

¹Milton Gordon, dikutip dari Mely G. Tan dalam buku Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 34.

²G.William Skinner, Golongan Minoritas Tionghoa, dalam Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hal. 25.

djaja dan lain sebagainya.¹ Dengan demikian memberi kesan adanya keengganan orang Tionghoa WNI untuk meninggalkan ikatan kekerabatannya. Tetapi tak dapat disangkal bahwa dengan adanya ganti nama, maka mereka hanya mengenal kerabat terdekat saja. Sehingga semakin lama tampak kecenderungan, bahwa orang-orang WNI keturunan Tionghoa hanya menggunakan pola keluarga inti. Paling tidak Ganti Nama merupakan langkah awal asimilasi kebudayaan.

Dalam rangka pembinaan asimilasi kebudayaan, telah ditempuh berbagai kebijaksanaan antara lain: penutupan sekolah-sekolah Cina, penghentian penerbitan semua (kecuali satu) koran yang berbahasa Mandarin. Membuang papan-papan nama dalam huruf Kanji, mengganti nama-nama Tionghoa dengan nama Indonesia, meniadakan permainan Liang-Liong dan sebagainya.²

Masalah berikut muncul setelah orang-orang Tionghoa WNI meninggalkan ciri-ciri kebudayaannya yang dapat dianggap berorientasi ke negeri leluhur, maka mereka harus mempercepat proses Indonesianisasi. Menurut satu ukuran yang sederhana, sebenarnya orang Tionghoa WNI di Jawa secara keseluruhan dapat dikatakan lebih jauh menuju Indonesianisasi dibandingkan dengan orang Indonesia asli. Menurut hasil penelitian Dr. Peter Weldon, lebih tinggi persentase orang Tionghoa di rumah menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari daripada suku-suku bangsa Indonesia asli. Sebaliknya lebih banyak orang Indonesia asli yang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari di rumah. Dr. Peter Weldon menemukan bahwa di Jakarta 81%, Bandung 70%, Surabaya 66%, dan di Yogyakarta 67% orang Tionghoa peranakan menggunakan bahasa Indonesia di rumah.³

Akan tetapi di kota-kota di luar Jawa dimana orang-orang Tionghoa merupakan penduduk penting (40% di Medan), atau dominan (65% di Pontianak),⁴ mereka terus menggunakan bahasa (dialek) Cina daripada menggunakan bahasa daerah setempat. Dalam hal menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, orang-orang Tionghoa di Jawa lebih maju dibandingkan dengan orang-orang Tionghoa di luar Jawa. Hal ini disebabkan karena lebih banyak orang Cina Totok di luar Jawa, bila dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Tidak seperti generasi peranakan, generasi Totok

¹Hugh dan Ping-Ching Mabbett, "The Chinese Community in Indonesia," dalam "The Chinese in Indonesia, The Philippines and Malaysia," *Report No. 10* (London: Minority Right Group, 1972), hal. 8.

²Kwik Kian Gie, "Pelaksanaan Konsepsi Pembauran dalam Kenyataan," *Kompas*, 6 Agustus 1982.

³Peter Weldon, dikutip dari Hugh dan Ping-Ching Mabbett, *op. cit.*, hal. 8.

⁴Lihat Koentjaraningrat, *Prisma*, Agustus 1976, hal. 47.

adalah imigran terakhir yang tiba di Indonesia menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan demikian orientasi kultural mereka masih dekat dengan negeri leluhur. Orientasi itu tercermin pula dalam menggunakan bahasa (dialek) Cina dalam percakapan sehari-hari.

Di samping itu, agama di Indonesia juga ikut memainkan peranan dalam proses penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas. Dibandingkan dengan Tionghoa totok, maka kaum Peranakan lebih banyak yang beragama Kristen.¹

Akhir-akhir ini mulai banyak di kalangan keturunan Tionghoa yang tertarik pada agama Islam. Meskipun demikian menurut Budyatna, proses ini walaupun cukup pesat, namun hasilnya dalam 10 tahun mendatang tidak melebihi 50.000 orang.²

Oleh karena keturunan Tionghoa di Jawa telah lebih jauh dalam menyesuaikan diri dengan kebudayaan Indonesia daripada orang Tionghoa di luar Jawa, maka cara pembinaannya tentu harus berbeda. Keturunan Tionghoa di luar Jawa masih perlu mendapat pembinaan secara khusus dalam proses penyesuaian diri dengan kebudayaan Indonesia, misalnya dalam menggunakan bahasa Indonesia.

Asimilasi Struktural

Di samping perbedaan latar belakang kebudayaan, tampaknya anggapan bahwa mereka secara ekonomis dan sosial lebih unggul itu mengakibatkan mereka memilih hidup terpisah dari golongan Indonesia asli. Pandangan seorang tokoh pergerakan, yaitu Mr. Asaat mengenai hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:

“... orang Tionghoa tidak akan mengizinkan orang-orang dari kelompok lain masuk ke dalam kelompok mereka, baik dalam bidang kebudayaan, sosial maupun terutama bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, mereka sangat *eksklusif* sehingga praktis memegang monopoli.”³

Orang senantiasa menilai terjadinya eksklusivisme karena ada jurang yang teramat dalam akibat ketimpangan ekonomi. Tajuk harian *Kompas* menegangkan bahwa yang agak sulit adalah memasuki organisasi non-formal yang terjalin antara pedagang dan pengusaha Indonesia non-asli. Kelompok-

¹G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa," *op. cit.*, hal. 14.

²Lihat Drs. Muh. Budyatna, MA., "Harapan Baru bagi Keturunan Tionghoa," *Merdeka*, 15 Januari 1982.

³Badan Pekerja Kensi Pusat, *Kensi Berjuang* (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1957), hal. 53-55.

kelompok dagang mereka sangat kuat, yang tidak dapat disaingi dengan cara berkoperasi yang asalnya dari Barat. Kelompok-kelompok itu mempunyai peraturan, cara-cara keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, fasilitas-fasilitas serta sulit menerima anggota baru. Di samping itu juga mempunyai bahasa sendiri-sendiri, simbol-simbol tertentu, saling bersaing dan masih lebih dominan dibandingkan dengan kelompok mereka yang formal.¹ Demikian pula menurut pengamatan Takdir, dalam perkembangan ekonomi selama 38 tahun ini, jelaslah bahwa golongan Tionghoa dengan motivasi yang kuat dalam lapangan ekonomi lebih berhasil daripada orang Indonesia asli, yang masih hidup dalam suasana kebudayaan lama yang tidak mementingkan ekonomi, tidak mementingkan teknologi tetapi lebih mementingkan berpikir dan merasa dalam suasana kebudayaan pertanian, kekeluargaan dan kebudayaan feodal masa lampau. Takdir mencatat pula bahwa di kota Jakarta bukan golongan Indonesia asli dalam 38 tahun ini yang masuk Glodok, tetapi Glodok yang meluas sampai ke pasar-pasar yang lain di seluruh Jakarta.² Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, tampaknya orang Indonesia asli sulit melakukan assimilasi struktural dalam bidang ekonomi dengan kelompok perdagangan keturunan Tionghoa. Sehingga masih sering muncul prasangka yang disebabkan oleh eksklusivisme keturunan Tionghoa dalam bidang ekonomi. Meskipun demikian sudah ada kesadaran dari beberapa keturunan Tionghoa untuk menerima orang-orang Indonesia asli dalam bidang perdagangan. Sebagai contoh, Kho Boen Bak ingin mengangkat para pedagang kaki lima menjadi penghuni kios-kios. Untuk itu ia memperluas Pasar Yaik Permai, Semarang dengan membuat kios-kios berukuran 2 x 4 meter. Ia pula yang mengusahakan agar pedagang-pedagang lemah itu mendapat kredit ringan dari BRI untuk mendapat kios. Hasilnya 60 orang pedagang kaki lima langsung mendapat kios.³ Usaha membaurkan pedagang Indonesia asli dan non-asli juga sudah dilakukan di Pasar Senen. Tampaknya di situ terjadi suatu perkembangan di mana baik yang Indonesia asli atau non-asli, kalau berdagang barang yang sama, ternyata grosirnya sama. Jadi si grosir itu mau menyediakan barang untuk orang Indonesia asli maupun non-asli di tempat yang sama dan fasilitasnya juga sama. Masalah pembayaran dapat dilakukan se-sudah sebulan kemudian. Demikian pula telah dicoba mengembangkan di Mayestik.⁴ Tampaknya usaha pembauran dalam bidang usaha perdagangan sudah mulai diperhatikan baik oleh orang Tionghoa WNI sendiri maupun oleh pemerintah. Kesediaan pengusaha terkemuka yang sebagian besar WNI ke-

¹ *Kompas*, 16 Januari 1982.

² *Sinar Harapan*, 27 Februari 1984.

³ P. Bambang Siswoyo, *Huru-hara - Solo Semarang*, (BP Bhakti Pertiwi, Maret 1981), hal. 45.

⁴ Rekaman Pertemuan Bakom PKB Pusat dan Pengusaha Ibukota dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi Drs. Radius Prawiro, 23 Januari 1982, dikutip dari "Garis Rasial Garis Usang," *op. cit.*, hal. 155.

turunan Tionghoa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk berbagai yayasan. Demikian pula pemerintah juga telah melakukan beberapa langkah untuk menyelaraskan perbedaan ekonomi antara orang Indonesia asli dengan non-asli. Misalnya, membantu golongan ekonomi lemah dengan kebijaksanaan Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Inpres Pasar dan Keppres 14A/1980 dan Keppres 18/1981 yang kemudian diganti dengan Keppres 29/1984. Meskipun demikian proses perkembangan peningkatan keseimbangan ekonomi Indonesia asli dengan non-asli membutuhkan waktu.

Sementara itu perbedaan ekonomi menyebabkan perbedaan gaya hidup. Perbedaan gaya hidup itu menyebabkan pula keterpisahan dalam pola pemukimannya. Misalnya dengan adanya pembangunan perumahan "real estate" yang serasi tata lingkungannya, sanitasinya baik dan dilengkapi pula dengan berbagai macam fasilitas, maka rumah-rumah di kawasan itu harganya menjadi relatif mahal. Dengan demikian pembeli yang terbanyak adalah orang-orang yang secara ekonomis kuat, yang kebetulan kebanyakan adalah WNI keturunan Tionghoa. Jadi kesenjangan tingkat sosial ekonomi telah menyebabkan keterpisahan dalam bentuk pengelompokan pemukiman.¹ Sehingga bila terjadi kesamaan tingkat sosial ekonomi, maka akan terjadi pembauran dalam pemukiman. Mengenai hal ini dapat dilihat dari penelitian Amri Marzali di Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat, di RT 002/RW 06 terdapat orang Indonesia asli dan non-asli yang mempunyai kondisi perumahan yang relatif setingkat, yaitu sama-sama tinggal di "gedung."² Orang Indonesia asli yang tinggal di sini pada umumnya cukup baik ekonomi dan pendidikannya. Di sini terdapat dua arah tolong-menolong dan pergaulan anak-anak. Di sini orang Tionghoa tidak terlalu merasa merendahkan diri untuk meminta air kepada tetangganya yang Indonesia asli kalau ledeng mereka sedang macet. Demikian juga mereka dapat membiarkan anak-anak mereka untuk bermain dengan anak-anak tetangga Indonesia asli atau sebaliknya.³ Dalam keadaan sebaliknya di RT 0015/RW 02 terdapat kondisi perumahan yang relatif setingkat, yaitu sebagian orang Tionghoa sama-sama tinggal di daerah "kampung" bersama orang Indonesia asli.⁴ Di sini terdapat pula pergaulan informal yang cukup intim. Saling mengunjungi, ngobrol, atau tolong-menolong adalah hal yang biasa dalam kehidupan mereka.⁵ Sehingga dapat diduga bahwa sejauh

¹Dalam penelitian sosiologi biasanya tingkat sosial ekonomi diukur dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kekayaan.

²Amri Marzali, "Hubungan Sosial Cina-Pribumi," *Jurnal Penelitian Sosial FIS-UI*, September 1975, hal. 76.

³*Ibid.*, hal. 79.

⁴*Ibid.*, hal. 76.

⁵*Ibid.*, hal. 79.

terdapat keserasian tingkat sosial ekonomi antara orang Indonesia asli dan non-asli, maka akan terdapat keserasian pembauran pula dari tingkat RT/RW sampai kepada tingkat nasional, termasuk semua lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya.

Dalam bidang pendidikan dapat dilihat, bahwa terdapat kecenderungan pada orang Tionghoa untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang dianggap bermutu atau favorit. Adapun sekolah negeri yang dianggap favorit kurang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak dari keturunan Tionghoa, maka mereka umumnya masuk sekolah-sekolah swasta yang favorit. Di samping itu faktor pemilihan sekolah juga dipengaruhi oleh teman sebaya (peer group), sehingga ada kecenderungan anak-anak keturunan Tionghoa lebih dominan di sekolah-sekolah swasta. Dilihat dari segi biaya, sekolah swasta favorit dikenal sebagai sekolah mahal. Karena itu sekolah-sekolah tersebut biasanya menjadi tempat penampungan anak-anak dari golongan masyarakat ekonomi kuat, yang kebanyakan anak-anak keturunan Tionghoa atau anak Indonesia asli yang mampu.¹

Meskipun demikian untuk mengetahui sejauh mana keturunan Tionghoa telah memasuki perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari masyarakat Indonesia asli, belum ada data statistik untuk itu.

Agar proses asimilasi struktural itu dapat berjalan lancar, maka sebaiknya para pedagang dan pengusaha WNI keturunan Tionghoa lebih memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha atau pedagang Indonesia asli untuk ikut serta dalam jaringan kegiatan usaha misalnya menjadi sub-kontraktor, supplier, distributor ataupun dealer. Di samping itu generasi muda keturunan Tionghoa sebaiknya juga ikut meningkatkan perhatiannya untuk menjadi pegawai negeri atau Angkatan Bersenjata RI.

Asimilasi Perkawinan

Asimilasi Perkawinan merupakan suatu proses kelanjutan dari hubungan sosial antara orang Indonesia asli dan non-asli, yang diwujudkan dalam suatu lembaga perkawinan. Dengan kata lain, hubungan sosial mempunyai korelasi positif dengan asimilasi perkawinan. Sedangkan hubungan sosial merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh asimilasi struktural. Tentang hal ini Amri Marzali menerangkan sebagai berikut;

¹*Ibid.*, hal. 78; juga lihat Babari, "Pendidikan Formal Sebagai Sarana Pembauran Bangsa," *Analisa*, No. 1 (Jakarta: CSIS, 1983), hal. 75.

”Kalau hubungan bertetangga saja sudah tidak baik, dan hubungan sebagai rekan sekerja tidak disukai, apalagi yang dapat diharapkan dalam hubungan yang lebih intim, seperti perkawinan misalnya.”¹

Kemudian menurut hasil penelitian Amri Marzali di Kelurahan Taman Sari tahun 1974, kasus perkawinan antara keturunan Tionghoa dengan orang Indonesia asli merupakan hal yang sangat langka di daerah ini. Sedangkan alasan yang diberikan terhadap hambatan untuk terjadinya perkawinan pada umumnya menyangkut faktor perbedaan adat, agama dan tingkat ekonomi.²

Meskipun data statistik yang menunjukkan jumlah asimilasi perkawinan antara orang Indonesia asli dengan keturunan Tionghoa belum ada, tetapi sudah dapat diduga bahwa asimilasi perkawinan yang telah berlangsung selama ini, disebabkan oleh persamaan agama, pendidikan dan/atau ekonomi. Karena orang Tionghoa peranakan dalam banyak hal lebih menyerupai orang Indonesia asli, maka perkawinan campuran antara Indonesia asli dan Tionghoa peranakan lebih banyak terjadi daripada perkawinan campuran antara orang Indonesia asli dan Cina totok.

Dampak positif dari hasil asimilasi perkawinan ini antara lain disebutkan oleh Radius Prawiro sebagai berikut:

”... anak-anak mengambil intisari dari dua macam kebudayaan dan kita bisa hidup serasi karena masing-masing membuka diri terhadap setiap masalah yang timbul meskipun berbeda latar belakang.”³

Namun di balik asumsi yang penuh harapan ini, masih terdapat masalah bagi anak-anak yang dilahirkan dari hasil asimilasi perkawinan dalam menentukan identifikasi dirinya. Karena kebijaksanaan yang dianut pemerintah dalam menarik garis keturunan ialah pola patrilineal. Jadi hanya anak-anak yang dilahirkan dari ayah yang Indonesia asli saja, yang diakui sama sebagai putra Indonesia asli. Sebaliknya setiap laki-laki Indonesia non-asli yang menikah dengan gadis Indonesia asli masih dikenakan ketentuan berdasarkan Staatsblad 1917 No. 130 jo 1919 No. 81. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang ayahnya orang Indonesia non-asli, masih akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dirinya sebagai putra Indonesia asli. Walaupun orang tuanya sudah mendidik putra-putrinya untuk bersikap dan bertingkah laku sebagai putra Indonesia yang berkepribadian Pancasila.

Oleh karena itu dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka sebaiknya Staatsblad 1917 No. 130

¹Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 81.

²*Ibid.*

³Radius Prawiro, *op. cit.*

jo 1919 No. 81 perlu ditinjau kembali, sehingga dapat membentuk terciptanya iklim yang mendukung proses asimilasi perkawinan.¹

Asimilasi Identifikasi

Menurut Sayuti Melik, masih banyak WNI keturunan Tionghoa yang belum benar-benar merasa dirinya sebagai orang Indonesia.² Asumsi Sayuti Melik ini agak sulit dibantah, meskipun tidak dapat dibenarkan seluruhnya. Karena ternyata ada orang Indonesia keturunan Tionghoa yang telah melakukan asimilasi perkawinan dan tinggal selama beberapa generasi di Kecamatan Mauk - Kabupaten Tangerang, yang sulit diidentifikasi sebagai orang Tionghoa lagi. Kesulitan itu dialami oleh petugas Kecamatan ketika melakukan pendaftaran untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI), sehingga akhirnya diserahkan saja sesuai dengan pengakuan mereka.³ Menurut Musfihin Dahlan, status sosial ekonomilah yang menjadi faktor dominan bagi penduduk setempat untuk menentukan golongan Indonesia asli atau non-asli, bukan faktor ras maupun kebudayaan.⁴ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bambang Siswoyo, bahwa identifikasi sebagai orang Indonesia harus tercermin dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik serta penggunaan predikat panggilan yang bernapaskan Indonesia pula.⁵ Mengenai predikat panggilan ini Bambang Siswoyo berpendapat bahwa, sebaiknya sebutan Oom, Tante, Encek, Encim, Babahe, Nyanten, Engkoh, Cik atau Meneer, Mevrouw dan seterusnya disesuaikan dengan sebutan yang bernapaskan nasional, seperti Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Bung atau Kakak dan Adik⁶

Asimilasi Sikap

Pengertian asimilasi sikap menurut Milton Gordon adalah bertalian dengan tak adanya prasangka. Namun untuk mengetahui masih adanya prasangka terhadap keturunan Tionghoa adalah lebih mudah daripada mengetahui sejauh mana prasangka itu telah hilang. Karena hilangnya prasangka itu

¹Lihat juga Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 kepada Menteri Kehakiman dan Kantor-kantor Catatan Sipil.

²Sayuti Melik, dikutip dari *Sinar Harapan*, 6 Nopember 1972.

³Musfihin Dahlan, "Cina Peranakan Mengapa Disebut Non-Pri," *Mutiara*, No. 313, 1 Februari - 14 Pebruari 1984.

⁴*Ibid.*

⁵P. Bambang Siswoyo, *op. cit.*, hal. 110.

⁶*Ibid.*

secara tidak langsung dipengaruhi oleh jarak sosial. Jarak sosial dapat mempengaruhi stereotip. Stereotip dapat menumbuhkan prasangka. Kalau stereotip adalah anggapan yang dianut, sedangkan prasangka merupakan suatu sikap.¹ Sehingga untuk mengamati gejala prasangka itu, maka terlebih dahulu harus diperhatikan gejala stereotip.

Hasil penelitian tentang stereotip etnik yang dilakukan oleh Noer Abijono dalam jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) di Banda Aceh menunjukkan, bahwa terhadap kelompok keturunan Tionghoa terdapat stereotip umum seperti materialis, teliti dan pelit. Ditambah lagi dengan stereotip khusus seperti ulet, tidak tahu balas budi, rajin, kurang patriotik, tidak dapat dipercaya dan licik.² Stereotip ini terbentuk akibat penggambaran keturunan Tionghoa sebagai pedagang yang mewarisi struktur sosial ekonomi warisan penjajahan.³ Stereotip demikian yang kemudian berkembang menjadi prasangka. Hasil penelitian Amri Marzali di Kelurahan Taman Sari menunjukkan, bahwa prasangka golongan masyarakat Indonesia asli terhadap keturunan Tionghoa adalah sebagai makhluk ekonomi yang tidak mempunyai rasa sosial. Mereka hanya hidup untuk mencari uang dan menambah kekayaan saja.⁴ Sehingga kalau dikaji lebih lanjut akan tampak gejala prasangka itu menimbulkan kerenggangan hubungan informal dan sebaliknya juga berlaku demikian.

Dengan demikian masalah prasangka ini bisa jadi berlatar belakang pada konteks sejarah nasional Indonesia, yaitu masalah perubahan struktur sosial karena kedatangan Jepang dan kemerdekaan. Di satu pihak, sebagai peninggalan dan kenang-kenangan akan struktur sosial kolonial, masih ada keturunan Tionghoa yang merasa dirinya *superior* atas orang Indonesia asli. Di lain pihak orang Indonesia asli, sebagai hasil pembalikan struktur sosial kolonial, juga merasa *superior* terhadap keturunan Tionghoa. Mereka merasa sebagai pemilik yang sah dan mutlak atas negeri yang bebas dari penjajahan Belanda ini, sedangkan keturunan Tionghoa dianggap hanya menumpang saja.⁵ Jadi kedua pihak berpegang kepada warisan sistem tradisional. Keturunan Tionghoa yang merasa superior karena secara tradisional sejak dahulu,

¹Sharon Ruhly, *Orientation to Intercultural Communication*, MODCOM Series, Science Research Associates, Inc., Palo Alto, Reorder No. 13-5518, 1977, hal. 23.

²Noer Abijono, "Problema Kelompok Etnik dalam Jemaat GPIB Banda Aceh dalam Iskandar Wiryokusumo dan J. Mandalika, *Kumpulan Pikiran-pikiran dalam Pendidikan* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali), hal. 122.

³Lihat Christianto Wibisono, "Mengapa Tidak Pakai Istilah Bangsa Indonesia," *Sinar Harapan*, 17 Mei 1984.

⁴Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 80.

⁵Lihat Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 83.

baik dalam faktor ekonomi, etnik, adalah lebih tinggi daripada orang Indonesia asli. Sedangkan orang Indonesia asli mendasarkan diri atas kriteria tradisional Indonesia dalam menentukan kelas sosial baru, yaitu "keaslian."

Seandainya antara sesama warga negara Indonesia baik yang asli maupun non-asli dapat mengembangkan sikap saling mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, maka proses asimilasi sikap akan berjalan lebih baik.

ASIMILASI PERILAKU

Pengertian Asimilasi Perilaku menurut Milton Gordon adalah bertalian dengan tak adanya diskriminasi. Sebagai akibat dari masih adanya prasangka terhadap keturunan Tionghoa, maka tampak prasangka itu kemudian diwujudkan dalam tingkah laku yang diskriminatif. Sebenarnya dalam kehidupan sosial sehari-hari tidak terasa adanya diskriminasi. Sebagai contoh, seorang dokter Indonesia asli tidak pernah menolak mengobati pasien yang keturunan Tionghoa dan sebaliknya berlaku demikian. Diskriminasi akan terasa bila terjadi situasi persaingan untuk melakukan mobilitas vertikal. Perlakuan yang diskriminatif dalam bidang pendidikan masih belum terasa pada pendidikan dasar hingga menengah, walaupun sekolah negeri yang favorit kurang memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak keturunan Tionghoa. Karena mereka umumnya masih dapat masuk sekolah-sekolah swasta yang favorit.¹ Meskipun data statistik berdasarkan asal-usul keturunan tidak ada, tetapi pelajar-pelajar Indonesia non-asli hanya dapat mengisi 10% tempat di universitas negeri.² Perlakuan yang diskriminatif menurut asal-usul keturunan ini sampai sekarang masih sulit dibuktikan. Namun dalam proses pendaftaran calon mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri, setiap calon mahasiswa diwajibkan mengisi kolom pertanyaan tentang asal-usul keturunan dan termasuk suku apa. Setelah diadakan ujian saringan, maka sering tampak dari calon mahasiswa keturunan Tionghoa yang diterima persentasenya kurang-lebih 10%.³ Kenyataan ini telah menyebabkan membengkaknya jumlah mahasiswa keturunan Tionghoa pada Perguruan Tinggi Swasta. Sebagai contoh pada Universitas Tarumanegara di Jakarta mempunyai lebih dari 50% mahasiswa keturunan Tionghoa dan bahkan sampai 90% pada Fakultas Kedokteran.⁴

Perlakuan diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa lebih merupakan pencerminan daripada upaya untuk membuat keseimbangan sosial ekonomi

¹Lihat Babbari, *op. cit.*

²Hugh, dan Ping-Ching Mabbett, *op. cit.*, hal. 12.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hal. 13.

antara orang Indonesia asli dan non-asli. Sehingga tindakan pembatasan yang diskriminatif akan semakin terasa pada setiap saluran untuk melakukan mobilitas vertikal. Kenyataan seperti dalam bidang pendidikan itu berkelanjutan pula ke dalam bidang lapangan kerja.

Perlakuan diskriminatif juga terasa pada kantor pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Orang keturunan Tionghoa sering mengeluh bahwa pelayanan terhadap mereka baru diberikan dengan baik bila disertai dengan uang.¹ Hal ini juga disebabkan karena adanya perbedaan irama kerja. Ada dari Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengusaha atau pedagang lebih mengutamakan waktu. Bagi mereka waktu adalah uang. Sehingga ada sebagian dari mereka yang menginginkan proses penyelesaian urusannya cepat, sering memberi uang pelancar. Hal demikian lama-kelamaan menjadi pola perilaku dari sebagian oknum aparatur kantor pemerintahan. Demikian pula berbelit-belitnya mekanisme birokrasi yang mengurus Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), KTP di Jakarta yang diharuskan memiliki Surat K-1, antara lain membuka peluang untuk melakukan pemerasan dan penyuapan. Tentang hal ini Hugh dan Ping-Ching Mabbett menyatakan bahwa di banyak bidang orang Tionghoa harus membayar lebih dari biaya yang resmi. Sehingga seorang pemuka keturunan Tionghoa telah mengamati bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kami kecuali membayar lebih.² Pernyataan seperti ini dapat ditafsirkan sebagai ungkapan yang sinis terhadap perlakuan diskriminasi, daripada mengungkapkan tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa. Meskipun secara yuridis formal dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan:

- (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jadi dengan jelas Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945 telah menyatakan tidak ada diskriminasi. Tetapi dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan perlakuan. Sehingga dari kenyataan adanya praktek-praktek yang diskriminatif itu belum dapat dikatakan bahwa keturunan Tionghoa dan orang Indonesia asli telah terbaur menurut pengertian Milton Gordon tentang Asimilasi Perilaku.

¹Lihat Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 84.

²Hugh dan Ping-Ching Mabbett, *op. cit.*, hal. 14.

Apabila Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuensi, maka asimilasi perilaku akan berjalan lancar. Untuk itu perlu ditingkatkan mekanisme pengawasan agar setiap penyimpangan dapat diambil tindakan. Demikian pula Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa perlu mempunyai kesadaran yang tinggi untuk tidak mengisi peluang atas terbukanya kesempatan untuk membayar lebih.

ASIMILASI CIVIC

Pengertian asimilasi "civic" menurut Milton Gordon adalah bertalian dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara orang Indonesia asli dan keturunan Tionghoa sering tercermin dari perbedaan sistem kepercayaan. Orang Tionghoa secara umum dapat diidentifikasi sebagai kelompok non-Islam. Perbedaan agama itu akan berpengaruh pula pada sistem nilai. Perbedaan segera tampak dalam soal makanan. Sering perbedaan soal makanan ini dapat menimbulkan pertentangan, bila tidak ada usaha dari masing-masing pihak untuk mengendalikan diri. Misalnya, isyu tentang bakso sapi bercampur daging babi, telah menyebabkan terpukulnya pengusaha bakso di Bandung.¹

Dalam pandangan hidup tampak pula perbedaan yaitu keturunan Tionghoa pada umumnya sangat memikirkan dunia fana, sedangkan orang Indonesia asli pada umumnya lebih senang memikirkan segala hal sesudah hari akhirat.² Keturunan Tionghoa yang lebih memikirkan perkara duniawi, akan tampak sebagai pengumpul kekayaan yang tekun. Mereka ini yang kebanyakan bergerak di bidang perdagangan dan usaha sering dianggap tidak memperhitungkan nilai-nilai etis atau moral oleh orang Indonesia asli yang pada umumnya sangat mementingkan moral.

Perbedaan ciri-ciri sistem nilai ini kadang-kadang menimbulkan pertentangan yang terbuka, seperti kerusuhan rasial. Karena keberhasilan pedagang atau pengusaha keturunan Tionghoa dalam mengumpulkan kekayaan itu telah menimbulkan kesan adanya dominasi ekonomi oleh keturunan Tionghoa di Indonesia.³ Sehingga kemudian muncul isyu "Pengusaha Pribumi Perlu Jadi Tuan di Rumah Sendiri."⁴

¹Lihat *Tempo*, 7 April 1984.

²Lihat M.A.W. Brouwer, "Mulai Tanggal Satu Januari," *Kompas*, 2 April 1984.

³Lihat Siswono Judo Husodo, "Pribumi Perlu Diberi Porsi Lebih Besar," *Prisma*, 4 April 1981.

⁴Lihat Probosutedjo, "Pengusaha Pribumi Perlu Jadi Tuan di Rumah Sendiri," *Kompas*, 13 Pebruari 1980.

Meskipun demikian telah terdapat kemajuan dalam asimilasi "civic", sebagai contoh hasil Musyawarah ke-2 HIPPI di Medan. Musyawarah itu telah menghasilkan kesepakatan untuk mengganti istilah "Pribumi" menjadi "Putra" dalam HIPPI. Kemajuan itu juga ditunjukkan dengan diterimanya dua anggota pengurus yang berasal dari keturunan Tionghoa.¹ Dengan demikian telah dicapai saling pengertian untuk bersama-sama memajukan pembauran dalam bidang usaha, agar proses penyelarasan di bidang ekonomi dapat dicapai. Sikap seperti ini perlu dikembangkan dalam masyarakat secara luas.

Dalam bidang politik, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa lebih dekat dengan aspirasi yang mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan Tionghoa yang kebanyakan bekerja sebagai pedagang atau pengusaha mendambakan rasa aman dalam proses pengembangan usahanya.²

Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ketiga kekuatan sosial politik dan semua organisasi masyarakat, maka keanggotaannya bersifat terbuka bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras atau golongan. Dengan demikian akan mudah dicapai saling pengertian yang bermanfaat untuk menghindari menajamnya pertentangan yang dapat mengakibatkan timbulnya bentrokan yang membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi dalam kehidupan ber-masyarakat dan bernegara telah terdapat kemajuan yang semakin baik bagi asimilasi civic.

Seandainya kedua sistem nilai yang berbeda itu telah serasi, selaras dan seimbang dalam mengejar kemajuan material dan spiritual, maka pertentangan mengenai pengertian kekuasaan dapat berubah menjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian terdahulu tentang masalah pembauran menurut ketujuh variabel yang dikemukakan oleh Milton Gordon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam proses asimilasi kebudayaan orang-orang keturunan Tionghoa di Pulau Jawa lebih maju daripada mereka yang di luar Jawa. Sehingga cara pembinaannya harus berbeda pula. Orang-orang keturunan Tionghoa di Jawa sebaiknya didorong untuk lebih berani melakukan pem-

¹Antara, 3 September 1984.

²Lihat Nyoo Han Siang, *Tempo*, 18 Februari 1978, hal. 7.

bauran struktural. Sedangkan bagi mereka yang di luar Jawa pembinaan itu sebaiknya diarahkan untuk membangkitkan kesadaran mereka agar mau belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu bagi mereka yang masih menggunakan beberapa ciri-ciri kebudayaan yang masih berorientasi ke negeri leluhur perlu diberi kesempatan yang luas untuk belajar menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang berorientasi kepada bangsa dan tanah air Indonesia.

Kedua, dalam proses asimilasi struktural tampaknya kekurangserasan tingkat sosial ekonomi antara orang Indonesia asli dengan keturunan Tionghoa dapat merupakan hambatan. Seandainya terdapat keserasian tingkat sosial ekonomi, maka proses asimilasi struktural lebih mudah dicapai baik dalam pemukiman maupun dalam perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari masyarakat Indonesia asli. Oleh karena itu para pedagang dan pengusaha Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebaiknya lebih memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha atau pedagang Indonesia asli untuk ikut serta dalam jaringan kegiatan usaha misalnya menjadi sub-kontraktor, supplier, distributor ataupun dealer. Di samping itu generasi muda keturunan Tionghoa sebaiknya juga ikut meningkatkan perhatiannya untuk menjadi pegawai negeri atau ABRI.

Ketiga, perkawinan campuran adalah salah satu bentuk asimilasi yang telah dilakukan di Indonesia. Meskipun Staatsblad 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 masih merupakan hambatan. Oleh karena itu dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka sebaiknya Staatsblad itu ditinjau kembali.

Keempat, identifikasi sebagai orang Indonesia harus tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari, misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Dalam asimilasi identifikasi diperlukan pula keserasian tingkat sosial ekonomi, agar tidak ada orang yang merasa malu menyebut dirinya bangsa Indonesia. Di samping itu faktor penerimaan dan pengakuan dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia asli diperlukan juga, supaya WNI keturunan Tionghoa dapat menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Demikian pula sebaliknya adalah tepat bila WNI keturunan Tionghoa dalam setiap kesempatan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Kelima, asimilasi sikap juga dipengaruhi oleh jarak sosial. Agar prasangka sosial terhadap keturunan Tionghoa dapat berkurang, maka diperlukan jarak sosial yang dekat. Dalam rangka mendekatkan jarak sosial diperlukan peran serta dalam kehidupan bertetangga, perkumpulan-perkumpulan serta pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari masyarakat Indonesia asli. Untuk itu juga perlu dikembangkan sikap saling mengakui persamaan derajat, per-

samaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara Indonesia.

Keenam, dalam asimilasi peri laku masih terdapat perlakukan diskriminatif terhadap keturunan Tionghoa. Usaha pembauran akan tersendat-sendat jika anak-anak WNI keturunan Tionghoa yang tidak lagi menyadari asal-usul serta telah membaur, menjadi digugah perasaan dan pikirannya bila diharuskan pula untuk memiliki Surat K-1 dalam mengurus KTP di Jakarta. Mengingat Jakarta adalah ibukota negara RI yang juga sering menjadi panutan kota-kota lain, maka sebaiknya keharusan memiliki surat K-1 itu perlu ditinjau kembali. Di samping itu perbedaan perlakuan yang masih belum sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu terus diusahakan akan semakin sesuai. Untuk itu diperlukan juga agar WNI keturunan Tionghoa ikut membantu terlaksananya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi, misalnya dengan tidak mengisi peluang atas terbukanya kesempatan untuk membayar lebih.

Ketujuh, dalam asimilasi civic telah terdapat kemajuan, misalnya setelah digantinya istilah "Pribumi" menjadi "Putra" dalam HIPPI, maka tercapai saling pengertian untuk bersama-sama memajukan pembauran dalam bidang usaha, agar proses penyelarasan di bidang ekonomi dapat dicapai. Meskipun demikian perlu terus dikembangkan sistem nilai yang seimbang dalam mengejar kemajuan material dan spiritual, agar pertentangan mengenai pengertian kekuasaan dapat berubah menjadi suatu kerjasama dalam membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi masyarakat dan ketiga kekuatan sosial-politik, maka telah tercipta iklim yang semakin baik bagi proses asimilasi civic.

Hambatan-hambatan dalam Proses Pembauran Bangsa

BABARI

PENGANTAR

Di dalam GBHN tahun 1978 dan 1983 di sektor kebudayaan, MPR telah menetapkan bahwa usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan memantapkan ketahanan nasional. Pembauran bangsa pada hakikatnya merupakan satu proses transkultural antar golongan/kelompok masyarakat yang menjadi warga suatu negara bangsa dengan maksud memperkokoh persatuan dan kesatuan hidup bersama sebagai warga dari satu negara bangsa.

Pembauran bangsa ini merupakan masalah penting untuk dipecahkan bersama oleh semua warga negara bangsa Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk ini harus menjalankan proses saling membaur baik secara horizontal maupun vertikal sehingga kesetiakawanan/kebersamaan sebagai warga negara bangsa Indonesia dapat terbina. Kemajemukan warga negara bangsa Indonesia dapat dilihat dari segi etnis maupun dari segi sosiologis. Dari segi etnis masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat-istiadat, bahasa, ras ataupun memeluk berbagai agama dan menganut berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara sosiologis masyarakat Indonesia juga dapat dibedakan ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat (hirarkis). Terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat karena tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya terhadap anggota masyarakat.¹

Dalam masyarakat Indonesia bentuk-bentuk konkret lapisan antara lain dapat dikelompokkan berdasarkan pada tiga hal, yaitu ekonomi, politik, dan

¹Socerjono Sockanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, CV. Rajawali 1982) hal. 219-220.

jabatan/kedudukan tertentu dalam masyarakat. Pengelompokan secara ekonomis ini memerlukan perhatian yang lebih besar mengingat masalah ekonomi ini selalu dikaitkan dengan ras (khususnya golongan keturunan Tionghoa), sehingga muncul pendapat dalam masyarakat bahwa golongan keturunan Tionghoa merupakan lapisan atas (ekonomi kuat) dan golongan Indonesia "asli" adalah lapisan bawah (ekonomi lemah). Pengelompokan seperti ini menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan yang bersifat rasialis seperti yang pernah terjadi di tanah air kita.

Sistem pelapisan dalam satu masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Yang tertutup tidak memungkinkan pindahnya orang-seorang untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Masuknya seseorang dalam satu lapisan berdasarkan pada kelahiran. Sedangkan yang bersifat terbuka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat untuk berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan masyarakat seperti ini akan terjadi mobilitas.¹ Yang dipakai dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah sistem terbuka. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat akan terjadi mobilitas baik secara horisontal maupun vertikal. Mobilitas horisontal adalah perpindahan seseorang dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, seperti seseorang yang beralih kewarganegaraannya. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang dari satu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat,² seperti dari anggota kelompok ekonomi lemah ke ekonomi kuat.

Dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, gerak sosial (mobilitas sosial) perlu diupayakan secara bijaksana sehingga turut menjadi faktor penunjang proses pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah sikap berprasangka dan perilaku yang diskriminatif antar golongan/kelompok dalam masyarakat bangsa Indonesia harus dibuang jauh-jauh dalam sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari. Disadari bahwa hal ini sangat sulit untuk dilakukan mengingat ikatan-ikatan primordial kita masih cukup kuat. Namun hal ini harus dimulai agar kesatuan dan persatuan negara dan bangsa kita tetap terlestarikan. Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk menguraikan bahwa proses pembauran bangsa kita akan menghadapi hambatan-hambatan yang berat dalam pelaksanaannya apabila setiap golongan/kelompok primordial dalam masyarakat tetap menunjukkan sikap prasangka dan perilaku diskriminatif terhadap golongan/kelompok lainnya. Di bagian akhir tulisan ini akan diberikan beberapa alternatif pemikiran sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu.

¹Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta, Universitas Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 1964) hal. 254.

²Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 243.

PEMBAURAN BANGSA

Pembauran bangsa (dalam hal ini bangsa Indonesia) merupakan usaha untuk menyatukan suku-suku bangsa dalam masyarakat bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh atau pemanfaatan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia yang telah menegara ini. Bersatu sebagai satu bangsa tidak hanya berdasarkan kesamaan ras, bahasa, agama, kepentingan atau batas-batas geografi, tetapi berdasarkan pada kesamaan perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan yang telah dialami di masa lampau, masa kini, dan akan dialami bersama lagi di masa depan. Ernest Renan, seorang guru besar di Universitas Sorbonne berpendapat bahwa bangsa adalah satu jiwa. Yang mengikat bangsa sebagai satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama di atas suatu wilayah tempat tinggal yang mempunyai batas-batas yang jelas. Di samping itu, Otto Bauer dari Austria dalam bukunya: *Die Nationalitäten Frage und Die Racielle Demokratie*, juga berpendapat bahwa bangsa adalah persamaan, satu persatuan karakter, watak yang terjadi karena persatuan pengalaman.¹ Dua pengertian bangsa ini selalu dipakai oleh Ir. Soekarno (Presiden Pertama RI/Proklamator) sebagai salah seorang pendiri utama negara bangsa ini.

Berdasarkan pada pendapat itu maka seharusnya semua kelompok/suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Nusantara yang telah menjadi satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia juga merupakan satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataan tekad membangun bangsa Indonesia baru masih dalam proses yang sudah berjalan selama 39 tahun. Hal ini disebabkan oleh kuatnya ikatan-ikatan primordial kita seperti pada suku, agama, ras, dan golongan/kelompok kepentingan sehingga dapat menjadi faktor pemecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Dari pengamatan sementara, kita dapat mengatakan bahwa faktor perbedaan suku, daerah tempat asal ataupun agama sudah menjadi sumber kedua yang mampu mendorong terjadinya konflik antar sesama kelompok masyarakat bangsa Indonesia. Faktor yang tetap menjadi masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh adalah perbedaan ras, yaitu antara golongan Indonesia "asli" dan golongan keturunan Tionghoa yang sama-sama telah menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 UUD 1945 menetapkan antara lain, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara

¹Bung Karno, *Pancasila Dasar Filsafat Negara* (Jakarta, Yayasan Empu Tantular).

Republik Indonesia.¹ Adalah suatu kebetulan bahwa orang-orang asing atau keturunannya yang disahkan sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagian besar berasal dari bangsa/keturunan Tionghoa.

Atas dasar kewarganegaraan yang sama kita membicarakan masalah kebersamaan sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia. Dari segi ini kita membicarakan masalah pembauran warga negara keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dalam proses ini ada tiga pelaku utama, yaitu golongan keturunan Tionghoa, masyarakat bangsa Indonesia asli, dan pemerintah. Timbul pertanyaan adakah masalah yang dihadapi oleh ketiga pelaku ini dalam proses membaurkan bangsa ini? *Pertama*, dari golongan keturunan Tionghoa, K. Sindhunata, Ketua Bakom PKB Pusat dalam ceramahnya di CSIS tanggal 30 Juni 1983 mengemukakan bahwa di dalam kelompok masyarakat keturunan masih terdapat pembagian atas kelompok yang sudah membaur, kelompok yang masih ragu-ragu, dan kelompok yang sudah siap membaur. Selain itu pandangan tentang pembauran masih cukup berbeda di antara kelompok keturunan Tionghoa yang menyebut diri mereka sebagai "Peranakan" dan kelompok "Totok" atau Singkeh (tamu baru).² Kelompok peranakan adalah mereka yang lahir di tanah air Indonesia. Mereka juga mengikuti pendidikan formal di Indonesia. Oleh karena itu kelompok peranakan ini lebih mudah membaur ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Sedangkan kelompok totok masih agak sulit membaur karena mereka umumnya dilahirkan di daratan Cina dan masih cukup kuat memegang nilai dan norma-norma perilaku hidup warisan leluhur. *Kedua*, masyarakat bangsa Indonesia asli memandang golongan keturunan Tionghoa di Indonesia sebagai satu kelompok masyarakat yang homogen dan demikian juga sebaliknya semata-mata berlandaskan pada prasangka karena mempunyai stereotipe yang berbeda. *Ketiga*, pemerintah umumnya masih memandang golongan keturunan Tionghoa juga sebagai satu kelompok sosial yang homogen sehingga terjadi generalisasi dalam setiap kebijaksanaan pemerintah dan hal ini dirasakan sebagai sikap diskriminatif oleh kelompok masyarakat keturunan Tionghoa.

PENDEKATAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU

Selama ini ada dua konsep pendekatan dalam usaha melaksanakan pembauran bangsa, yaitu: (1) integrasi berupa pendekatan kelompok yang menginginkan warga negara keturunan Tionghoa diterima sebagai satu suku dalam

¹Lihat UUD 1945.

²Lebih lanjut lihat Lembaran Khusus Majalah Tempo, 18 Agustus 1984 tentang Dilema Minoritas Tionghoa.

masyarakat bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; (2) asimilasi, berupa pendekatan individual yang menginginkan agar setiap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa secara perorangan berusaha berbaur agar diterima sebagai warga negara bangsa Indonesia yang utuh. Integrasi merupakan konsep Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1954. Badan ini merupakan organisasi sosial politik kelompok peranakan Tionghoa yang berpengaruh dan tahun 1955 ikut sebagai salah satu kontestan pemilihan umum dengan calon-calonnya sendiri. Badan ini dibubarkan tahun 1965 dan pendekatan integrasi tidak dipakai mengingat dalam pendekatan ini ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan eksklusivisme golongan keturunan Tionghoa. Sedangkan asimilasi merupakan pendekatan yang mendapat dukungan dari pemerintah dan ABRI dan dewasa ini dikembangkan oleh Bakom PKB (Badan Komunikasi Pembinaan Kesatuan Bangsa).

Gerakan asimilasi secara formal berdiri pada tanggal 20 Maret 1960 melalui "Pernyataan Asimilasi Yang Wajar," yang ditandatangani oleh 10 orang tokoh keturunan Tionghoa dan pada tanggal 15 Januari 1961 dikukuhkan dalam "Piagam Asimilasi" yang ditandatangani oleh 30 orang di Bandungan/Ambarawa, Jawa Tengah. Untuk mengembangkan isi piagam itu maka pada tanggal 18 Juli 1963, melalui Keppres No. 140/1963 dibentuk Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB). Badan ini kemudian dibubarkan lagi melalui Keppres No. 226 tahun 1967 tentang Pembubaran badan-badan/lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Seiring dengan itu, pemerintah pada tahun 1967 juga menutup semua sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak keturunan Tionghoa di seluruh wilayah tanah air. Penutupan sekolah-sekolah khusus itu melalui Instruksi Presidium Kabinet No. 37/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina tertanggal 7 Juni 1967. Mulai saat itu, anak-anak keturunan Tionghoa diharuskan untuk bersekolah di sekolah-sekolah nasional. Tempat yang disediakan bagi mereka dalam setiap kelas adalah 40% dari jumlah murid yang ada di kelas itu. Dengan cara ini pendidikan formal telah menjadi salah satu sarana pembauran bangsa.¹

Dengan bubarinya LPKB ini selama 10 tahun tidak ada badan/lembaga yang menangani masalah pembauran kelompok masyarakat keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1977 terbentuk Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) yang merupakan forum komunikasi teknis yang membantu masyarakat dan pemerintah (Departemen Dalam Negeri) dalam usaha menggalakkan pelaksanaan pembauran bangsa ini sesuai dengan konsep asimilasi.

¹Lihat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/U/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di Bidang Pendidikan.

Badan ini tetap melakukan tugasnya hingga saat ini. Badan ini mendapat dukungan dari pemerintah.

Di samping Bakom PKB, masih terdapat badan swasta seperti Yayasan Pembauran Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Yunus Yahya, yang berpendapat bahwa agama merupakan salah satu sarana pembauran bangsa. Dalam hal ini agama Islam karena dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Pendirian mereka adalah apabila kelompok masyarakat keturunan Tionghoa memeluk agama Islam maka pembauran bangsa ini akan berjalan baik dan tuntas. Oleh karena itu pengurus dan anggota dari yayasan ini giat melakukan dakwah agama Islam di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa. Mungkin dengan batas-batas tertentu kita dapat mengatakan, bahwa Yayasan Prasetiya Mulya sebagai lembaga/badan yang mengumpulkan semua pengusaha-pengusaha besar golongan keturunan Tionghoa yang ingin membaktikan dirinya dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan juga melakukan usaha-usaha untuk mempercepat jalannya proses pembauran bangsa.

Ini semua merupakan upaya yang telah dilakukan oleh golongan masyarakat keturunan Tionghoa dalam usaha mempercepat terwujudnya persatuan dan kesatuan warga negara bangsa. Namun dalam kenyataan, usaha ini masih menghadapi hambatan-hambatan seperti nilai budaya, ekonomi dan politik. Faktor-faktor ini pula yang menjadi penghalang bagi golongan masyarakat Indonesia asli untuk bersikap wajar terhadap proses pembauran bangsa. Maksudnya sikap-sikap yang tidak dilandasi oleh prasangka dan perilaku yang diskriminatif. Demikian juga halnya dengan beberapa kebijaksanaan pemerintah yang menggeneralisir semua keturunan Tionghoa sebagai satu kelompok masyarakat yang homogen sehingga timbul kesan bahwa sikap pemerintah adalah diskriminatif.

BEBERAPA HAMBATAN DALAM PROSES PEMBAURAN

Yang dimaksud dengan hambatan adalah faktor yang memperlambat jalannya proses pembauran bangsa sebagai sarana untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan memantapkan konsepsi kebangsaan kita, yaitu kebangsaan yang tidak berdasarkan pada kesamaan suku, agama, ras, dan golongan kepentingan tetapi berdasarkan pada kesamaan semangat/jiwa untuk hidup bersama di atas satu wilayah teritorial dan berada di bawah satu pemerintahan yang berdaulat. Karena itu kebangsaan Indonesia lahir bersama dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam usaha membina kehidupan kebangsaan seperti ini, kita membicarakan masalah pembauran bangsa khususnya pembauran kelompok

masyarakat keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Timbul pertanyaan mengapa hanya kelompok masyarakat keturunan Tionghoa yang mendapat perhatian khusus dalam usaha pembauran bangsa ini? Mengapa kelompok masyarakat keturunan Arab, India, atau bangsa asing lainnya tidak menjadi masalah dalam proses pembauran bangsa ini? Perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat keturunan Tionghoa karena beberapa hal, yaitu: (1) jumlah kelompok masyarakat ini cukup besar sekitar 3,5 juta orang; (2) pola hidup mereka secara relatif masih eksklusif; dan (3) pada umumnya mereka berada dalam kelompok masyarakat ekonomi kuat. Berdasarkan pada hal-hal itu kita dapat mengatakan bahwa masih ada beberapa hambatan dalam proses membaurkan kelompok keturunan Tionghoa ini antara lain faktor budaya, ekonomi, dan politik.

Faktor budaya

Sistem budaya Indonesia terdiri dari kepercayaan-kepercayaan yang dianut bersama; nilai dan norma yang menjadi pedoman umum seperti yang terdapat dalam Pancasila dan P-4; aturan-aturan yang menjadi pedoman khusus dalam pergaulan antar sesama warga negara bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945; pengetahuan dan ide-ide bersama yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia; serta simbol-simbol yang digunakan bersama untuk mengungkapkan perasaan sebagai orang Indonesia. Semua itu merupakan milik bersama dan sekaligus menjadi identitas diri (kepribadian) orang Indonesia. Sebagian kelompok masyarakat keturunan Tionghoa masih sulit menyesuaikan dan/atau menempatkan diri dengan/dalam kepribadian Indonesia ini. Mereka masih kurang berorientasi ke dalam sistem budaya bangsa Indonesia. Mereka masih melaksanakan beberapa tradisi yang berasal dari negeri leluhur. Kenyataan ini mendorong orang untuk melihat peranakan Tionghoa sebagai kelompok masyarakat eksklusif.

Faktor ekonomi

Mahbub Junaidi dalam tulisannya di harian Merdeka, tanggal 13 Agustus 1973 mengatakan, bahwa masalah Cina di Indonesia sebenarnya cuma masalah "dendam ekonomi." Pendapat itu bisa diterima bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa golongan keturunan Tionghoa di Indonesia umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha sehingga mereka dapat menguasai kegiatan di bidang perdagangan ataupun di bidang usaha ekonomi lainnya. Dari sini timbul kesan, bahwa golongan keturunan Tionghoa telah menguasai kehidupan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya kelompok masyarakat keturunan Tionghoa diidentikkan juga sebagai golongan ekonomi

kuat yang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah (golongan masyarakat Indonesia asli).

Gambaran saling berhadapan di antara kelompok ekonomi kuat dan kelompok ekonomi lemah menyebabkan keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas dalam jumlah tetapi kuat dalam perekonomian selalu menjadi sasaran pelampiasan amarah golongan mayoritas apabila kondisi kehidupan sosial ekonomi dirasakan sebagai faktor yang memberikan beban yang berat bagi kehidupan mereka. Maksudnya apabila terjadi kenaikan harga barang-barang di pasar misalnya, orang-orang secara apriori akan mengatakan bahwa kenyataan itu merupakan hasil manipulasi pedagang kelompok keturunan Tionghoa. Oleh karena itu apabila terjadi kerusuhan yang berkonotasi rasial maka toko-toko tempat-tempat usaha dari kelompok keturunan Tionghoa yang akan menjadi sasaran pengrusakan oleh massa.

Faktor Politik

Bangkitnya nasionalisme Cina di bawah pimpinan Dr. Sun Yat Sen turut mempengaruhi sikap kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia untuk kembali berorientasi ke tanah leluhurnya. Dan setelah Tiongkok pecah menjadi dua negara, yaitu RRC dan Republik Cina/Taiwan, maka loyalitas kelompok keturunan Tionghoa yang tidak memilih menjadi warga negara Indonesia juga terpecah dua, yaitu memilih menjadi warga negara RRC atau menjadi warga negara Taiwan. Karena Indonesia belum mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat, maka kelompok keturunan yang memilih menjadi warga negara Taiwan dianggap sebagai stateless. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempertajam perbedaan budaya dan ras di antara kelompok keturunan Tionghoa dengan kelompok masyarakat warga negara Indonesia lainnya.

Selanjutnya perlakuan bagi kelompok keturunan Tionghoa yang menjadi warga negara RRC diatur dalam UU No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara RI dan RRC mengenai soal Dwi Kewarganegaraan tanggal 27 Januari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian mengenai soal Dwi Kewarganegaraan antara pihak RI dan RRC pada tanggal 22 April 1955. Pasal 14 UU itu antara lain menetapkan bahwa perjanjian ini berlaku untuk 20 tahun yang maksudnya adalah orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraan sesuai dengan perjanjian itu tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir. Ini berarti bahwa kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang sesuai dengan perjanjian itu memilih menjadi warga negara RRC akan tetap menjadi warga negara itu. Dengan ini dapat dikatakan bahwa status kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa ini masih ada yang belum jelas.

Dalam pemberontakan G-30-S/PKI disinyalir bahwa RRC turut memberikan dukungannya. Selain itu di Indonesia sendiri kelompok keturunan Tionghoa yang tergabung dalam Baperki fraksi Siauw Giok Tjhan ikut terlibat dalam pemberontakan itu (Baperki fraksi Mr. Yap Thiam Hien adalah non-komunis dan tidak ikut terlibat dalam pemberontakan itu). Semua ini turut menjadi faktor yang memperkuat anggapan dalam kelompok masyarakat bahwa orang-orang keturunan Tionghoa sulit dipercaya loyalitasnya dan komitmennya terhadap kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Ikhtiar untuk menghilangkan anggapan-anggapan itu, Pemerintah Orde Baru sejak awal telah mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina tertanggal 7 Juli 1967. Pasal 14 nya menetapkan bahwa materi yang tersebut di dalam Perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI dan RRC akan diatur kembali atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, sedangkan di pasal 11 menetapkan bahwa setiap penduduk warga negara asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan pentingnya arti status kewarganegaraan itu. Kemudian Pangkpkamtib dalam Instruksinya No. INS-02/KOPKAM/III/1975 tentang Pelaksanaan Kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah Cina tertanggal 5 Maret 1975, antara lain menetapkan bahwa proses pewarganegaraan tidak lagi didasarkan atas persetujuan Indonesia-RRC tahun 1958, tetapi berdasarkan pada UU No. 2 tahun 1958 jo PP No. 67 tahun 1958. Untuk lebih mengoperasionalkan kebijaksanaan itu, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan RI sebagai upaya untuk lebih mempercepat proses terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui tahap menjadi warga negara yang sama dan satu, yaitu warga negara Republik Indonesia. Sebab tanpa persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat dan utuh maka konflik etnis dan kerusuhan massal tidak dapat kita hindari selamanya di tanah air kita.

Selanjutnya kita akan mencoba menguraikan dua faktor utama yang mempertajam perbedaan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik di antara kelompok masyarakat Indonesia asli dan kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, yaitu: (1) sikap berprasangka; dan (2) perilaku diskriminatif. Prasangka dimiliki oleh setiap kelompok etnik terhadap kelompok etnik lainnya. Prasangka berkaitan erat dengan stereotipe etnik, yaitu anggapan atau gambaran tertentu mengenai sifat-sifat kelompok etnik lain yang tersebar luas di kalangan anggota masyarakat. Setiap kelompok etnik memiliki stereotipnya sendiri-sendiri. Sedangkan perilaku diskriminatif lebih dirasakan oleh kelompok keturunan Tionghoa karena kesempatan yang ada tidak diberikan sama kepada semua warga negara In-

donesia terutama warga negara Indonesia keturunan Tionghoa oleh pemerintah ataupun institusi-institusi kemasyarakatan lainnya.

PRASANGKA SOSIAL

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* W.J.S. Poerwadarminta, prasangka berarti pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri. Berdasarkan pada arti ini maka prasangka sosial dapat diartikan sebagai sikap perasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang terhadap kelompok atau golongan manusia yang lain. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu setiap anggota kelompok sadar bahwa ia adalah sebagian dari kelompoknya, menjalin hubungan timbal-balik dengan sesama anggota kelompoknya, mempunyai faktor pengikat yang mempererat hubungan timbal balik mereka, dan mempunyai pola perilaku tertentu. Selanjutnya setiap anggota kelompok mulai mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya sehingga timbullah rasa "in group" dan orang di luar kelompoknya disebut "out group."¹

Perasaan in group dan out group ini dapat mendorong anggota-anggota kelompoknya untuk menganggap bahwa semua kebiasaan yang ada dalam kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan dengan kebiasaan kelompok lain di luarnya. Anggapan seperti ini disebut etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaannya sendiri.² Kenyataan ini banyak dijumpai dalam sikap suatu kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan pada kesamaan suku, agama, dan ras (ethnic group).

Pengelompokan seperti ini juga ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Khusus pengelompokan berdasarkan kesamaan ras telah terjadi generalisasi yang membagi masyarakat kita atas dua, yaitu kelompok masyarakat Indonesia asli dengan ciri khasnya ekonomi lemah dan kelompok masyarakat keturunan Tionghoa dengan ciri khasnya ekonomi kuat. Sedangkan pembagian seperti ini tidak menjadi masalah bagi kelompok masyarakat keturunan Arab atau India. Kedua kelompok keturunan yang disebut terakhir ini seolah-olah sudah menjadi bagian dari masyarakat bangsa Indonesia.

Pembedaan yang tajam terhadap kelompok masyarakat keturunan Tionghoa ini selain disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik juga karena prasangka sosial yang dibawa sejak masa pemerintahan kolonial Bel-

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 119.

²Ibid., hal. 120.

londa. Terhadap kelompok masyarakat keturunan Tionghoa ini Pemerintah Kolonial Belanda telah memberikan perlakuan-perlakuan khusus seperti menempatkan dalam daerah pemukiman sendiri yang sekaligus menjadi tempat kegiatan usahanya, boleh mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi kelompok keturunan Tionghoa, sebagian hukum perdata Barat juga berlaku bagi kelompok masyarakat keturunan Tionghoa, dalam pembagian penduduk golongan Timur Asing merupakan gabungan sendiri dan berbeda dengan golongan Eropa dan kaum Inlander, dan hak sebagai perantara dalam pemasaran barang-barang perdagangan.

Semuanya ini memperkuat terjadinya prasangka sosial antar kelompok etnis dalam masyarakat. Bagi pemerintahan kolonial Belanda kenyataan seperti ini perlu dan baik agar dapat menerapkan politik adu-dombanya. Tetapi kenyataan ini menjadi masalah setelah bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara bangsanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Masalah prasangka sosial antar kelompok masyarakat terutama terhadap kelompok etnis keturunan Tionghoa masih belum dapat terpecahkan secara tuntas dan menyeluruh.

Usaha-usaha pemerintah melalui berbagai peraturan di bidang kewarganegaraan, pendidikan, dan ekonomi yang ada selama ini juga belum mampu menghilangkan prasangka sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa badan sebagai pendamping pemerintah seperti Bakom PKB telah menjalankan tugasnya dalam proses mempercepat usaha pembauran sehingga lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga beberapa badan swasta yang bergerak di bidang agama, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya melakukan gerakan pembauran ini. Baik pemerintah maupun badan-badan swasta yang melakukan kegiatan untuk mempercepat proses pembauran bangsa ini telah melakukan fungsinya masing-masing secara sungguh-sungguh namun masih terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapinya.

Prasangka sosial sering kali digunakan untuk mengeksplorasi golongan lain bagi kemajuan golongannya sendiri, sehingga merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Perbuatan golongan yang mengeksplorasi golongan lain berdasarkan prasangka sosial memiliki ciri-ciri berikut: bersikap tidak toleran, kurang mengenal diri/kelompok sendiri, kurang berdaya cipta, memiliki rasa tidak aman dan mempunyai khayalan-khayalan yang agresif. Bentuk dari perbuatan ini terlihat dalam kerusuhan yang bersifat rasial seperti yang pernah terjadi di tanah air kita, yaitu peristiwa 10 Mei di Bandung, huru-hara di Solo 19 Nopember 1980, dan peristiwa Banda Aceh 25 Oktober 1981.

PERILAKU DISKRIMINATIF

Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara bangsa seperti membedakan warga negara bangsa Indonesia asli dengan warga

negara Indonesia keturunan, khususnya keturunan Tionghoa. Pembedaan seperti ini dapat memecahkan kesatuan dan persatuan bangsa dan bertentangan dengan prinsip yang terdapat di dalam UUD 1945 pasal 26 dan 27. Pasal 26 menetapkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹ Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa orang-orang bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; ayat 2 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya.

Berpedoman pada ketentuan UUD 1945 itu kita mulai bertanya pada diri masing-masing apakah saya sudah melaksanakan ketentuan pasal 26 dan 27 UUD 1945. Rupanya jawaban yang tepat dan benar bagi pertanyaan ini adalah *belum*. Kenyataan menunjukkan bahwa warga negara keturunan Tionghoa tetap belum memperoleh dan/atau memanfaatkan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya terutama kesempatan untuk masuk ke dalam sektor pemerintahan seperti menjadi pegawai pemerintahan, menjadi anggota ABRI, masuk sekolah negeri dan lainnya lagi.

Di samping itu kebijaksanaan pemerintah di sektor ekonomi seperti yang terdapat dalam Keppres No. 14-A tahun 1980 yang kemudian diperbaiki lagi oleh Keppres No. 18 tahun 1981 dilihat oleh kelompok masyarakat keturunan Tionghoa sebagai perwujudan perilaku diskriminatif. Asumsi dasar yang dipakai oleh pemerintah terlalu bersifat menggeneralisasi bahwa semua anggota kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia termasuk dalam kelompok ekonomi kuat. Padahal dalam kenyataan terlihat masih banyak anggota kelompok masyarakat keturunan Tionghoa yang masih berada dalam status ekonomi lemah bahkan yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin seperti di Kalimantan Barat ataupun yang berdomisili di desa-desa di seluruh pelosok tanah air ini.

PENUTUP

Manusia membentuk masyarakat, dan masyarakat tidak bisa berubah kalau anggota masyarakatnya tidak berubah. Yang berubah adalah sikap,

¹Lihat UUD 1945.

kemauan, dan perilaku untuk saling menerima sesama manusia tanpa prasangka dan emosi yang bersifat diskriminatif. Hal ini perlu terwujud dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari terutama dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat bangsa Indonesia yang telah menegara. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia semua warga negara mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk berkarya demi terwujudnya kesejahteraan bersama sebagai warga negara bangsa Indonesia.

Kebersamaan kita sebagai warga negara bangsa dengan tidak memandang latar belakang perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan kepentingan perlu dibina dan ditata sehingga maksud untuk menciptakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi terjadinya pembauran total secara nasional baik di bidang budaya, ekonomi, dan politik dapat terwujud.

Dalam proses ini pemerintah memegang peranan yang penting dan menentukan. Gaya politik yang dimiliki oleh para pemimpin bangsa umumnya dan aparatur pemerintah khususnya harus menunjukkan ciri-ciri pemersatu. Artinya, mereka dalam sikap, perilaku, dan konsep-konsep pemikiran yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau lainnya tidak boleh menggeneralisasi suatu kelompok masyarakat dan bersifat diskriminatif. Di pihak lain masyarakat harus dibina agar kesetiaan yang terlalu kuat pada ikatan-ikatan primordial yang menimbulkan sikap prasangka tidak menjadi faktor penghambat terjalinnya komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh toleransi. Dengan cara ini kita membina dan mempersiapkan kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga pada saatnya nanti kita benar-benar akan menjadi satu bangsa baru, yaitu satu bangsa Indonesia yang utuh.

Perundang-undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia: Sarana Efektif atau Kendala Pembauran Bangsa?

H. Anton DJAWAMAKU*

PENDAHULUAN

Masyarakat bangsa Indonesia yang lahir sejak proklamasi kemerdekaan negara pada tanggal 17 Agustus 1945, secara faktual adalah suatu masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras ataupun golongan. Dengan proklamasi itu masyarakat majemuk yang merupakan warisan masa lampau ini, hendak dileburkan menjadi suatu masyarakat bangsa dengan kesatuan warga negara yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah pembauran bangsa telah tampil sejak terbentuknya negara Republik Indonesia dan hingga kini masih tetap meminta perhatian kita semua. Dalam GBHN 1983 dikatakan bahwa usaha-usáha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkuuh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional.¹

Salah satu sarana untuk mewujudkan proses pembauran tersebut adalah peraturan-peraturan yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui peraturan-peraturan ini, orang-orang bangsa lain ataupun peranakan yang hendak menjadi warga negara Republik Indonesia dapat didorong untuk membaurkan diri dengan warga bangsa Indonesia lainnya. Tulisan ini membahas perundang-undangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apakah

*Staf CSIS.

¹Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan MPR RI Tahun 1983 dan Pidato Pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris MPR RI tanggal 1 Maret 1983, *Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7)*, (Jakarta: 24 Maret 1983), hal. 105.

benar-benar menjadi sarana efektif pembauran bangsa ataukah justru menjadi kendala bagi proses pembauran tersebut. Dalam hubungan itu titik berat perhatian diletakkan pada pokok-pokok pikiran mengenai kewarganegaraan di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN RI

Warga negara adalah anggota negara. Keanggotaan dalam negara atau kewarganegaraan menunjukkan kedudukan, hak dan kewajiban seorang anggota atau warga dari suatu negara. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing atau orang bangsa lain. Dari sudut hukum, kewarganegaraan menunjukkan ikatan hukum seseorang dengan negara dan dengan demikian ia berada dalam lingkungan kekuasaan dari negara bersangkutan. Pengertian ini sekaligus membatasi lingkungan kekuasaan negara lain terhadap orang tersebut. Pokok-pokok pikiran mengenai Warga Negara dan Kewarganegaraan Republik Indonesia telah digariskan di dalam UUD 1945, kemudian diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.

Sebelum membicarakan hal-hal lain yang berkenaan dengan warga negara, baiklah lebih dahulu diketahui siapakah warga negara RI menurut UUD 1945. Ketentuan-ketentuan UUD 1945 mengenai warga negara tidak hanya terdapat di dalam Bab X tentang Warga Negara. Di luar bab itu terdapat ketentuan-ketentuan mengenai warga negara, bahkan Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan landasan dan arah pengaturan warga negara. Jadi untuk memahami siapa warga negara Indonesia secara tepat berdasarkan UUD 1945, tidak dapat terlepas dari pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, ketentuan-ketentuan mengenai warga negara di dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat kalimat yang menyatakan: "... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Dari perumusan itu dapat disimpulkan bahwa *segenap bangsa Indonesia* adalah sendi pendukung negara Indonesia. Yaitu bangsa yang perjuangan kemerdekaannya adalah atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana tampak dalam perumusan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Bung Karno menunjukkan bahwa bangsa adalah persatuan antara orang dan tanah airnya. Yaitu orang-orang yang memiliki rasa kesatuan dan berkeinginan bernegara sendiri di atas

tanah airnya.¹ Wilayah tanah air tersebut adalah bekas Hindia Belanda sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kemudian ditambah lagi dengan bekas koloni Portugis di Timor Timur pada tahun 1976, berdasarkan kehendak rakyat di daerah itu dalam rangka dekolonialisasi.¹

Jadi segenap bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 ialah Bangsa (Indonesia) yang berdiam di dalam daerah Negara Indonesia, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negaranya dan daerah negara tersebut adalah tanah airnya. Bangsa yang dimaksudkan ini tidak hanya terdiri dari suku-suku bangsa, tetapi juga golongan peranakan yang menghendaki Negara Indonesia merdeka. Mereka ini semua warga negara Indonesia yang pengertiannya di dalam Batang Tubuh UUD 1945 disebut "orang Indonesia asli." Pokok-pokok pikiran mengenai bangsa Indonesia di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, kemudian menjelma di dalam pasal-pasal mengenai warga negara di dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Pasal 26 UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:

- "(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan Undang-Undang."

Dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai pasal 26 ayat 1 dikemukakan bahwa:

"Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara."

Sementara itu di dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa:

"Presiden ialah orang Indonesia asli."

Dari ketentuan-ketentuan tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia dilihat dari status kewarganegaraan penduduknya terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sementara itu warga negara Indonesia masih dapat dibedakan lagi antara warga negara Indonesia asli dan warga negara Indonesia yang ber-

¹Lihat Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai pidato Lahirnya Pancasila, dalam Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Yayasan Prapanca, 1959), I, hal. 69-73.

²Hal ini dapat diketahui dari Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 Nopember 1975, Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili pada tanggal 31 Mei 1976 dan disampaikan kepada Pemerintah RI pada tanggal 7 Juni 1976. Penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam RI telah disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976. Kemudian MPR-RI melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 telah mengukuhkan penyatuan wilayah tersebut.

dasarkan proses pewarganegaraan (naturalisasi). Kalau demikian apakah UUD 1945 berjiwa rasialistis dan menganjurkan diskriminasi rasial?

Kalau kita amati secara saksama kedua pasal UUD itu, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian "orang Indonesia asli" di dalam pasal 6 ayat 1 itu adalah warga negara Indonesia dalam arti *kewarganegaraan* (ketatanegaraan). Sedangkan di dalam pasal 26 ayat 1, dapat ditegaskan bahwa pengertian "bangsa" mempunyai makna tertentu. Tampaknya pengertian *bangsa* dalam pasal ini diartikan secara sempit, yaitu bangsa sebagai ras, sebagai golongan etnis bukan bangsa dalam artian nation; hal ini menunjuk kepada pembagian golongan penduduk di dalam pasal 163 IS, sehingga pengertian "bangsa Indonesia asli" di dalam pasal 26 ayat 1 itu adalah *Indonesiers/bumi-putra*. Dengan demikian tampaknya secara sadar para pembuat UUD kita memberi makna yang berbeda antara perkataan "orang Indonesia asli" di dalam pasal 6 ayat 1 dan "orang-orang bangsa Indonesia asli" di dalam pasal 26 ayat 1. Oleh karena itu perkataan "orang" dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan pengertian kewarganegaraan (ketatanegaraan); sedangkan pengertian "bangsa" di dalam pasal 26 ayat 1 menjelaskan pengertian golongan penduduk Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 IS.

Menurut Bapak *Sayuti Melik*, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan:

"... kata 'asli' dalam UUD 1945 pasal 6 ayat 1: 'Presiden ialah orang Indonesia asli,' adalah hasil penyempurnaan dari rumusan sebelumnya, yang setelah disetujui lalu disahkan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan sebelumnya secara lengkap berbunyi: 'Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam.' Penyempurnaan ini adalah bagian dari penyempurnaan terhadap Pembukaan UUD, Batang Tubuh dan Penjelasannya, yang setelah disetujui lalu disahkan menjadi UUD 1945 yang berlaku sekarang ini dan seterusnya ..."

"... perlu diketahui bahwa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zunbi Tyosakai) begitu juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang; dan dengan adanya usul Mijima (pembantu Laksamana Maeda yang mendekati Bung Hatta agar menebut sisipan tujuh kata dalam Pembukaan UUD) tersebut, tampak jelas bahwa Jepang ingin memainkan peranan penting dalam negara yang baru di-proklamasikan ini. Oleh karena itu perkataan 'asli' dengan sadar dicantumkan dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945 adalah untuk mencegah jangan sampai orang Jepang menjadi Presiden dan Indonesia menjadi negara 'boneka' Jepang ..."

"Sayangnya waktu pembahasan UUD pada saat itu sangat sempit, sehingga banyak hal tidak dijelaskan, di antaranya perkataan 'asli' dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945 itu ..."!¹

Kemudian dalam rangka kembali ke UUD 1945, "pengertian asli" di dalam UUD 1945 itu diperdebatkan lagi di dalam sidang-sidang Konstituante. Bahkan sementara orang beragitasasi seolah-olah UUD 1945 berjiwa rasialistis

¹Lihat Sayuti Melik, "Sangkan Paraning Dumadi Pancasila," *Suara Karya*, 25 September 1981.

dan menganjurkan diskriminasi rasial. Dalam sidang Konstituante tanggal 11 Mei 1959, Ketua Fraksi Nasional Progresif, Siauw Giok Tjhan (Ketua Umum Baperki) menyatakan sikapnya bahwa dalam menilai pasal 6 ayat 1 UUD 1945, tidak boleh dilepaskan dari jiwa, semangat dan tujuan UUD 1945 secara keseluruhan, di samping memperhatikan sejarah perkembangan perjuangan kemerdekaan yang menyebabkan adanya rumusan seperti itu. Setelah memberi alasan yang senada dengan penjelasan Bapak Sayuti Melik di atas, ia menegaskan bahwa menurut sejarah adanya pasal 6 UUD 1945, sama sekali tidak didorong oleh nafsu atau keinginan untuk mengadakan diskriminasi rasial.¹ Jawaban pemerintah yang diwakili oleh PM Ir. H. Djuanda pada Sidang Ke-1 Rapat ke-15 tanggal 21 Mei 1959 menyatakan:

"..., Pemerintah mengulangi pernyataannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945 tidak dapat dipergunakan untuk mengadakan diskriminasi rasial."²

Kalau demikian halnya, siapakah warga negara Indonesia asli itu? Warga negara Indonesia asli adalah orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia *semenjak Republik Indonesia lahir* atau yang menjadi warga negara Indonesia *bersamaan* dengan lahirnya negara Republik Indonesia. Ini pengertian secara yuridis konstitusional, bukan anggapan sosiologis, kultural, psikologis, dan lain-lain. Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi semua orang penduduk wilayah Republik Indonesia yang sejak tanggal 17 Agustus 1945 menjadi warga negara Republik Indonesia, adalah *Warga Negara Indonesia asli*, warga negara Indonesia yang original, warga negara Indonesia yang sejak semula, bukan warga negara Indonesia tambahan, bukan warga negara Indonesia yang kemudian datangnya!³

Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah mereka ini? Secara *yuridis historis*, mereka ini adalah orang-orang yang menurut pasal 163 IS disebut: golongan *bumiputera/Indonesiers*; dan yang berdasarkan UU No. 3/1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang diundangkan pada tanggal 10 April 1946 tetapi *berlaku surut* semenjak 17 Agustus 1945, orang-orang penduduk wilayah Indonesia yang termasuk golongan *Timur Asing* (Tionghoa, Arab dan lain-lain) serta golongan *Eropa*, yang *tidak secara eksplisit* menolak kewarganegaraan Republik Indonesia (sistem pasif). Mereka ini semua adalah warga negara Indonesia asli secara yuridis konstitusional. Di antara mereka ini apakah yang keturunan asing dianggap *asli* secara biologis, etnis, psikologis, sosiologis, kultural dan lain sebagainya itu adalah masalah lain.

¹Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, II, 1960, hal. 756-775.

²Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, III, 1960, hal. 322.

³Lihat Harry Tjan Silalahi, "Beberapa Catatan Mengenai Perkataan 'Asli' pada UUD 1945," *Mimbar BP-7*, No. II Tahun II, 1983.

Dengan demikian, di samping mereka yang disebut bumiputera, golongan peranakan yang telah memenuhi persyaratan konstitusi, yaitu: bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia, adalah warga negara Indonesia asli. Persyaratan konstitusi itu adalah dalam arti telah menghayati kebudayaan dan cita-cita rakyat Indonesia, telah merasa bersatu (manunggal) dengan tanah yang menimbulkan perasaan cinta Tanah Air dan secara sosiologis diterima sebagai anggota masyarakat Indonesia. Jadi pewarganegaraan bagi mereka berdasarkan UU No. 3/1946 hanya sekedar pengakuan, bahwa "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" sesuai dengan ungkapan yang terdapat pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, orang tersebut adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia asli.

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa dilihat dari sudut kewarganegaraan, di samping pribumi juga terdapat orang-orang dari golongan peranakan yang menjadi warga negara Indonesia asli. Mereka ini semua tentu saja berhak menjadi Presiden RI sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945. Akan tetapi bagaimakah hal itu di dalam riil-politik adalah masalah lain. Sebab jabatan kepresidenan mempunyai mekanisme dan pertimbangan politis, yang tidak semata-mata mendasarkan diri pada tafsir pengertian pasal-pasal UUD 1945 itu. Sementara itu terdapat orang-orang dari golongan peranakan yang menjadi warga negara Indonesia karena naturalisasi berdasarkan undang-undang kewarganegaraan RI, di samping mereka yang menjadi warga negara asing ataupun tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian menggeneralisasi semua golongan peranakan sebagai "non-pri," berarti memperlakukan sikap yang sama terhadap mereka semua yang sebenarnya memiliki status kewarganegaraan yang berbeda-beda. Hal ini sama tidak adilnya dengan memperlakukan sikap yang berbeda-beda terhadap orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan yang sama.

SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Warga negara RI adalah pendukung negara RI. Oleh karena itu maka setiap warga negara RI harus mendukung Dasar Negara RI dan pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila) serta menghayati bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tersebut adalah sumber kejiwaan masyarakat dan negara RI. Dari pasal 26 ayat 1 UUD 1945 diketahui bahwa orang-orang bangsa lain pun dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Penjelasan UUD 1945 mengenai pasal tersebut menegaskan bahwa: "Orang-orang bangsa lain ... yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi Warga Negara."

Dengan demikian tampaklah bahwa konstitusi UUD 1945 menentukan persyaratan untuk orang-orang bangsa lain harus lebih dahulu secara sosio-kultural menjadi orang Indonesia, baru kemudian dapat diterima menjadi warga negara RI. Persyaratan konstitusional tersebut harus dijelaskan atau diperinci lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia. Di samping syarat-syarat konstitusi itu, berdasarkan pasal 26 ayat (2) UUD 1945 terdapat pula syarat-syarat tambahan mengenai kewarganegaraan yang ditetapkan dengan undang-undang. Syarat yang terakhir ini dapat disebut "syarat undang-undang." Jadi bagi orang-orang bangsa lain ataupun keturunan asing yang hendak menjadi warga negara Indonesia, harus memenuhi baik persyaratan konstitusional maupun persyaratan undang-undang.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimanakah syarat konstitusi dan syarat undang-undang itu dijabarkan dalam undang-undang kewarganegaraan kita? Sebagai pelaksanaan pasal 26 UUD 1945, sejak tanggal 10 April 1946 berlakulah UU No. 3/1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia. Yang menjadi warga negara RI menurut undang-undang ini dirumuskan di dalam pasal 1, 2 dan 3. Secara singkat mereka adalah:

- a. Penduduk asli Indonesia yang secara otomatis dengan tidak ada pilihan lain menjadi warga negara Indonesia. Hal ini menunjuk kepada asas ius sanguinis.¹
- b. Orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit lima tahun terakhir berturut-turut dan berumur 21 tahun atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia (pasal 1 ayat b UU No. 3/1946). Hal ini menunjukkan asas ius soli.²
- c. Karena naturalisasi; pengangkatan anak; perkawinan wanita asing dengan WNI; dan karena mengikuti status ayah dan ibu atau status ayah atau status ibu.

Jadi berdasarkan UU No. 3/1946, orang-orang bangsa lain/peranakan yang telah memenuhi syarat-syarat konstitusi, kemudian diperinci lebih lanjut dalam pasal 1 ayat b sebagai syarat undang-undang, adalah warga negara Indonesia, meskipun pada saat itu mereka tidak mengetahuinya. Walaupun seandainya mereka mengetahuinya dan tidak menghendaki kewarganegaraan RI, namun penentuan itu tetap berlaku bagi mereka. Setelah mereka ditentukan sebagai warga negara barulah kepadanya diberi kesempatan untuk menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk mengajukan pernyataan tertulis me-

¹Yang dimaksudkan dengan asas Ius Sanguinis ialah bahwa kewarganegaraan seseorang pada dasarnya ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan.

²Sedangkan yang dimaksudkan dengan asas Ius Soli ialah bahwa pada dasarnya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.

nolak kewarganegaraan Indonesia kepada Menteri Kehakiman, melalui Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggalnya, satu tahun setelah berlakunya UU No. 3/1946.

UU No. 3/1946 ini kemudian diubah dengan UU No. 6/1947. Salah satu perubahan yang terpenting adalah bahwa UU No. 3/1946 dinyatakan berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya dilakukan lagi beberapa kali perubahan terhadap undang-undang tersebut untuk memberi kesempatan kepada golongan peranakan/orang-orang bangsa lain menggunakan hak repudiasinya. Yang terakhir adalah dengan UU No. 11/1948 dinyatakan bahwa semua pengajuan pernyataan yang berhubung dengan kewarganegaraan berakhir hingga tanggal 17 Agustus 1948. Dengan berakhirknya hak repudiasi itu, penduduk Indonesia hanya terdiri dari dua golongan, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Sejak tanggal 17 Agustus 1945, orang-orang asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi WNI asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 UU No. 3/1946 jo UU No. 6/1947.

Dalam Pasal 5 ditentukan bahwa kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberi naturalisasi itu. Juga disyaratkan umur 21 tahun atau telah kawin, bertempat kedudukan dan bertempat kediaman di dalam daerah negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir dan cakap berbahasa Indonesia, bersumpah atau berjanji kepada negara Indonesia di hadapan Pengadilan Negeri. Setelah menjalankan sumpah atau janji, saat itu juga Pengadilan Negeri memberikan Kartu Bukti WNI. Dapat juga kewarganegaraan RI diberikan dengan alasan kepentingan negara (pasal 7). Naturalisasi yang demikian ini tidak memerlukan syarat-syarat seperti status, tempat kedudukan atau kediaman di dalam daerah negara RI dan cakap berbahasa Indonesia. Oleh karena Pasal 5 menentukan bahwa kewarganegaraan berlaku dengan undang-undang, maka selama berlaku UU No. 3/1946, ada 9 orang yang diwarganegarakan dengan 9 buah undang-undang pula.¹

Dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah perubahan ketentuan mengenai kewarganegaraan RI berdasarkan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RIS dan Kerajaan Belanda. Salah satu konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah bahwa golongan peranakan diberi kesempatan dua tahun (27 Desember 1949 - 27 Desember 1951) untuk secara aktif memilih atau menolak kewarganegaraan Indonesia (hak opsi).² Hal ini membawa akibat bahwa golongan peranakan

¹Lihat Sudargo Gantama, *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Alumni, 1973), hal. 80.

²Lihat "Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara" dalam *Himpunan Peraturan Kebijaksanaan Masalah Cina* (Departemen Pertahanan Keamanan, Maret 1980), hal. 86-89.

Cina yang berdasarkan UU No. 3/1946 telah menjadi WNI tanpa perlu mengajukan pernyataan, dengan peraturan baru itu dianggap belum menjadi warga negara sampai saat mereka mengadakan pilihan secara aktif. Pada tahun 1953 barulah dapat diketahui hasil opsi tersebut. Sementara peneliti mengatakan bahwa sekitar 600.000 hingga 700.000 orang golongan peranakan Cina atau sekitar 40% yang secara formal telah menolak kewarganegaraan Indonesia.¹

Perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap memberlakukan peraturan perundangan mengenai kewarganegaraan sebelumnya, selama belum diadakan yang baru menurut UUD tersebut.² Sementara itu pemerintah RRC mengklaim bahwa semua orang-orang Cina di seberang lautan adalah warga negaranya. Akibatnya terjadilah kewarganegaraan rangkap (Bipatrike) bagi orang-orang Cina di Indonesia yang telah menjadi WNI.³ Untuk mengatasi hal itu pada tanggal 22 April 1955 telah ditandatangani perjanjian antara RI-RRC atau yang dikenal sebagai Perjanjian Soenario-Chou. Dalam perjanjian ini antara lain ditegaskan bahwa orang-orang Cina di Indonesia diwajibkan untuk melakukan pilihan dengan tegas dan secara tertulis, apakah akan tetap menjadi warga negara Indonesia. Kesempatan untuk itu diberikan dalam jangka waktu dua tahun. Perjanjian Soenario-Chou itu kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 1958.⁴

Akan tetapi pada awal pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang No. 2 Tahun 1958 itu dengan segala peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dengan Undang-Undang No. 4/1969 yang mulai berlaku pada tanggal 10 April 1969.⁵ Dalam undang-undang yang baru ini ditegaskan bahwa mereka yang te-

¹ Hal ini dikemukakan oleh David Mozingo dalam *Chinese Policy Towards Indonesia, 1949-1967* (Cornell University Press, Ithaca and London, 1976), dan dikutip oleh B.P. Paulus; *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945*, Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 233.

² Lihat UUD 1950 pasal 5 ayat 1 dan Ketentuan Peralihan pasal 144.

³ Masalah dwi-kewarganegaraan ini sebenarnya telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda. Pada tahun 1909 Pemerintah Cina mengumumkan Undang-undang Kewarganegaraan yang menganut asas Ius Sanguinis. Setahun kemudian (1910) Pemerintah Belanda berhasil membentuk Undang-Undang Kekaulanegaraan Belanda yang menganut asas Ius Soli. Pembedaan ini berlangsung terus dan baru mulai diselesaikan pada tahun 1955 antara Pemerintah RI dan RRC. Lihat J.A.C. Mackie dan Charles A. Coppel, "Suatu Survei Awal Masalah Cina di Indonesia," dalam B.P. Paulus (penyusun), *Masalah Cina, Hasil Penelitian Ilmiah di Beberapa Negara Asia dan Australia* (Bandung: PT Karya Nusantara; 1976), hal. 18-22.

⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian Antara RI dan RRC Mengenai Dwi-Kewarganegaraan, dimuat di dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 5 Tahun 1958.

⁵ Lihat *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 17 Tahun 1969 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 2891.

lah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 2/1958 tetap menjadi warga negara Indonesia, demikian pula anak-anaknya yang telah dewasa dan untuk selanjutnya mereka tunduk kepada Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Alasan untuk mencabut undang-undang tersebut, oleh karena terdapat ketentuan-ketentuan di dalamnya yang memberikan perlakuan khusus terhadap golongan Cina dalam waktu yang agak lama. Diperkirakan bahwa sampai dengan tahun 1978 akan ada orang yang menukar kewarganegaraan RRC dengan kewarganegaraan RI ataupun sebaliknya. Hal ini akan menyita perhatian administrasi yang tidak sedikit, menciptakan suasana politis-psikologis yang kurang sehat.

Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah pelaksanaan dari Pasal 5 ayat 1 UUD Sementara 1950.¹ Syarat-syarat kewarganegaraan dalam undang-undang ini tampaknya lebih menitikberatkan pada asas Ius Sanguinis, tetapi dalam hal-hal tertentu tetap menggunakan asas Ius Soli. Hal ini dapat diketahui dari Penjelasan Umum undang-undang tersebut yang mengatakan: "keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warga negaranya di mana pun ia dilahirkan, apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara yang bersangkutan (pasal 1 ayat b-e). Sedangkan asas Ius Soli hanya khusus bagi mereka atau anak-anak yang lahir di wilayah RI, yang kedua orang tuanya tidak diketahui atau orang tuanya tidak berkewarganegaraan, atau mungkin juga belum mendapat kewarganegaraan dari negara orang tuanya (pasal 1 ayat f-i).

Di samping kedua asas tersebut, terdapat pula tiga prinsip yang terkandung dalam UU No. 62/1958 ini. *Pertama*, prinsip untuk menghilangkan kelebihan-kelebihan kewarganegaraan (bipatriide - multipatriide). *Kedua*, prinsip untuk mencegah timbulnya keadaan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (apatride). *Ketiga*, prinsip kewarganegaraan RI tunggal bagi warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 Peraturan Penutup). Sedangkan materi yang diatur dalam undang-undang ini pada pokoknya meliputi: (a) perihal status orang-orang yang sudah menjadi warga negara sebelum peraturan undang-undang ini mulai berlaku, yaitu warga negara berdasarkan penentuan undang-undang; (b) cara-cara memperoleh kewarganegaraan; dan (c) mengenai hilangnya kewarganegaraan.

Warga negara karena penentuan undang-undang. UU No. 62/1958 pasal 1 ayat a berbunyi:

"Warga Negara Republik Indonesia ialah: orang-orang yang berdasarkan perundangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus sudah warga negara Republik Indonesia."

¹ Dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 113 Tahun 1958 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 1647.

Siapakah mereka ini? Yaitu orang-orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 3/1946 dan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RIS dan Kerajaan Belanda. Termasuk di dalamnya golongan peranakan Cina, kecuali mereka yang pada masa opsi secara formal menolak kewarganegaraan RI. Di samping pasal 1 ayat a, juga yang memenuhi pasal 1 ayat b-j UU No. 62/1958 adalah mereka yang menjadi warga negara karena penentuan undang-undang.

UU No. 62/1958 menentukan kriteria untuk memperoleh kewarganegaraan RI sebagai berikut: (a) karena kelahiran berdasarkan keturunan dan kelahiran di dalam wilayah RI; (b) karena pengangkatan anak warga negara asing yang belum berumur 5 tahun oleh WNI yang dilakukan secara sah; (c) karena permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 dan 4 UU No. 62/1958; (d) karena pewarganegaraan/naturalisasi; (e) karena atau sebagai akibat dari perkawinan; (f) karena turut ayah atau ibunya; dan (g) karena pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia. Kriteria-kriteria tersebut pada dasarnya membuka kesempatan yang lebih luas bagi penduduk Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan RI, sekaligus hendak melenyapkan dwi-kewarganegaraan dan mencegah terjadinya status tanpa kewarganegaraan. Berdasarkan semangat itu pula, kewarganegaraan RI dengan cara naturalisasi dapat diperoleh dengan keputusan Menteri Kehakiman saja. Syarat-syaratnya adalah: berumur 21 tahun, lahir di Indonesia, kalaupun lahir di luar negeri yang bersangkutan telah menetap di Indonesia lima tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut selama sepuluh tahun, cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia.

Di samping itu, UU No. 62/1958 juga membuka kesempatan bagi mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan RI untuk menjadi warga negara RI kembali. Pasal 16 menentukan bahwa seorang anak yang turut kehilangan kewarganegaraan RI, dapat memperolehnya kembali dengan menyatakan keterangan untuk itu, dalam waktu satu tahun setelah ia berumur 18 tahun. Selanjutnya pasal 18 membuka kesempatan bagi yang kehilangan kewarganegaraan RI menurut ketentuan pasal 17 ayat k. Mereka ini dapat memperoleh kewarganegaraan RI jika bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggalnya dalam waktu satu tahun.

Ketentuan pasal 17 ayat k yang wajibkan kepada WNI yang berdiam di luar negeri untuk melapor kepada Perwakilan RI, ternyata tidak dapat dipenuhi oleh WNI yang berdiam di Taiwan. Oleh karena RI tidak mengakui ROC (Republic of China) dan karenanya tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara. Walaupun demikian sejak tanggal 1 Nopember 1969, pemerintah menempuh kebijaksanaan yang memungkinkan eks-WNI dari

Taiwan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI; yaitu mereka dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh visa berdiam di Indonesia. Yang tiba di Indonesia dengan visa tersebut akan diberikan Kartu Izin Masuk yang dapat digunakan untuk menyatakan keterangan memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 18 UU No. 62/1958.¹

Ketentuan pasal 18 UU No. 62/1958 kemudian diubah dengan UU No. 3/1976. Perubahan ini pada hakikatnya membuka kesempatan yang lebih besar bagi orang-orang Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan RI untuk memperoleh kembali kewarganegaraan tersebut. Walaupun demikian kesempatan ini hanya diberikan kepada mereka yang tinggal di negeri Belanda, Suriname dan Antillen Belanda, dan kehilangan kewarganegaraan mereka adalah semata-mata akibat yang ditimbulkan oleh sengketa Irian Barat. Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa kesempatan yang baru ini tidak dapat digunakan oleh orang-orang Cina Hoa Kiao.²

Di samping pasal 1.7 ayat k, ayat-ayat yang lain (a-j) dari pasal tersebut juga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan RI. Sementara itu kiranya perlu dicatat bahwa UU No. 62/1958 juga menentukan bahwa seorang anak WNI yang diangkat anak secara sah oleh orang asing (WNA), maka anak tersebut tidak lagi menjadi warga negara Republik Indonesia.

CATATAN PENUTUP

Pokok-pokok pikiran mengenai kewarganegaraan Indonesia dalam UUD 1945, menegaskan bahwa orang-orang bangsa lain dapat menjadi warga negara RI apabila memenuhi syarat konstitusi dan syarat undang-undang kewarganegaraan RI. Syarat konstitusi itu harus dijelmakan dalam pelbagai peraturan perundangan kewarganegaraan RI. Dalam hubungan itu ada dua undang-undang yang menjadi sarana utama untuk memperoleh kewarganegaraan RI, yaitu UU No. 3/1946 dan UU No. 62/1958.

UU No. 3/1946 adalah produk legislatif pertama yang bermaksud menjelaskan jiwa dan semangat UUD 1945 dalam pengaturan kewarganegaraan RI setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan ternyata bahwa persyaratan-persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan RI di dalam undang-undang ini, tidak sepenuhnya menjelmakan

¹Lihat "Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.M./4/6 tentang Kebijaksanaan Mengenai Warga Negara RI Keturunan Taiwan," dalam *Himpunan Peraturan-peraturan Kewarganegaraan RI* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1971), hal. 186-1987.

²Lihat di dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 20 Tahun 1976 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 3077.

syarat-syarat konstitusi UUD 1945. Hal ini tampak dari perumusan di dalam pasal 5 UU No. 3/1946 yang hanya memberikan persyaratan umur, tempat kedudukan dan kediaman serta cakap berbahasa Indonesia bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia. Demikian juga halnya dengan kewarganegaraan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, tidak ternyata dalam lafal sumpah atau janji setia ketika permohonan untuk menjadi WNI dikabulkan (pasal 5 ayat 7 UU No. 3/1946).

UU No. 62/1958 merupakan pelaksanaan dari pasal 5 UUD Sementara 1950. Adalah menjadi cita-cita negara menurut UUD Sementara ini untuk mempersatukan segala golongan Bangsa menjadi satu Bangsa yang "homogen."¹ Oleh karena itu bangsa dalam arti etnik tidak mendapat penekanan dalam UUD Sementara, sebab bangsa yang mendukung dan mendirikan negara RI adalah *segenap bangsa Indonesia*. Dari keterangan Pemerintah pada saat membahas UU No. 62/1958, jelas sekali bahwa negara RI 1950 tidak didukung oleh bangsa Indonesia dalam arti etnik. Karena telah terleburnya orang-orang yang asli dalam negara Indonesia dengan turunan orang-orang bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara dengan UU No. 3/1946, kemudian ditetapkan dalam pasal 1a UU No. 62/1958.² Jadi yang hendak dijabarkan oleh konstitusi UUD Sementara 1950 adalah kesatuan warga negara RI dalam arti yang sedalam-dalamnya.

Akan tetapi persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan RI sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 UU No. 62/1958, belum menimbulkan kepastian bahwa dengan syarat-syarat itu orang-orang bangsa lain dapat meleburkan diri secara sosio-kultural dalam kesatuan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain persyaratan tersebut tidak mendorong orang-orang bangsa lain untuk membaurkan diri sedemikian rupa sebagai syarat mutlak untuk kesatuan warga negara. Sementara itu pada lafal sumpah atau janji setia untuk menyatakan ikatan dengan negara RI, juga tidak dinyatakan "dengan berkat dan rahmat Tuhan" sebagaimana terdapat dalam Mukadimah UUD Sementara 1950. Jelaslah bahwa pemberian kewarganegaraan RI berdasarkan UUD No. 62/1958 terlalu dititikberatkan pada persyaratan yuridis, tetapi tidak sepenuhnya didasarkan pada landasan yuridis konstitusional.

Oleh karena UU No. 62/1958 masih tetap berlaku hingga kini, perlu juga dikaji sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut masih sesuai dengan syarat-syarat konstitusi UUD 1945. Sebab tekad Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi dalam pelbagai segi kehidupan bangsa dan negara. Dilihat dari UUD 1945, ternyata UU No. 62/1958 juga sangat minim dengan syarat-syarat konstitusi

¹Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

²B.P. Paulus, *op. cit.*, hal. 228.

sebagaimana kehendak UUD 1945. Di samping itu terjadi penyimpangan konstitusional dalam hal pewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli *dan* orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kata *dan* tersebut jelas menunjukkan bahwa orang-orang bangsa lain yang menjadi warga negara Indonesia harus disahkan dengan Undang-Undang Pewarganegaraan. Sedangkan UU No. 62/1958 melaksanakan pewarganegaraan tersebut hanya dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Dengan demikian persoalan mengapa orang-orang bangsa lain, seperti keturunan Cina tidak sepenuhnya membaurkan diri dalam masyarakat bangsa Indonesia, salah satu sebabnya adalah undang-undang kewarganegaraan kita sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini tidak mendukung dan mendorong proses pembauran itu. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan untuk pewarganegaraan yang lebih bersifat yuridis (syarat undang-undang) dan sangat minim dengan persyaratan sosio-kultural yang diperintahkan oleh konstitusi. Penjabaran syarat konstitusi itu di antaranya, "cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia" (UU No. 62/1958) atau hanya "cakap berbahasa Indonesia" (UU No. 3/1946). Bahkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang itu memberi kesan seolah-olah pemberian kewarganegaraan hanyalah urusan pribadi anggota masyarakat dengan pemerintah, tanpa konsekuensi sosiologis dan moral warga negara yang bersangkutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya orang-orang bangsa lain dengan mudah menjadi warga negara Indonesia, tanpa berbaur menjadi kesatuan warga negara.

Oleh karena undang-undang kewarganegaraan kita lebih menitikberatkan persyaratan yuridis, maka yang sering menjadi persoalan pokok ialah bagaimana cara untuk mendapatkan surat tanda bukti kewarganegaraan. Karena yang diutamakan hanya masalah cara, maka untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan RI gampang dimanipulasikan, seperti yang telah banyak dilakukan oleh sementara orang keturunan Cina. Manipulasi kewarganegaraan itu lebih dimungkinkan lagi, apabila administrasi warga negara dan orang asing tidak dilakukan secara teratur dan tertib.¹ Akan tetapi pemecahan masalah ini harus dimulai dari sumbernya, yaitu dengan mengadakan undang-undang kewarganegaraan yang baru. Kelalaian kita sebagai bangsa dalam menata kesatuan warga negara selama ini telah dibayar dengan sangat mahal. Tidak hanya dengan terjadinya pelbagai peristiwa SARA dan kerugian material, tetapi juga kerugian moral yang tak ternilai.

¹Uraian terperinci mengenai manipulasi kewarganegaraan ini dapat dibaca dalam B.P. Paulus, *ibid.*, hal. 288-299.

Latar Belakang Sosio-Historis Kelompok Keturunan Cina di Indonesia

Onny. S. PRIJONO*

Sejarah telah menunjukkan bahwa pedagang dan pelaut Cina datang ke Indonesia sejak dahulu, bahkan sebelum masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya di Palembang dalam abad ke-6 sampai ke-12. Kontak pertama orang Cina dengan penduduk asli di negara-negara Asia Tenggara diperkirakan pada abad ke-3 SM, yaitu pada waktu tentara Cina berada di Tonkin dan Aman. Dari daerah-daerah ini mereka menuju Kamboja, Siam dan melalui jalan laut terus ke Semenanjung Malaysia, Sumatera sampai di Pulau Jawa.¹ Hasil peninggalan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa membuktikan adanya hubungan sejak permulaan Dinasti Han.² Pada masa Dinasti Jin Timur, Pendeta Budha Fa Hsien (Fa Hien) dalam perjalanannya ke India singgah di Pulau Jawa (Jawadwipa) dan Semenanjung Malaysia. Karyanya yang berjudul Fo Guo Ji (Hikayat Kerajaan Budha) menyebutkan adanya hubungan baik antara Kanton dan Jawadwipa.³ Dalam abad ke-6, hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya semakin erat dengan adanya persamaan agama, yakni Budha.

Pada waktu Dinasti Tang (618-907) Tiongkok berhasil mengirim ekspedisi militer ke daerah selatan sehingga perdagangan semakin ramai. Pada masa akhir pemerintahan Dinasti ini, orang Cina merantau dan terus menetap di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Daerah pertama yang dikunjungi adalah Palembang yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian para perantau tersebut pergi ke Pulau Jawa untuk men-

*Staf CSIS.

¹Hidayat Z.M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1977, hal. 63.

²Liang Li Ji, "Selayang Pandang Mengenai Indonesia di Tiongkok," *Archipel* 24, 1982, hal. 17.

³Ibid., hal. 17.

cari rempah-rempah. Banyak di antara mereka kemudian menetap di daerah pelabuhan pantai utara Pulau Jawa. Pada masa Dinasti Sung (960-1280) banyak pedagang Cina mengunjungi Asia Tenggara dan ketika armada Cheng Ho (1371-1435) di bawah Dinasti Ching menguasai rute perjalanan di Asia Tenggara¹ banyak juga pedagang Cina yang menetap.

Orang Cina banyak merantau ke Asia Tenggara, karena pada masa Dinasti Ming (1368-1644) jumlah penduduk makin padat dan kehidupan makin sulit yang antara lain disebabkan tuan-tuan tanah menaikkan sewa tanah dan peraturan pemerintah yang menguntungkan mereka. Akibat pemberontakan kaum tani, keamanan makin kacau, terutama setelah timbul pemberontakan dan perang saudara serta penyerbuan dari suku bangsa Mongol.²

Sebetulnya pada Dinasti Ching (1644-1894), berdagang dan bermukim di seberang lautan pada dasarnya dilarang. Walaupun tidak efektif, dalam kenyataannya pusat-pusat imigran berkembang, terutama di Kalimantan Barat dan Bangka. Dalam abad terakhir ini jumlah tersebut makin meningkat dengan pesat, dengan adanya dua gelombang besar imigrasi. Pertama, mengalirnya para buruh Cina ke daerah perkebunan di Sumatera Utara dan Bangka antara tahun 1860 dan 1890; kedua, dalam usaha meningkatkan perdagangan, pemerintah kolonial telah memberi kelonggaran kepada orang Cina untuk berdagang di mana sebelumnya terjadi pembatasan bagi mereka untuk masuk dan menetap di daerah koloni. Akibatnya orang Cina makin tersebar dan heterogen karena pedagang Cina dapat bergerak dengan leluasa ke seluruh kepulauan.³

Pada abad ke-19 para perantau Cina tidak terbatas hanya pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum wanitanya, bahkan dengan seluruh keluarganya. Dengan demikian jumlah orang Cina perantauan ini makin banyak dan proses asimilasi yang tadinya sering dilakukan oleh orang Cina perantauan dengan penduduk setempat menjadi kurang, bahkan akhirnya menutup diri dan membentuk golongan tersendiri lengkap dengan kehidupan tradisionalnya.⁴

Jika keseluruhan daerah luar Jawa dibandingkan dengan Pulau Jawa, maka tampak bahwa persentase orang Cina lebih besar di luar Jawa dan lebih tersebar di pedesaan. Daerah pemusatan yang paling padat, yaitu di mana

¹Hidayat Z.M., *op. cit.*, hal. 155.

²Ibid., hal. 155.

³J.S. Furnivall, *Netherlands India*, (Cambridge, 1944), hal. 408-409; J.A.C. Mackie, *The Chinese in Indonesia*, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976, hal. 4; B.P. Paulus, *Masalah Cina*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1978, hal. 11-12.

⁴Hidayat Z.M., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hal. 61.

orang Cina merupakan seperlima atau lebih dari jumlah seluruh penduduknya, ialah: Kalimantan Barat (29,5%), Belitung (25,2%), Kepulauan Riau (27,9%) dan Bangka (32,0%).¹ Mereka ini juga sangat banyak terdapat di pantai timur Sumatera, mulai dari Deli dan Medan, terus ke selatan sampai Bengkalis. Di semua daerah tersebut ada daerah-daerah yang lebih kecil, di mana orang Cina merupakan pluralitas etnis, bahkan ada di mana mereka merupakan mayoritas penduduk. Sebagian besar imigran yang datang ke daerah ini mula-mula bermukim di daerah pedesaan untuk bekerja pada pertambangan dan perkebunan, tetapi setelah tambang dan kontrak habis, pekerja Cina di perkebunan digantikan oleh pekerja pribumi dari Jawa. Akibatnya banyak orang Cina memilih untuk menetap di daerah tersebut dan hidup sebagai petani atau nelayan.²

Imigran Cina yang pertama kali datang dalam jumlah besar adalah *Hokkien*. Mereka merupakan golongan terbesar di antara imigran-imigran sampai abad ke-19. Daerah asal mereka ialah Fukien Selatan, suatu daerah yang sangat penting menurut catatan sejarah perdagangan luar negeri Tiongkok. Kecenderungan dalam hal berdagang yang dimiliki kebudayaan Hokkien selama beberapa abad itu masih tampak jelas di Indonesia. Dibandingkan dengan bangsa Cina yang berbahasa seperti Hakka dan Kanton, orang Hokkien ini tidak saja lebih banyak berkecimpung dalam perdagangan, tetapi mereka pun sering lebih berhasil. Lebih dari setengah jumlah orang Hokkien adalah pedagang, tetapi di Jawa Barat dan sekitar Batavia, pantai barat Sumatera sebagian terbesar berkecimpung dalam pertanian dan perkebunan, sedangkan di Bagansiapi-api pada umumnya adalah penangkap ikan. Orang Hokkien dan keturunannya yang sudah berasisimilasi merupakan kelompok terbesar di Indonesia Timur, Jawa Tengah dan Timur, serta di pantai barat Sumatera. Meskipun orang *Hakka* (Kheh) termasuk kelompok besar yang merantau ke luar negeri, sebenarnya mereka bukanlah bangsa maritim. Pusat kampung halamannya yang terletak di pedalaman Propinsi Kwangtung terutama terdiri dari daerah yang berbukit-bukit dan tidak begitu subur. Dibandingkan dengan golongan bahasa lainnya, desakan ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan mereka menjadi emigran. Selama gelombang perpindahan yang besar dari tahun 1850 sampai 1930, orang-orang Hakka merupakan imigran yang paling melarat dari Tiongkok. Mula-mula mereka tertarik oleh daerah-daerah di luar Jawa untuk mengusahakan sumber-sumber mineral, dan sampai kini orang Hakka paling banyak di an-

¹Persentase untuk Kalimantan Barat didasarkan pada penduduk yang terdaftar yang dikumpulkan oleh pemerintah propinsi pada bulan Januari 1956 dan diperoleh di Pontianak. Persentase lainnya didasarkan pada penduduk yang terdaftar untuk tahun 1956 seperti yang tertera di dalam Penduduk Indónesia (Jakarta, 1958); Mely G. Tan (Ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1979, hal. 6.

²Ibid., hal. 6.

tara orang Cina di bekas distrik tambang emas di Kalimantan Barat, sedangkan dialek yang sekarang dipergunakan di Bangka yang bertambang timah itu berasal dari bahasa Hakka. Orang-orang Hakka pertama kali bermukim di Kalimantan Barat sekitar tahun 1740 sampai 1745, kemudian menyebar ke Sumatera Timur, Bangka dan Biliton pada akhir abad ke-19. Tetapi sejak akhir abad ke-19 banyak orang Hakka berdatangan ke Jawa Barat, karena tertarik oleh cepatnya pertumbuhan kota Jakarta dan dibukanya Priangan untuk pedagang-pedagang Cina. Banyak di antara orang Hakka dari Jawa dan Madura adalah pedagang, tetapi mereka juga tertarik pada industri. Dewasa ini jumlah orang Hakka adalah yang terbanyak di antara orang Cina di wilayah Jakarta Raya dan Jawa Barat.

Setelah orang Hakka, jumlah yang banyak adalah orang *Kanton* yang merupakan tetangga orang Hakka di sebelah barat dan selatan di Tiongkok dan berpusat di delta raya Sungai Mutiara atau Sungai Barat itu. Seperti juga orang Hakka, orang Kanton di Asia Tenggara terkenal sebagai pekerja tambang. Perpindahan mereka ke Indonesia pada abad ke-19 pada umumnya menuju ke pertambangan timah di Bangka. Meskipun banyak juga orang Kanton yang mulai datang ke Jawa pada waktu yang sama dengan kedatangan orang Hakka di Jawa, keadaan orang Kanton ini agak berbeda. Umumnya mereka ini datang dengan modal yang lebih besar di samping ketrampilan yang luar biasa untuk bertukang dan berusaha dalam bidang industri. Orang Kanton terkenal sebagai tukang yang trampil. Mereka memanfaatkan hubungan yang erat antara daerahnya dengan orang-orang Eropa di Kanton dan Hong Kong untuk memperoleh rahasia permesinan Barat, dan keberhasilan usaha industri. Dengan demikian orang Kanton menempatkan dirinya di kota-kota di Indonesia sebagai tukang-tukang yang mahir, pekerja mesin, pemilik toko besi atau industri kecil, di samping perannya sebagai pengurus restoran atau hotel. Bidang usaha mereka ini juga terkenal di negara-negara Barat. Kecilnya jumlah orang Kanton dibandingkan dengan orang Hokkien atau Hakka, dan juga menyebarinya lebih merata di seluruh Indonesia, menyebabkan orang Kanton ini kurang penting artinya di kalangan masyarakat Cina di mana-mana di Indonesia. Mereka tersebar di daerah pantai timur Sumatera, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi. Mereka terdapat secara tidak proporsional di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka dan Sumatera Tengah (sekarang Propinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat).

Jumlah yang lebih sedikit dari orang Kanton adalah orang *Teochiu* yang berasal dari sebelah selatan daerah asal orang Hokkien sepanjang pantai Tiongkok. Mereka tinggal di pedalaman Swatow dan sepanjang pantai barat daya kota pelabuhan itu. Meskipun mereka memakai suatu dialek yang masih bisa dimengerti oleh orang Hokkien atau sebaliknya, namun mereka

cenderung untuk menonjolkan perbedaannya setelah tiba dan tinggal di perantauan. Di Indonesia orang-orang Teochiu ini sebagian besar terdapat di luar Jawa. Mereka berkumpul di sepanjang pantai timur Sumatera (di mana pengusaha perkebunan lebih suka mempekerjakan mereka), di Kepulauan Riau, Indragiri, Jambi, Kalimantan Barat Laut, terutama di Pontianak dan distrik-distrik sekitarnya. Secara tradisional bidang spesialisasi mereka adalah pertanian, bahkan sampai sekarang di antara mereka masih banyak yang berkecimpung dalam bidang sayur-mayur dan pertanian komersial lainnya. Tetapi dalam 50 tahun yang terakhir ini orang Teochiu mulai menunjukkan kemajuan yang mantap dalam segala bidang perdagangan, dan di banyak daerah yang sedikit orang Hokkien-nya, orang Teochiu menguasai perdagangan.¹

Pada umumnya orang Cina beragama Konfusius, Budha dan Taoisme. Di samping itu ada juga yang masuk agama Islam. Di Makasar, orang Cina yang beragama Islam membentuk suatu partai yang terkenal dengan nama Partij Tionghoa Islam Indonesia.²

Orang Cina menekankan sistem nilai yang mementingkan kerajinan, hemat, pengandalan pada diri sendiri, semangat berusaha dan ketrampilan, ditambah pula dengan prinsip-prinsip organisasi sosial yang mudah sekali disesuaikan dan digunakan. Hal tersebut menyebabkan mereka berhasil dalam bidang ekonomi di suatu negara yang kaya alamnya, dan yang penduduk aslinya sama sekali berlainan orientasinya.³

Sejak permulaan abad ini dapat dibedakan dua golongan orang Cina di Indonesia, golongan pertama, ialah orang-orang *totok* secara harafiah (darah murni) ialah kaum imigran abad ke-20 dan keturunan langsungnya yang belum begitu berakulturasi, masih berbahasa Cina dan secara kebudayaan berorientasi ke Cina. Golongan kedua, adalah masyarakat *peranakan* yang terdiri dari orang-orang dewasa maupun anak-anak yang dilahirkan di Indonesia, mempunyai orientasi ke Cina yang makin menipis dan mendapat pengaruh kebudayaan pribumi yang makin jelas, menggunakan bahasa pribumi untuk tujuan sehari-hari, dan oleh watak kebudayaannya yang

¹Mely G. Tan (Ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1979, hal. 6-8; Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1951, hal. 445-446.

²Hidayat Z.M., *op. cit.*, hal. 79.

³G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa" dalam Mely G. Tan (Ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1979, hal. 2; Edward J. Ryan, "The Value System of a Chinese Community in Java" (disertasi yang tidak diterbitkan untuk memperoleh gelar doktor dalam anthropologi, Harvard University, 1961).

berbeda maka mereka pada umumnya bukan Cina, bukan pula Indonesia.¹ Perbedaan garis sosial di antara kedua golongan tersebut berlainan dari satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia. Kedua golongan tersebut tidak saling berhubungan bukan karena perbedaan kemurnian etnik, tempat kelahiran, dan bahasa sehari-hari yang dipergunakan oleh orang Cina secara individu, tetapi hal tersebut merupakan suatu perbedaan sosio-budaya. Kepentingan politik dan sosialnya seringkali berbeda pula dan secara relatif kurang berkomunikasi atau memungkinkan suatu hubungan sosial.²

Menurut pengamatan Skinner, kaum totok lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri dan pada umumnya berkecimpung dalam bidang usaha. Sedangkan kaum peranakan yang lebih beraneka ragam bidang pekerjaannya, menunjukkan bahwa mereka suka pekerjaan kejuruan dan pekerjaan administrasi atau menjadi staf di perusahaan-perusahaan besar. Kaum totok lebih menghargai kekayaan, sifat hemat, kerja, kepercayaan pada diri sendiri dan "keberanian" (dalam perdagangan suka berspekulasi) dibandingkan dengan kaum peranakan. Sedangkan kaum peranakan lebih cenderung menikmati hidup, waktu senggang, menghargai kedudukan sosial dan perasaan terjamin daripada kaum totok.³

Di kota besar atau kecil maupun di Jawa, kaum totok berkumpul di daerah pusat perdagangan; dengan ciri khas tinggal di rumah-rumah yang merupakan toko sekaligus tempat tinggal seperti yang juga terdapat di kota-kota di Tiongkok Tenggara. Sebaliknya, kaum peranakan tersebar luas di seluruh kota dan tinggal di rumah-rumah yang tidak asal bisa ditinggali saja. Mereka menunjukkan kesukaan akan rumah bergaya arsitektur Barat modern. Dalam banyak unsur struktur kekerabatan, kaum peranakan mulai meninggalkan ciri-ciri patrilokal, patrilineal dan patriarkal, yang sebenarnya merupakan dasar sistem tradisional Hokkien dan pada umumnya masih merupakan ciri khas yang berlaku di kalangan kaum totok dewasa ini. Ada kecenderungan yang jelas dalam kultus pemujaan leluhur untuk memuja leluhur menurut garis ibu maupun menurut garis ayah. Kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang masih dipusatkan di dalam keluarga menurut urutan generasi dan usia, pada kaum peranakan lebih terbagi sama rata di antara laki-laki dan wanita daripada kaum totok. Sesuai dengan peningkatan kedudukan wanita, kaum peranakan muda tidak menonjolkan bahwa mereka lebih suka sekali pada anak laki-laki daripada wanita, suatu sikap yang masih tampak pada kaum

¹G. William Skinner, *ibid.*, hal. 8; J.A.C. Mackie, *The Chinese in Indonesia*, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976, hal. 5; B.P. Paulus, *op. cit.*, hal. 13.

²J.A.C. Mackie, *ibid.*, hal. 5; B.P. Paulus, *ibid.*, hal. 13.

³G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa" dalam Mely G. Tan (ed.), *op. cit.*, hal. 11.

totok. Dibandingkan dengan kaum totok, kaum peranakan juga lebih sedikit simpatinya terhadap poligami. Kaum peranakan mempunyai keinginan jumlah anak sedikit yang berlawanan dengan keinginan kaum totok. Di antara kaum peranakan maupun totok jarang terdapat perceraian, tetapi setidak-tidaknya dalam sikap mereka, kaum peranakan lebih keras. Kaum peranakan terutama sekali bersifat kekeluargaan. Pada waktu memilih jodoh pertimbangan kekeluargaan dianggap lebih penting daripada di kalangan kaum totok. Pada hakikatnya, perkawinan yang diatur lebih lazim dilakukan di kalangan kaum peranakan. Kaum peranakan juga cenderung lebih nepotistik.¹

Di kalangan kaum peranakan, secara proporsional lebih banyak keluarga yang melakukan upacara pemujaan leluhur dan juga lebih teratur waktunya; suatu kenyataan yang membuktikan bahwa di kalangan kaum totok kekeluargaan tradisional makin kurang dipentingkan dan sekularisasi lebih besar. Dilihat dari sudut kegiatan dan penilaian diri, kaum muda peranakan lebih taat kepada agama. Dibandingkan dengan kaum totok, maka kaum peranakan lebih banyak yang beragama Kristen, karena sekolah-sekolah baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Katolik maupun Protestan, telah melapangkan jalan bagi mereka untuk menjadi Kristen.²

Sebelum orang Belanda datang, orang Cina merupakan pedagang bebas. Sejak Belanda mulai menguasai Indonesia, kehidupan orang Cina banyak dipengaruhi oleh Belanda dan orang Cina hanya diperbolehkan berperan sebagai pedagang perantara, antara rakyat dan orang Belanda. Kebijaksanaan ini diambil Belanda, karena dalam usaha memonopoli mengumpulkan rempah-rempah orang Belanda dalam hal ini VOC, bersaing dengan orang Cina yang telah lama mendominasi perdagangan di Indonesia.

Orang Belanda dengan sengaja mempertajam kehidupan orang Cina menjadi eksklusif. Dengan kebijaksanaan ini Belanda bertujuan supaya baik penduduk pribumi maupun orang Cina supaya hidup dalam suasana tertutup dengan tradisinya yang dikelola oleh sistem pemerintahan masing-masing. Di Batavia khususnya didirikan perkampungan suku-suku bangsa seperti Kampung Jawa, Bali, dan seterusnya di mana setiap warga kampungnya hanya boleh bergaul dalam lingkungannya sendiri. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan denda atau hukuman penjara. Orang-orang Cina ditempatkan di "pecinan" dan diharuskan melaksanakan adat-istiadat tradisional asli Cina supaya tetap berbeda identitasnya dari golongan-golongan lainnya.

Kebijaksanaan pemerintahan Belanda terhadap orang Cina makin berkembang sehingga mereka dapat menempati suatu posisi perantara penting yang disebut Wertheim sebagai "struktur kasta penjajahan" yang berdasar-

¹Ibid., hal. 12-13.

²Ibid., hal. 14.

kan atas sistem stratifikasi rasial di mana orang Cina berada di antara lapisan bawah mayoritas orang Indonesia dan lapisan atas, yaitu orang Eropa. Mereka terlibat khususnya sebagai pengumpul pajak (sehingga mempunyai kesempatan untuk menjalankan pemerasan terhadap rakyat), mengusahakan pegadaian, memonopoli garam dan perdagangan cendu yang dilaksanakan atas nama pemerintahan Belanda. Dari kedudukan-kedudukan penting (key positions) tersebut memungkinkan mereka memperluas jaringan kontak perdangannya menjadi pemberi pinjaman uang, pedagang besar dan pembeli bahan-bahan pokok guna pasaran ekspor, meskipun mereka hanya berhasil mendapat sedikit jalan ke arah sektor kehidupan ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang Belanda, misalnya perkebunan, impor-ekspor, perdagangan secara besar-besaran dan perbankan, sampai masa berakhirnya penjajahan. Orang Cina makin kuat setelah mereka diberikan kedudukan hukum yang setaraf dengan orang Belanda, kecuali dalam tindakan kriminal kedudukan hukum mereka disamakan dengan kedudukan hukum pribumi.¹ Larangan lainnya bagi orang Cina adalah tinggal di desa-desa dan memiliki tanah-tanah.

Pemilikan tanah di luar kota dilarang dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mengatur pembatasan pemilikan tanah hanya kepada orang-orang pribumi saja, kecuali di beberapa tempat di mana orang Cina telah memiliki dan mengolah/mengusahakan tanah sebelum ketentuan/tanggal tersebut ditetapkan. Orang Cina juga dibatasi dalam kegiatan mereka oleh sistem Belanda, seperti diberlakukannya surat jalan (pas) dan pembatasan daerah tempat tinggal. Baru pada tahun 1914-1916 orang Cina diperbolehkan bergerak dan bebas bertempat tinggal. Pada tahun 1919 pembatasan tempat tinggal di daerah Jawa dihapuskan dan pada tahun 1926 penghapusan pembatasan ini lebih diperluas ke daerah-daerah propinsi di luar Pulau Jawa.

Pada waktu J.P. Coen mendirikan kota Batavia (1619) karena kurangnya penduduk, gubernur tersebut mengisinya dengan orang-orang Cina. Kemudian dari Batavia ini orang-orang Cina menyebar ke seluruh pantai utara Pulau Jawa dan masuk ke daerah pedalaman. Tetapi makin luas dan padat penduduk Cina mengkhawatirkan kompeni, sehingga timbulah saling euriga-mencurigai.

Jan Pieterzoon Coen (1618) lebih teliti dalam pengawasannya terhadap orang-orang Cina. Ia mengangkat Beng Kong menjadi kapten pertama untuk mengawasi orang-orang Cina. Di Jawa Tengah Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Mataram dalam rangka membatasi kegiatan orang-orang Cina.²

¹Purell, Victor, *The Chinese in Southeast Asia*, London, 2nd ed., 1965, Ch. 47; J.L. Vlemin, *Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch Indie* (Batavia, 1926); J.A.C. Mackie, *op. cit.*, hal. 4-5.; B.P. Paulus SH, *op. cit.*, hal. 12.

²Hidayat Z.M., *op. cit.*, hal. 77.

Di Semarang pada tahun 1672 orang Cina dipusatkan dan Kwee Kiauw diangkat sebagai kaptennya. Tetapi setelah Batavia didirikan orang Cina harus tinggal di luar benteng. Mereka menanam padi dan tebu serta menjadi pedagang buah-buahan. Gubernur Jenderal J.P. Coen menginginkan orang Cina di Batavia tidak lebih dari 350 orang jumlahnya. Orang Cina kemudian mengusahakan perkebunan tebu dan Belanda mengusahakan pabriknya. Karena Coen menginginkan Batavia menjadi kota perdagangan yang terbesar di Indonesia, maka untuk mencapai hal tersebut para imigran Cina baru didatangkan secara besar-besaran.

Organisasi dagang Cina yang disebut "Tiong Hwa Hwee Kwan" didirikan pada tahun 1902 dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memupuk rasa nasionalisme Cina;
- b. Menyatukan keturunan;
- c. Mempelajari kembali bahasa Cina yang telah diabaikan oleh para perantauan;
- d. Melindungi kepentingan golongan Cina.

Pada tahun 1911 organisasi tersebut telah berkembang ke seluruh kota-kota di Indonesia, di mana kegiatannya bukan saja dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam kegiatan politik yang berhubungan dengan pemerintah negeri leluhurnya. Berkaitan dengan ini gerakan pembaharuan di negeri Cina pada permulaan abad ke-20 mendapat dukungan dari orang Cina perantauan.¹

Pada tahun 1914 Serikat Islam didirikan dengan tujuan mempertahankan dan mengimbangi menyebarluasnya perdagangan Cina, walaupun ada orang Cina yang beragama Islam (Party Tionghoa Islam Indonesia) di Makassar.² Di samping kedudukan orang Cina yang makin baik dan kuat itu, mereka juga mendapat perwakilan dalam lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda.

Perwakilan orang Cina dalam Volksraad ada 3 sampai 5 orang. Akan tetapi pada 1918 ada juga Cina yang menolak perwakilan dalam Volksraad. Banyak di antara keturunan orang Cina dari generasi ke-3 dan ke-4 menyatakan kehadiran mereka di Indonesia hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu orang Cina Indonesia terbagi dalam beberapa golongan:³

- a. Golongan yang tertarik pada politik di negeri leluhurnya;
- b. Golongan yang tertarik kepada perjuangan dan pergerakan rakyat Indonesia;

¹Ibid., hal. 79 dan 91.

²Ibid., hal. 79.

³Ibid., hal. 81.

- c. Golongan yang secara demonstratif berkeinginan untuk tetap bekerjasama dengan pihak pemerintah kolonial.

Pada tahun 1909 didirikan pula suatu organisasi Kamar Dagang "Shiang Hwee" dengan tujuan:

- a. Melindungi kepentingan dagang orang Cina dari diskriminasi yang diadakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dan perusahaan dagang orang pribumi;
- b. Menjadi penghubung antara orang Cina perantauan dengan Pemerintah Cina di negeri leluhurnya, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana bantuan material untuk negara leluhurnya.

Pada tahun 1911 orang Cina mendirikan organisasi "Li Po Sia" sebagai pusat organisasi Kuo Min Tang. Dengan demikian kegiatan orang-orang perantauan sampai tahun 1930-an terutama bergerak dalam bidang:

- a. politik (Li Po Sia);
- b. ekonomi (Shiang Hwee);
- c. pendidikan;
- d. Tiong Hwa Hwee Koan.

Kebijaksanaan Belanda yang bersifat eksklusivisme kultural mulai ditinggalkan pada tahun 1908, sekolah-sekolah Belanda segera dibuka untuk anak-anak kaum peranakan baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil yang penting. Perubahan-perubahan yang terjadi selanjutnya pada sistem hukum Hindia-Belanda telah memberikan golongan elite peranakan suatu status yang lebih dekat kepada status orang Belanda dan orang Indo-Eropa, dan makin jauh dari status penduduk pribumi.

Pada tahun 1920 organisasi *Chung Hua Hui* didirikan oleh orang Cina yang berpendidikan Belanda. Tujuannya adalah memiliki nasionalisme dan kebudayaan negeri leluhurnya. Pada tahun 1939 organisasi tersebut mendapat perwakilan dalam Volksraad. Pada tahun 1932 didirikan suatu partai Tionghoa Indonesia, yang juga mempunyai perwakilan dalam Volksraad dalam tahun yang sama. Partai ini bertujuan supaya orang-orang Cina perantauan menjadi WNI dan melepaskan diri dari kewarganegaraan negeri leluhurnya.

Pada tahun 1925 pergerakan orang Cina dan Indonesia komunis bersatu, tetapi kesatuan ini kemudian pecah kembali, karena masing-masing pihak mempunyai tujuan yang berbeda. Pada tahun 1930 suatu partai baru terbentuk dengan dasar persatuan antar ras untuk kesejahteraan bersama, tetapi

¹ *Ibid.*, hal. 93.

juga gagal. Pada tahun 1940 semangat nasionalisme Cina masih kuat, meskipun ada di antaranya yang ikut dalam pergerakan nasionalis Indonesia. Kemudian banyak di antaranya belajar di Nederland, sehingga kecenderungannya lebih berorientasi ke kebudayaan Barat. Pada waktu mereka ini kembali ke Indonesia, mereka mulai menyerang dan mengkritik orang Belanda supaya memberikan perlindungan terhadap orang Cina dari ancaman penduduk pribumi dan nasionalis Indonesia. Kesadaran nasionalisme Cina memang telah dipupuk dan dibina dengan sengaja oleh pemerintah negeri leluhurnya sejak abad ke-19, yaitu politik kebudayaan melalui pendidikan.

Pada masa pemerintahan Jepang semua organisasi Cina dihapuskan dan dibentuk organisasi *Hua Tsung Hui* yang pemimpinnya ditunjuk oleh Jepang. Tujuan organisasi terutama untuk memudahkan pemungutan pajak dan sumbangan-sumbangan dari orang Cina untuk ongkos perang.

Pada masa revolusi fisik (1945-1949) dan permulaan berdirinya Pemerintah RI, orang Cina disatukan dalam wadah "Chung Hua Tsung Hui."

Karena situasi dan kondisi pada masa revolusi fisik ini orang Cina terbagi dalam 3 golongan:

1. Golongan Cina yang berada di wilayah kekuasaan Belanda. Mereka ini tetap pada usahanya mencari keuntungan dari situasi apa pun yang dihadapinya. Mereka berusaha melayani kebutuhan Belanda sebaik-baiknya. Untuk keperluan ini Belanda mendirikan suatu organisasi semi militer "Pao An Tui," tahun 1947 di Jakarta, organisasi ini diberi latihan dan pendidikan, serta dipersenjatai oleh Belanda. Tujuan organisasi ini di samping untuk membela keselamatan orang Cina, juga memberi tambahan pertahanan bagi Belanda dari orang-orang Cina. Pada tahun 1949 gerakan ini meluas ke seluruh Pulau Jawa. Pemerintah RI akhirnya menindak gerakan ini.
2. Golongan Cina yang berada di wilayah RI. Orang Cina ini ikut berusaha membantu perjuangan menegakkan kemerdekaan RI.
3. Golongan Cina intelektual sebagai hasil pendidikan Belanda. Mereka juga dalam politiknya berpihak kepada Belanda.

Dengan demikian ada 3 golongan Cina:

- a. Golongan yang telah masuk WNI;
- b. Golongan Cina WNA RRC;
- c. Golongan Cina yang masih tidak pasti atau tidak ada kewarganegaraannya atau stateless yang tidak jelas orientasi atau kecenderungan dan lebih dekat ke Taiwan.

PENUTUP

Dari cuplikan sejarah kelompok keturunan Cina di Indonesia yang dikemukakan di atas, ternyata bahwa mereka merupakan kelompok yang pluralistik dan banyak ditentukan oleh lamanya menetap di Indonesia, asal-usul nenek moyangnya, peranan yang berkaitan dengan pekerjaannya serta ideologi politik yang dianutnya.

Manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah pergerakannya dan sering kali terdengar bahwa masa kini ditentukan oleh masa lalu atau merupakan akibat masa lampau. Tetapi dalam mempelajari masalah kelompok keturunan Cina di Indonesia sebaiknya ditempatkan dalam konteks waktu yang kontemporer mengingat perubahan sosial yang terjadi yang tidak terlepas dari situasi dan tuntutan jamannya. Masa lampau merupakan cermin yang mengingatkan pada pengalaman dan merupakan pelajaran untuk masa yang akan datang.

Pembauran Masyarakat Memperkuat Kesatuan Bangsa

SUKANTO*

PENDAHULUAN

Seirama dengan perkembangan masyarakat, perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan, antara lain sering dipergunakannya kata "pembauran" dalam masyarakat. Kata "pembauran" mempunyai banyak arti, yaitu: (a) pencampurbauran menjadi satu; dan (b) penyatuan warga negara keturunan asing dengan penduduk pribumi melalui perkawinan campur. Di samping itu, kata "pembauran" juga merupakan arti kata "asimilasi," di samping arti lainnya, yaitu perpaduan dan pencampuran yang harmonis.¹

Selain itu, ada yang menyatakan bahwa asimilasi merupakan salah satu bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya pengembangan sikap yang sama, yang walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan mencapai kesatuan, atau sekurang-kurangnya untuk mencapai suatu integrasi dalam pikiran, tindakan ataupun organisasi. Dalam proses asimilasi, perkawinan campur bukanlah satu-satunya faktor penentu berlangsungnya asimilasi, karena proses asimilasi tergantung banyak faktor lainnya, yaitu toleransi, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, persamaan unsur-unsur kebudayaan, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat dan adanya musuh bersama dari luar.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, proses sosial tidak selalu berlangsung secara baik, tetapi seringkali juga terjadi persaingan, bahkan tidak jarang ter-

*Staf CSIS.

¹Lihat harian *Kompas* sekitar tanggal 13 Oktober 1982 hingga 5 Nopember 1982, tentang him-punan perbendaharaan kata-kata baru.

Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 74.

jadi pertentangan. Demikian halnya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, proses menuju kesatuan bangsa sering terjadi pertentangan-pertentangan, antara lain pertentangan antara unsur-unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Untuk menghindari terjadinya pertentangan, khususnya antara "pribumi" dan "non-pribumi", sejak tahun 1961 usaha pembauran semakin digalakkan. Namun, usaha itu mengalami banyak hambatan, antara lain karena adanya perbedaan mengenai konsep pembauran itu sendiri. Konsep pertama, yang didukung oleh BAPERKI tetap mempertahankan identitas golongan Tionghoa dalam masyarakat Indonesia dengan segenap segi kehidupannya. Sedangkan konsep lainnya, yang didukung oleh Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB), dan dikembangkan lebih lanjut oleh Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB), menghendaki proses asimilasi secara alamiah dan total, sehingga identitas golongan Tionghoa dalam masyarakat Indonesia lenyap.

PROSES MENJADI SATU TUBUH BANGSA

Para antropolog menyatakan bahwa sejak jaman purba wilayah Nusantara sudah ada penghuninya. Pernyataan itu diperkuat dengan ditemukannya data prasejarah mengenai penggejalaan manusia di wilayah itu, antara lain dengan ditemukannya fosil manusia di lembah Bengawan Solo. Gejala mengenai manusia-manusia penghuni Nusantara itu semakin kuat dengan ditemukannya berbagai data kebudayaan masyarakat pada jaman mula sejarah.¹

Namun, perkembangannya sangat lamban, sehingga masih sangat sederhana dan bersifat kebudayaan setempat. Hal itu terutama disebabkan oleh lingkungan alam Nusantara yang terdiri atas pulau-pulau dengan kondisi alamnya yang beraneka-ragam. Lingkungan alam yang beraneka-ragam itu tidak hanya menimbulkan perbedaan kebudayaan, melainkan juga mempengaruhi ciri-ciri badan manusia-manusianya, sehingga di wilayah Nusantara ditemukan berbagai macam kelompok manusia yang mempunyai sifat-sifat kebudayaan sendiri-sendiri.

Di antara kelompok masyarakat terlihat bahwa sistem kemasyarakatan dan pengetahuannya yang masih sederhana, antara lain ada yang mengembangkan sistem sosial berdasarkan kekerabatan dan wilayah. Lagi pula, sistem kekerabatannya juga beraneka-ragam, yakni ada yang menganut garis keturunan dari bapak (patrilineal), garis keturunan dari ibu (matrilineal) dan garis keturunan kedua orang tua (parental). Pada masa itu gerak sosial dan mobilitas anggota-anggota kelompok masih terbatas di daerahnya, dan ikatan

¹Lihat Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: CSIS, 1978); dan Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: PD. Aksara Baru, 1972).

kelompoknya pun masih sangat kuat, sehingga tidak jarang terjadi pertentangan antar suku, bahkan antar kelompok dalam satu suku.

Masyarakat-masyarakat setempat dalam wilayah Nusantara itu terus berkembang, dan bersamaan dengan perkembangan itu masuk para pendatang dari luar Nusantara, antara lain orang-orang India, Cina, Persia, Arab, Portugis, Belanda dan Inggris. Berbagai peristiwa sejarah menunjukkan bahwa walaupun interaksi antar masyarakat-masyarakat setempat dan antara masyarakat setempat dan para pendatang sering menimbulkan pertentangan, tetapi bersamaan dengan itu selalu terjadi akomodasi, bahkan terjadi asimilasi dan akulterasi. Di antaranya terlihat bahwa sistem religi masyarakat-masyarakat setempat atau yang lebih dikenal dengan suku-suku bangsa, yang terdiri dari berbagai macam agama asli,¹ menjadi lebih bervariasi dengan masuknya agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan Katolik. Sistem pemerintahan masyarakat-masyarakat setempat juga mengalami perkembangan dengan masuknya sistem pemerintahan dari kebudayaan India dan Arab, yakni bermunculannya kerajaan-kerajaan yang bereorak Hindu dan Budha, serta kesultanan-kesultanan yang bereorak Islam. Dengan masuknya kebudayaan Barat, terutama yang dibawa serta oleh para pendatang Belanda dan Inggris, sistem teknologi, pengetahuan, ekonomi dan kemasyarakatan masyarakat-masyarakat setempat juga mengalami perubahan. Namun, pengaruh kebudayaan asing itu tidak sampai melenyapkan unsur-unsur kebudayaan masyarakat-masyarakat setempat, melainkan hanya menimbulkan akulterasi, dalam arti subyek budayanya tetap satu, yakni masyarakat Nusantara yang berkembang dan diperkaya dengan unsur-unsur kebudayaan India, Arab, Cina dan Barat.

Dengan makin luas dan mendalamnya perembesan sistem penjajahan Belanda di wilayah Nusantara atau Hindia Belanda, keadaan sosial ekonomi masyarakat-masyarakat setempat tidak semakin baik, tetapi justru menimbulkan kemelaratan, bahkan menghambat kemajuan masyarakat. Hal itu lambat-laun mempengaruhi kesadaran kelompok yang sempit berkembang ke arah kesadaran kelompok yang lebih luas dan meningkat menjadi kesadaran berpolitik. Namun, karena ikatan kelompok masyarakat-masyarakat setempat, jiwa feodal dan ambisi-ambisi pribadi di kalangan para bangsawan masih kuat, keadaan ini sering dimanfaatkan oleh penjajah Belanda dengan mengadu-domba atau memecah-belah masyarakat-masyarakat setempat. Di samping itu, penjajah Belanda juga menciptakan sistem kewarganegaraan yang membagi warga negara Hindia Belanda menjadi tiga kelas, yaitu orang-orang kulit putih menjadi kelas satu, orang-orang Asia menjadi kelas dua dan orang-orang bumiputra dimasukkan ke dalam kelas tiga.

¹Lihat Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981).

Kebijaksanaan pemerintah penjajah Belanda itu tidak hanya menekan perkembangan sosial ekonomi masyarakat-masyarakat setempat, tetapi juga dirasakan sebagai penghambat kemajuan martabat para warganya. Keadaan itu makin menyadarkan para pemuka masyarakat-masyarakat setempat, khususnya para cendekiawan yang berasal dari masyarakat itu, serta yang sering melakukan kontak dan komunikasi di kota-kota besar, dengan mendirikan organisasi-organisasi sosial yang bersifat kedaerahan, seperti Yong Jawa, Sumatera, Ambon dan Sulawesi, kemudian meningkat menjadi organisasi sosial yang lebih luas, seperti Boedi Oetomo. Gerakan yang semula bersifat sosial itu semakin berkembang menjadi gerakan politik, yakni dengan berdirinya partai-partai politik. Bersamaan dengan itu, kontak dan komunikasi para pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, semakin meningkat, sehingga melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka yang tergabung dan merasa terikat oleh Sumpah Pemuda adalah mereka yang berani mengorbankan ikatan kesukuannya, dan secara sadar memperkuat ikatan solidaritas yang lebih luas. Ernest Renan menyatakan bahwa suatu bangsa adalah suatu solidaritas yang besar, yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi.¹ Dengan demikian peristiwa Sumpah Pemuda itu merupakan suatu penegasan kembali masyarakat Nusantara sebagai suatu bangsa yang harus mandiri.

Sejak itu ikatan solidaritas para pemuka masyarakat di Jakarta, semakin meluas dan mengakar ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia menegara, yakni dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan lebih kukuh lagi dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan Proklamasi Kemerdekaan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 itu, masyarakat Indonesia mulai memasuki tahapan baru, yakni sekaligus memasuki kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa, tidak hanya merupakan federasi antara kelompok-kelompok manusia Nusantara yang masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan sosial baru dan mewujudkan ikatan solidaritas yang meliputi segenap manusia-manusia Indonesia. Dengan demikian, ikatan solidaritasnya bukan lagi karena persamaan suku, agama, ras ataupun golongan, melainkan berasaskan ikatan kejiwaan, solidaritas dan kesetiakawanan seluruh manusia-manusia Indonesia yang bersama-sama berkeyakinan sebagai Satu Tubuh Bangsa Indonesia. Lebih dari itu dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para warga bangsa juga

¹Lihat Harsya W. Bachtiar, "Bhinneka Tunggal Ika dalam Kebudayaan dan Masalah Kesatuan Bangsa Indonesia," *Kebudayaan*, No. 1, Tahun 1980.

menjadi warga negara, yang ikatannya tidak hanya ikatan solidaritas dan kesetiakawanan, melainkan juga terikat oleh asas-asas yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta peraturan perundangan sebagai penjabaran dan pelaksanaannya.

BEBERAPA MASALAH PEMBAURAN MASYARAKAT INDONESIA

Dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, lebih-lebih dengan makin lancarnya roda pemefintahan negara sampai ke pelosok wilayah Indonesia, proses sosial dalam masyarakat bukannya berhenti, melainkan justru makin luas, cepat dan kompleks. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, memang merupakan hasil perjuangan bangsa yang sangat gemilang, tetapi dengan pernyataan kemerdekaan itu bukan berarti berakhirnya perjuangan bangsa. Dengan telah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku sebelumnya berubah sama sekali. Sejak itu bangsa Indonesia memasuki tahapan perjuangan baru ke arah terciptanya struktur baru yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan benar-benar dapat memberikan nilai-nilai baru terhadap kehidupan masyarakat. Proses pembentukan identitas bangsa Indonesia semakin berkembang dan kukuh, terutama dengan dipilihnya Wawasan Nusantara, yaitu yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan, sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya.

Walaupun proses pembentukan identitas bangsa makin kukuh, tetapi proses pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang baru, seringkali masih menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya ialah karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan peraturan-peraturan hukum yang baru, belum dihayati dan diamalkan dalam masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang antara lain terdiri dari berbagai unsur suku, agama, ras dan golongan. Lagi pula, masing-masing unsur itu menghayati nilai-nilai tersendiri, sehingga dalam masyarakat tercipta berbagai lapisan. Dalam perkembangannya, terutama dengan makin tingginya frekuensi interaksi antar orang-orang dari berbagai unsur masyarakat itu, nilai-nilai yang dihayatinya juga telah mengalami perubahan. Namun, proses interaksi dalam masyarakat itu belum dapat melenyapkan seluruh nilai-nilai lama yang dihayati masing-masing unsur. Di antaranya terlihat bahwa nilai-nilai primordial, seperti ikatan kesukuan, keagamaan dan kedaerahan, masih berpengaruh kuat. Nilai-nilai itu tampaknya tidak hanya dihayati oleh masyarakat-masyarakat setempat dan

lapisan-lapisan bawah, tetapi juga berpengaruh kuat dalam lapisan-lapisan di atasnya. Masih kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial pada lapisan atas, termasuk di kalangan pemerintah pusat, mempersulit penciptaan konsepsi-konsepsi yang berasaskan nilai-nilai baru yang bersifat nasional, sehingga sosialisasi nilai-nilai baru ke dalam masyarakat luas pun tersendat-sendat.

Bahkan ada kesan bahwa nilai-nilai primordial yang masih berpengaruh dalam masyarakat, secara sadar dimanfaatkan hanya demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Perbuatan itu tampak jelas pada masa penjajahan Belanda, yaitu perbedaan-perbedaan SARA dipertajam sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan antar suku, agama, ras atau golongan, semata-mata untuk melanggengkan kepentingan penjajah Belanda di Hindia Belanda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pertentangan-pertentangan seperti itu juga masih sering terjadi, misalnya peristiwa PRRI, Permesta dan adanya tuntutan jabatan-jabatan politik tertentu untuk putra-putra daerah. Pertentangan-pertentangan yang tampaknya merupakan pertentangan antar suku, agama, ras ataupun golongan itu, sebenarnya bukan karena perbedaan-perbedaan suku, agama, ras ataupun golongan semata-mata, melainkan terutama karena pertentangan kepentingan. Demikian juga mengenai peristiwa Bekasi tahun 1945, Tangerang tahun 1946, Jawa Timur tahun 1947, Sukabumi tahun 1963, Bandung tahun 1973, Ujung Pandang dan Solo pada tahun 1980, bukan pertentangan antar ras semata-mata, tetapi perbedaan ras antara penduduk asli dan Tionghoa dieksplorasi demi kepentingan politik dan ekonomi tertentu. W.A. Gerungan menyatakan bahwa pertentangan sosial dapat terjadi karena prasangka sosial, sedangkan prasangka sosial itu sendiri dapat terjadi karena kepentingan perseorangan ataupun golongan.¹

Pertentangan sosial tidak hanya karena penajaman perbedaan unsur-unsur SARA, tetapi juga mungkin terjadi karena penajaman perbedaan antara kaya dan miskin. Sebagaimana telah diketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah sampai di negara kita. Bahkan secara sadar, ilmu pengetahuan dan beberapa jenis teknologi mutakhir dimasukkan ke dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan kehidupan masyarakat. Dalam suasana perubahan yang sangat cepat itu, ternyata banyak anggota masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keadaan sosial ekonominya tertinggal jauh daripada mereka yang mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan sosial ekonomi itu mengurangi frekuensi interaksi dalam masyarakat, baik interaksi antar orang-orang sesuku, seagama, maupun dalam ras dan golongan yang sama, karena interaksi sosial yang dapat melahirkan kerjasama yang saling menguntungkan lebih banyak terjadi antara orang-orang yang memiliki faktor-faktor seimbang atau mempunyai

¹Lihat W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresco, 1980).

kepentingan sama. Para sosiolog, yaitu Sorokin, Zimmerman dan Galpin, menyatakan bahwa derajat solidaritas ataupun integrasi ditentukan oleh serangkaian faktor yang sama. Makin banyak faktor yang terkumpul sebagai landasan integrasi, maka derajat solidaritasnya pun akan semakin tinggi.¹ Dengan demikian, perbedaan-perbedaan sosial, seperti perbedaan tingkat pendidikan, kemampuan berkomunikasi dan sosial ekonomi, dapat menghambat proses asimilasi dan integrasi bangsa. Lagi pula, perbedaan-perbedaan sosial itu sering dipertajam dan dieksplorasi sebagai sumber isyu kaya dan miskin, sehingga menimbulkan jarak sosial dan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Jika perbedaan-perbedaan sosial itu semakin luas dan dalam, dapat menggoyahkan penghayatan masyarakat terhadap sendi-sendi dasar kebangsaan dan kenegaraan, bahkan tidak mustahil akan membuka peluang berkembangnya ideologi lain.

Di samping itu penajaman perbedaan unsur-unsur SARA dan sosial itu, dapat mengganggu keamanan dan pembangunan nasional. Kurang atau tiadanya jaminan keamanan dan tiadanya iklim yang menguntungkan bagi usaha perekonomian, dapat mengurangi minat, bahkan menghentikan usaha para penanam modal asing. Selain itu, perasaan kurang aman di dalam negeri, juga dapat mendorong sementara warga negara untuk pindah ke negara lain dan menjadi warga negara lain pula. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pernyataan Umum Hak-hak Manusia PBB,² khususnya dalam pasal 13, 14 dan 15, setiap orang memang berhak meninggalkan negerinya dan mempunyai suatu kewarganegaraan. Lagi pula, perpindahan kewarganegaraan itu mungkin tidak sampai melepaskan ikatan solidaritas dan kejiwaannya sebagai anggota bangsa Indonesia. Namun, di samping hak-hak yang dinikmatinya, setiap orang juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat, karena hanya dalam masyarakat ia akan memperoleh kemajuan yang akan meningkatkan martabatnya. Oleh karena itu, walaupun ikatan kebangsaan Indonesianya masih ada, mereka lebih terikat oleh peraturan-peraturan hukum negara barunya, sehingga partisipasinya dalam pembangunan negara-bangsa Indonesia sulit dilakukan secara langsung. Jika perpindahan kewarganegaraan semakin banyak, dan sebagian besar dilakukan para cendekiawan ataupun pengusaha, apalagi dilakukan oleh orang-orang oportunitisme, maka pembangunan negara-bangsa akan rapuh. Keadaan itu menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas bangsa tidak mampu menumbuhkan integritas nasional. Bagaimanapun, bagi bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang relatif muda, sangat membutuhkan kadér-kader bangsa yang tangguh, yaitu

¹Lihat Dr. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 135.

²Lihat "Pernyataan Umum Hak-hak Manusia," *Ensiklopedia Indonesia* (Bandung: W. van Hoeve), hal. 27-30.

orang-orang yang mempunyai integritas kepribadian lengkap, berkeahlian dan bertanggung jawab.

BEBERAPA MASALAH PEMBAURAN ORANG-ORANG SUKU DAN TIONGHOA

Setelah bangsa Indonesia menegara, interaksi secara alamiah, dalam arti timbulnya kontak dan komunikasi tanpa pengaturan atau paksaan, antara penduduk Indonesia asli dan orang-orang Tionghoa, masih tetap berlangsung, bahkan semakin berkembang luas. Hal itu terlihat dari banyaknya perkawinan campur antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang dari berbagai suku. Selain itu, kalau pada masa penjajahan Belanda lapangan usaha perekonomian lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Belanda dan Tionghoa, setelah Proklamasi Kemerdekaan secara berangsur-angsur terbuka kesempatan-kesempatan yang sama, dan semakin banyak kerjasama antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang dari penduduk Indonesia asli. Bahkan banyak orang-orang Tionghoa yang meleburkan diri secara total ke dalam masyarakat hukum penduduk asli setempat. Ini semua menunjukkan bahwa interaksi antara orang-orang Tionghoa dan penduduk asli telah memasuki proses asimilasi bahkan integrasi sebagai satu bangsa Indonesia.

Namun, masih diperoleh kesan bahwa proses yang dimaksudkan belum dilakukan oleh seluruh orang-orang Tionghoa. Sebagaimana diketahui, walaupun ras orang-orang Tionghoa sama, tetapi aspirasi mengenai kebangsaan dan kewarganegaraannya tidak sama. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, terdapat dua aspirasi orang-orang Tionghoa mengenai kebangsaan dan kewarganegaraannya. Kelompok pertama memilih kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia, sedangkan lainnya memilih kebangsaan dan kewarganegaraan Tiongkok. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, dua pandangan itu tampaknya masih mempunyai pengikut-pengikutnya sendiri-sendiri. Hal itu antara lain terlihat bahwa ketika terjadi pertarungan politik dan militer antara Belanda dan Indonesia, banyak penduduk Tionghoa yang lebih memikirkan perdagangannya dan bersikap netral.¹ Demikian juga sewaktu diadakan penentuan kewarganegaraannya, David Mozingo memperkirakan terdapat sekitar 600.000 orang atau sekitar 40% dari orang-orang keturunan Tionghoa yang secara formal menolak kewarganegaraan Indonesia.² Dua pandangan itu masih berkelanjutan, yaitu dengan lahirnya dua

¹Lihat, Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 202; Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 79; tajuk harian *Sinar Harapan*, 9 April 1981.

²Lihat B.P. Paulus, *Kewarganegaraan Republik Indonesia Ditinjau Dari UUD 1945* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1983), hal. 233.

konsepsi tentang pembauran antara orang-orang Tionghoa dan penduduk asli. Pandangan pertama, yang didukung oleh BAPERKI, tetap mempertahankan orang-orang Tionghoa sebagai suatu golongan tersendiri dalam masyarakat bangsa Indonesia, termasuk identitas etnis beserta segenap segi kehidupannya. Sedangkan pandangan lainnya, yang didukung oleh Bakom-PKB, lebih menekankan pada proses asimilasi secara alamiah dan total atas dasar individual, sehingga identitas golongan keturunan Tionghoa dalam masyarakat bangsa Indonesia lenyap sama sekali.

Dalam perkembangan selanjutnya masih diperoleh kesan bahwa sebagian orang-orang Tionghoa belum terlibat dalam proses asimilasi dan integrasi dengan penduduk Indonesia asli. Suatu survei tentang orientasi nilai budaya orang-orang Tionghoa, menyatakan bahwa pada umumnya generasi tua dan mudanya berorientasi pada nilai budaya yang lebih mementingkan karya dan menguasai alam. Mereka juga berorientasi pada nilai budaya yang mementingkan individu serta menganggap disiplin diri dan tanggung jawab diri sendiri sangat penting.¹ Dalam ceramahnya di Yogyakarta, Dr. Onghokham mengatakan, bahwa ruang lingkup kehidupan orang-orang keturunan Tionghoa cenderung sempit. Permasalahan yang dibicarakannya lebih terpusat pada masalah dagang, jarang sekali membicarakan masalah sosial dan budaya atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah nasionalisme.² Sementara itu, tajuk harian Kompas menyatakan bahwa pembauran di bidang ekonomi tidak akan berhasil, jika hanya dilakukan dengan mencampur saja, tanpa memperhatikan tingkah laku dan sifat ekonomi golongan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa mempunyai banyak organisasi ekonomi yang bersifat non-formal dan sulit menerima anggota-anggota baru. Mereka juga tergabung dalam berbagai kelompok dagang, yang satu dengan lainnya saling bersaingan.³ Jika sikap mementingkan diri dan tertutup masih berlangsung di kalangan orang-orang Tionghoa, maka mungkin sekali sikap toleransi dan simpatinya terhadap orang-orang penduduk asli pun kurang sekali.

Sikap sebagian orang-orang Tionghoa itu seringkali menenggelamkan sikap dan perilaku orang-orang Tionghoa lainnya yang lebih mementingkan proses asimilasi dengan orang-orang penduduk Indonesia asli, bahkan seringkali menimbulkan prasangka sosial di kalangan orang-orang penduduk Indonesia asli. Dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh Sanggar Kerja Universitas Indonesia dalam tahun 1967, Emil Salim mengatakan bahwa unsur-unsur yang membangkitkan masalah Tionghoa, antara lain secara historis, status ekonomi penduduk Tionghoa lebih tinggi dibandingkan pen-

¹Lihat Pauline Ratna Hendrati, *Perbedaan Orientasi Nilai-Budaya antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Tionghoa* (Jakarta: Leknas-LIPI, 1975).

²Lihat Antara, *Warta Berita*, tanggal 6 April 1981.

³Lihat *Kompas*, tanggal 16 Januari 1982.

duduk asli. Secara ekonomis, mereka lebih gesit dan cakap, sehingga kedudukan ekonominya lebih tinggi. Sedangkan secara politis, loyalitasnya cenderung oportunistis. Perbedaan posisi ekonomi yang menyolok dalam setting ekonomi yang inflatoire dan pembagian rezeki yang timpang, menghidupkan sentimen sosial psikologis yang negatif, bahkan mengandung unsur-unsur yang eksplosif.¹ Hasil survei LPKB menyatakan, bahwa Peristiwa 10 Mei 1963 terjadi antara lain akibat penajaman gambaran orang-orang Tionghoa secara negatif di kalangan penduduk asli.² Gambaran negatif orang-orang Tionghoa itu tampaknya masih ada di kalangan penduduk asli hingga sekarang. Namun, pengembangan prasangka atau stereotip orang-orang Tionghoa yang materinya sudah ada sejak lama, memberikan kesan telah dijadikan permainan kepentingan. Dengan demikian, berkembangnya prasangka ataupun stereotip itu bukan lagi karena kekurangan pengetahuan tentang kedua belah pihak, melainkan mungkin sekali telah dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan atau rezeki. Hasil seminar pers di Pontianak dalam bulan Nopember 1982, antara lain menyebutkan bahwa persaingan dalam memperebutkan mata pencarian yang sama dapat menjadi sumber pertentangan yang bersifat SARA.³ Faktor kepentingan memang dapat menutup mata dan hati nurani, dengan melakukan persaingan tidak sehat, antara lain dilakukan dengan merangsang orang-orang yang frustrasi, putus asa ataupun bermental lemah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, termasuk perbuatan yang bersifat SARA.

Di samping itu, ada kesan juga bahwa perbedaan konsep, sikap dan perilaku dalam proses pembauran di kalangan orang-orang Tionghoa, mempersulit perumusan dan pelaksanaan beberapa kebijakan kenegaraan. Hal ini terlihat dalam kebijakan di bidang ekonomi, seperti Keputusan Presiden No. 14, 14A dan 18, yang menjadi bahan polemik antara orang-orang yang seakan-akan mengatasnamakan golongan Tionghoa dan penduduk Indonesia asli. Polemik semacam itu juga terjadi dalam kebijakan tentang pemukiman orang-orang Tionghoa yang dianggap cenderung eksklusif⁴ dan kebijakan di bidang kewarganegaraan. Profesor Subekti mengatakan bahwa peraturan perundangan tentang kewarganegaraan yang berlaku sekarang bukan peraturan perundangan organik dari Undang-Undang Dasar 1945, melainkan peraturan perundangan organik dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pada itu, Dr. Paulus Palus mengatakan bahwa antara

¹Lihat UI, *Hasil-hasil Sanggar Kerja Universitas Indonesia Tahun 1967*; lihat juga Lie Tek Tjeng, *Masalah Warga Negara Indonesia dan Masalah Huakian di Indonesia* (Jakarta: LRKN-LIPI, 1971) dan Ir. H.M. Sanusi, "Sentimen Terhadap Keturunan Cina Sebenarnya Mudah Diatasi," *Kiblat*, No. 11/XXVIII.

²Lihat LPKB, *Peristiwa "10 Mei" dalam Penelitian* (Jakarta: KOTI, 1965).

³Lihat *Hasil Rilis Seminar Pers di Pontianak tanggal 18-21 Nopember 1982*.

⁴Lihat harian *Kompas*, tanggal 30 April 1983.

pembauran yang dicita-citakan dan peraturan perundangan tentang kewarganegaraan yang berlaku sekarang terdapat semacam antagonisme, bahkan keduanya berdiri sendiri-sendiri. Praktek pewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini juga terlalu mudah dan tidak menunjang proses pembauran dalam mewujudkan kesatuan bangsa yang dicita-citakan.¹ Adanya reaksi yang bersifat pro dan kontra tersebut, seringkali ditanggapi sebagai bahan perubahan kebijakan kenegaraan. Namun, tidak jarang terjadi masukan-masukan yang materinya saling bertentangan dijadikan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan baru, sehingga memberikan kesan seolah-olah perubahan itu merupakan pemusas emosi politis belaka. Perubahan kebijakan semacam itu hanya akan mempertahankan status quo struktur masyarakat yang ada dan mungkin justru mengaburkan konsep dasarnya, bahkan mungkin sekali menyimpang ataupun bertentangan dengan sendi-sendi dasar kebangsaan dan kenegaraan. Seorang sosiolog, Milton Gordon, memerinci asimilasi dalam tujuh macam, yaitu: (1) asimilasi kebudayaan, yakni penyesuaian perilaku dengan kelompok mayoritas; (2) asimilasi struktural, yakni masuknya golongan minoritas secara besar-besaran dalam klik, perkumpulan ataupun pranata-pranata kelompok primer mayoritas; (3) asimilasi perkawinan; (4) asimilasi identifikasi, yakni tumbuhnya perasaan kebangsaan berdasarkan kebangsaan mayoritas; (5) asimilasi sikap, yakni tidak adanya prasangka; (6) asimilasi perilaku, yakni tidak adanya diskriminasi; dan (7) asimilasi civic, yakni tidak adanya bentrokan sistem nilai dalam pengertian kekuasaan.² Dengan demikian, masih adanya sikap dan perilaku sebagian orang-orang Tionghoa dan penduduk asli yang enggan berasimilasi, dapat menghambat proses pembentukan identitas menuju integritas bangsa.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa perjalanan masyarakat Nusantara menuju terwujudnya kesatuan bangsa, tidak berjalan secara mulus, melainkan masih menghadapi berbagai macam masalah. Di antaranya ialah masih kuatnya pengaruh nilai-nilai primordial yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa kini, seperti nilai-nilai kesukuan, kedaerahan, ras, keagamaan dan golongan yang sempit. Nilai-nilai itu seringkali menghidupkan prasangka dan stereotip masing-masing unsur SARA, bahkan ada kesan sering dieksplorasi hanya demi kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Beberapa peristiwa yang bersifat SARA menunjukkan bahwa peristiwa-

¹Lihat harian *Sinar Harapan*, tanggal 9 Maret 1981.

²Lihat B.P. Paulus, *op. cit.*, hal. 453.

peristiwa itu timbul bukan karena perbedaan unsur-unsur SARA belaka, tetapi terutama karena bentrokan kepentingan dalam memperebutkan suatu keuntungan.

Adalah suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Dengan telah dipilihnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara sebagai asas dan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, berarti masyarakat bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menggaruniainya bertanah air dan berbangsa Indonesia. Kenyataan-kenyataan yang berbeda-beda tetapi satu sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," tidak dapat diingkari oleh siapa pun. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini kiranya tidak dimaksudkan dan tidak mungkin menghilangkan kebhinnekaan tertentu, seperti keragaman suku, agama, ras dan golongan. Pada masa penjajahan, kebhinnekaan tersebut sering dipakai sebagai alat untuk memecah-belah masyarakat guna melanggengkan penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Dalam era pembangunan sekarang, kebhinnekaan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat kemajuan segenap bangsa Indonesia. Ini berarti perbedaan-perbedaan yang ada bukannya untuk saling dipertentangkan, tetapi diserasikan dalam rangka pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian, akan terjadi semacam asimilasi secara terus-menerus antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan. Dalam proses itu, kebhinnekaan akan memperkaya ketunggalikaan, dan sebaliknya ketunggalikaan memberi ruang bagi berkembangnya kebhinnekaan. Jika interaksi antar unsur-unsur SARA, termasuk interaksi antara orang-orang Tionghoa dan penduduk asli berlangsung secara demikian, berarti akan membuka peluang terjadinya proses asimilasi, yang pada gilirannya akan memperkuat kesatuan bangsa Indonesia.